Harian Umum

MEMIHAK KEBENARAN

SUARA PEMBARUAN

Rabu, 4 November 2020

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS



Dorong Perhutanan Sosial

Presiden Jokowi mendorong realisasi program Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektare.

Kesra & Budaya > 12

Perkembangan Kasus Covid-19

	Total	Sembuh	Kematian
Indonesia	418.375	349.497	14.146
Jakarta	107.846	96.809	2.298
Dunia	47.508.704	34.157.777	1.213.956

DATA WORLDOMETERS DAN COVID19.GO.ID SAMPAI SELASA (3/11) PUKUL 20.00 WIB

Rekor MURI untuk Meikarta

Central Park di Meikarta, memecahkan rekor Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) sebagai taman buatan terluas.

Ekonomi & Keuangan > 7



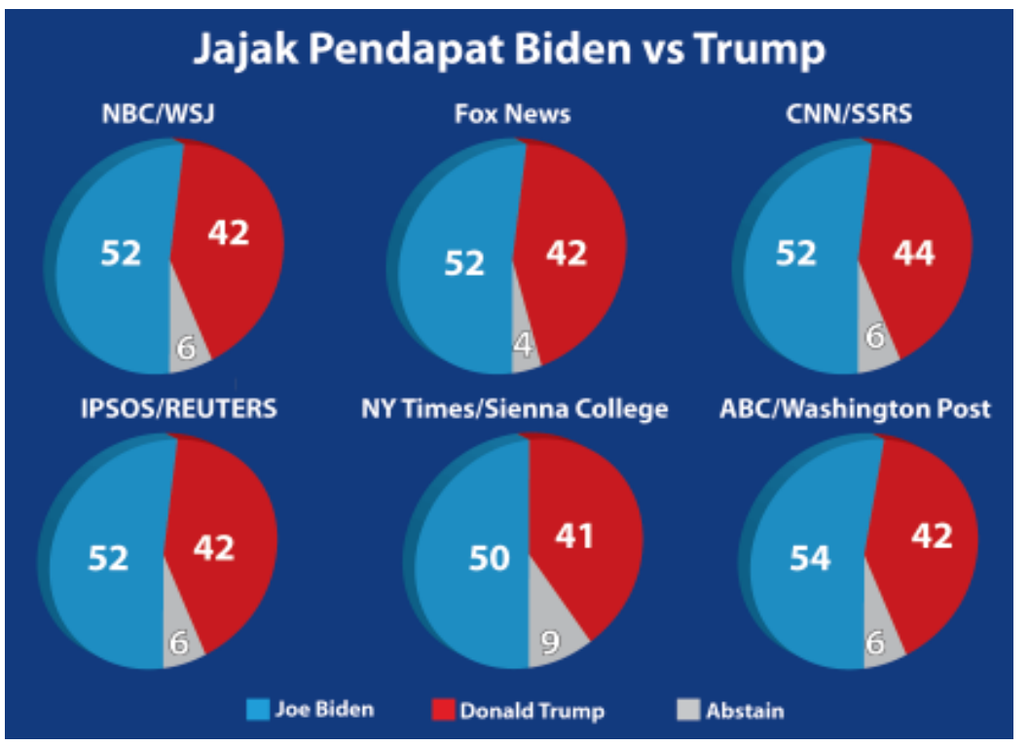
Pilpres AS

Jajak Pendapat Menangkan Biden



AFP/ GETTY IMAGES/ DREW ANGERER

Calon presiden AS dari Partai Demokrat, Joe Biden menyapa pendukungnya di Scranton, Pennsylvania, saat tempat pemungutan suara pemilihan presiden mulai dibuka pada Selasa (3/11) pagi waktu setempat.



[PENNSYLVANIA] Jajak pendapat yang digelar sejumlah lembaga dan media terkemuka memberikan kemenangan kepada Joe Biden dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) yang digelar Selasa (3/11) waktu setempat. Rata-rata jajak pendapat mencatat selisih kemenangan 10 poin bagi Biden atas lawannya Donald Trump.

Jajak pendapat terakhir yang dilakukan *CNN*, misalnya, menempatkan capres dari Partai Demokrat itu unggul dengan dukungan 52% berbanding 42% dukungan bagi Trump yang diusung Partai Republik dan berstatus petahana.

Sementara jajak pendapat yang dilakukan *Fox News* menghasilkan 52:44 bagi kemenangan Biden. Demikian pula menurut jajak pendapat *New York Times*, mantan wakil presiden AS tersebut juga unggul atas Trump dengan 50:41.

Kubu Trump tampaknya khawatir dengan hasil jajak pendapat. Hal itu tercermin dari upaya mereka meminta supaya penghitungan suara yang masuk via pos dihentikan setelah hari-H, selesai tidak selesai.

Pemberian suara lewat pos harus dilakukan sebelum hari-H, tetapi proses transportasi membuka peluang surat suara itu akan diterima penyelenggara pemilu pada atau setelah hari-H. Suara inilah yang ingin dibuang oleh kubu Trump, karena khawatir kebanyakan suara via pos diberikan oleh pendukung Partai Demokrat.

Trump sangat ingin mempertahankan tradisi di mana mayoritas petahana mampu melanjutkan masa kepresidenannya. Dalam sejarah kepresidenan di AS, baru ada tiga calon petahana yang kalah. Untuk dapat terpilih kembali, Trump harus mendapatkan minimal 270 suara elektoral, dari total 538 suara elektoral yang tersebar di 50 negara bagian dan ibu kota federal District of Columbia.

Keyakinan Biden

Sementara itu, Joe Biden memprediksi kemenangan besar dalam pilpres kali ini. Keyakinan itu disampaikannya saat kampanye final bersama bintang pop Lady Gaga. Kampanye terakhir Biden dalam format *drive-in*, digelar di kota Pittsburgh, Pennsylvania sebagai negara bagian kunci kemenangan pemilu pada Senin (2/11).

Pennsylvania, yang disebut pula Keystone State, menyumbang 20 suara elektoral untuk pemilu AS.

bersambung ke hal > 5
terkait halaman > 10

Pilkada Harus Jadi Gerbong Pengendalian Covid-19



ISTIMEWA

Widodo Muktiyo



ISTIMEWA

Riris Andono Ahmad



ISTIMEWA

Viryan Azis



ISTIMEWA

Mada Sukmajati



SP/JOANITO DE SOJOAO

Akmal Malik



ANTARA

Ahmad Doli

[JAKARTA] Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang, harus menjadi gerbong untuk mengendalikan Covid-19. Hal itu bisa terwujud jika seluruh pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu, dan warga yang akan menggunakan hak pilih, mampu berdisiplin menerapkan protokol kesehatan

Dengan demikian, pilkada serentak mendatang akan tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Sejalan dengan itu, hak pilih masyarakat terjamin dan partisipasi pemilih tetap tinggi agar kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi politik yang kuat. Target partisipasi pemilih 77,5% pada pilkada mendatang pun dinilai akan mampu terwujud.

Demikian benang merah dari serial webinar Pilkada 2020 bertema "Menjamin Hak Pilih dan Partisipasi Pemilih, yang diselenggarakan Beritasatu Media Holdings bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Selasa (3/11).

Webinar tersebut menampilkan panelis Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Widodo Muktiyo, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz, Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolo Kurnia Tandjung, pakar politik dan pemerintahan Fisipol UGM Mada Sukmajati, epidemiolog Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM Riris Andono Ahmad, serta dipandu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu.

Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto saat mengawali webinar menekankan pentingnya untuk memberikan jaminan hak pilih. "Sangat penting bagi kita memberikan jaminan hak pilih kepada masyarakat dan jaminan keamanan dari penyebaran Covid-19. Dengan begitu pilkada bisa berlangsung sehat dan kita memiliki pilkada yang *legitimate*," katanya.

bersambung ke hal > 5





Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada

Pemilu/Pilkada	Partisipasi Pemilih (%)
Pemilu 2014	
a. Pilpres	71,31
b. Pileg	75,11
Pilkada 2015	69,35
Pilkada 2017	74,89
Pilkada 2018	74,92
Pemilu 2019	
a. Pilpres	81,97
b. Pileg DPR	81,69
c. Pileg DPD	82,52
Pilkada 2020*	77,50

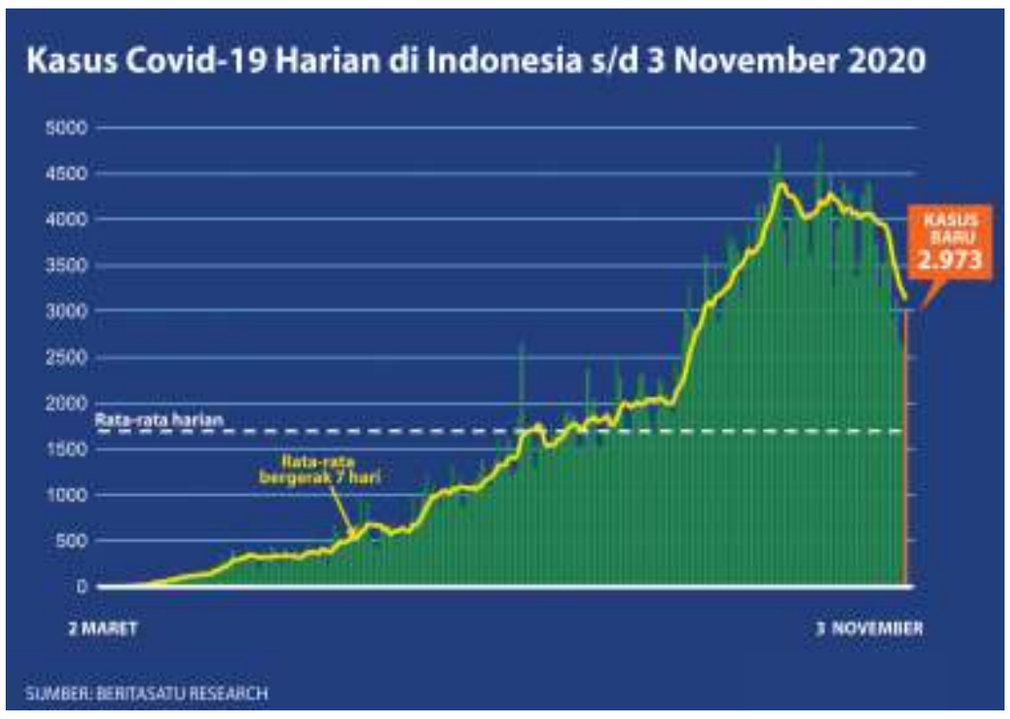
*Target

Sumber: KPU

Peralatan Protokol Kesehatan di TPS

1. Tempat cuci tangan dan sabun
2. Hand sanitizer
3. Sarung tangan plastik untuk pemilih
4. Sarung tangan medis untuk petugas (KPPS)
5. Masker
6. Face shield
7. Alat pengukur suhu (thermo gun)
8. Disinfektan
9. Tinta tetes bagi pemilih setelah memberikan suara
10. Baju hazmat
11. Ruang khusus bagi pemilih dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius
12. Tempat sampah





UU Cipta Kerja

Menkumham: Lompatan Besar Sejarah Hukum Indonesia

[JAKARTA] Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebut UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai lompatan besar dalam sejarah hukum Indonesia.



ANTARA

Yasonna

Yasonna juga menyebut *omnibus law* UU Ciptaker ini menjadi terobosan kreatif untuk memajukan bangsa. Terlepas dari berbagai kontroversi yang melingkupinya, UU Ciptaker yang telah diundangkan menjadi UU 11/2020 dinilai Yasonna sangat reformatif dan fenomenal. Hal ini lantaran untuk pertama kalinya, Indonesia menggunakan metode *omnibus law* secara komprehensif untuk sebuah Undang-undang.

"Kita boleh berbeda pendapat, tapi bagi saya ini adalah sebuah lompatan besar dan terobosan kreatif untuk memajukan bangsa. Hal ini hanya mungkin terjadi karena determinasi yang kuat dari seorang Presiden dengan visi yang melihat jauh ke depan serta didukung oleh pimpinan dan anggota DPR, termasuk oleh banyak pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain," kata Yasonma, di Jakarta, Selasa (3/11).

Yasonna meyakini, UU Ciptaker memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Menurutnya, UU Ciptaker dirancang untuk dapat mentransformasi ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya meningkatkan lapangan kerja yang luas.

"UU Cipta Kerja memangkas tumpang tinding regulasi, birokrasi perizinan yang ruwet serta menghilangkan potensi korupsi perizinan, menciptakan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, UMKM, koperasi, serta meningkatkan investasi pada karya dan padat modal, juga menciptakan kepastian hukum berusaha," katanya.

Kawal

Sementara itu, anggota Badan Legislatif DPR, Hendrawan Supratikno mengajak masyarakat untuk mendukung dan mengawal UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah ditandatangani tersebut. Mengingat, UU tersebut dinilainya sangat berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Niatan undang-undang ini luar biasa baiknya. Ya tentu kita akan terus mengawal, termasuk peraturan pemerintah dan turunannya. Ini niatan pemerintah baik," kata Hendrawan, di Jakarta, Selasa (3/11).

Dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak termakan *hoax* atau kabar bohong mengenai UU Ciptaker. Masyarakat diharapkan bisa lebih teliti dalam membaca isi dan jangan percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.

"Semua pihak selalu menyatakan mempelajari UU ini dengan baik. Dicermati, jangan belum membaca dan belum mencermati tapi sudah terhasut," ujarnya.

Menurut Hendrawan, setelah ditandatangani Presiden, tugas pemerintah adalah menyosialisasikan UU Ciptaker secara masif. Sehingga UU tersebut bisa diterima masyarakat dan tidak ada publik yang termakan hoaks.

Menurut Hendrawan, jika ada masyarakat yang tidak puas dengan UU tersebut maka bisa melakukan uji materi atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kalau ada yang tidak setuju atau menolak norma-norma itu maka bisa diajukan *judicial review* ke MK. Jadi MK yang akan menentukan *judicial review* yang diajukan itu bisa diterima atau tidak," ucapnya.



Kekeliruan Teknis

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku adanya kekeliruan teknis pada naskah UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/11).

Dijelaskan Pratikno, setelah pemerintah menerima berkas Rancangan UU Ciptaker dari DPR pada 14 Oktober lalu, Kementerian Sekretariat Negara langsung melakukan *review* terhadap draf final tersebut. Dari hasil *review* tersebut, pihaknya menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis.

"Setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan *review* dan menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis," kata Pratikno ketika dihubungi wartawan, Selasa (3/11).

Setelah melakukan perbaikan, lanjut Pratikno, Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) menyampaikan perbaikan tersebut kepada Sekjen DPR. "Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya," ujar Pratikno.

Kemudian, setelah UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi, tambah Pratikno, pihaknya kembali menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Namun Pratikno menjamin, kekeliruan teknis penulisan tersebut hanya bersifat teknis, sehingga tidak mempengaruhi penerapan UU Cipta Kerja yang mulai diberlakukan sejak kemarin.

"Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," tegas Pratikno. [LEN/F-5/Y-7]

Rapat Koordinasi Nasional FKUB

Jokowi: Rawat Kerukunan Umat Beragama di Tengah Kemajemukan Bangsa

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat merawat kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan Bangsa.

Menurut Jokowi, kebinekaan dalam masyarakat Indonesia merupakan anugerah dari Allah Swt yang harus terus dijaga dan dipertahankan sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Di tengah dinamika sosial dan politik global, kemajemukan bangsa, termasuk keberagaman agama, tak menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk tetap hidup rukun, saling mengayomi, dan saling melindungi sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

"Kerukunan antarumat beragama tidak muncul secara tiba-tiba. Kerukunan itu merupakan hasil dari kesadaran bersama bahwa perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran," kata Jokowi saat menyampaikan amanatnya dalam Rapat Koordinasi Nasional FKUB yang disiarkan secara virtual, Selasa (3/11).

Jokowi mengungkapkan kerukunan yang telah lama terbentuk tersebut merupakan hasil ikhtiar bersama untuk hidup saling menghormati. Dengan tidak memberi ruang bagi tumbuhnya rasa saling curiga dan berkembangnya benih-benih permusuhan yang pada akhirnya dapat memecah belah persatuan dan persaudaraan bangsa.



SETPRES

Joko Widodo

Apresiasi

Atas dasar hal itu, Kepala Negara menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para penggerak dan aktivis kerukunan umat beragama yang dalam kesehariannya tak lelah untuk merawat kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat. Upaya-upaya serupa itulah yang menyebabkan kita dapat menikmati kehidupan berbangsa yang kondusif dan harmonis.

"Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan miniatur kebinekaan Indonesia. Saya berharap tidak ada satupun yang ditinggalkan ataupun dipinggirkan. FKUB hendaknya menjadi tenda bangsa yang mengayomi semua umat beragama dari beragam kelompok. Komitmen ini harus tertanam kuat dalam kesadaran para tokoh dan aktivis FKUB di semua tingkatan," terang Jokowi.

Pemerintah sendiri, lanjut Jokowi, memberikan dukungan penuh agar peran-peran FKUB dapat semakin optimal dalam menyemai nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan pilihan tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah adanya gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia.

"Tantangan kehidupan beragama kian hari kian berat. Kehadiran media sosial dalam mewarnai kehidupan beragama dewasa ini tidak bisa diabaikan. Tidak jarang media sosial membawa racun seperti *hoax* dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan," jelas Jokowi.

Untuk itu dibutuhkan figur dan tokoh-tokoh agama yang mempersatukan, merangkul, serta piawai melunakkan perbedaan pilihan dan paham menjadi kekuatan sehingga umat tidak terjebak pada pandangan-pandangan yang ekstrem dan melegalkan kekerasan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengharapkan pertemuan penting FKUB tersebut dapat melahirkan rumusan-rumusan visioner dan rencana-rencana program strategis untuk meneguhkan nilai-nilai moderasi dan toleransi beragama serta menjadi ajang dialog atas berbagai permasalahan yang masih mengganjal dan menemukan jalan keluar yang konstruktif bagi kerukunan antarumat beragama di Indonesia. [LEN/W-12]

Webinar Pilkada 2020



BERITASTUPHOTO-DEFRIZAL MOHAMMAD

Atas ke bawah dari kiri ke kanan, Pakar Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM Riris Andono Ahmad, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Pakar Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Mada Sukmajati, Dirjen Informatika dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Widodo Muktiyo, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz, Dekan Fisipol UGM Prof Dr Erwan Agus Purwanto, dan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu, saat Serial Webinar Pilkada 2020 dengan tema Hak Pilih dan Partisipasi Pemilih, Selasa (3/11). "Webinar" kerja sama BSMH dengan Fisipol UGM dan Kominfo ini membahas kemungkinan yang terjadi pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang.

Olly-Steven Unggul Telak di Manado

[MANADO] Tingkat elektabilitas pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey-Steven Kandouw unggul telak dari kandidat lain di Manado, Sulut. Hal itu sesuai hasil survei Charta Politika Indonesia. Charta Politika Indonesia menyelenggarakan survei preferensi politik masyarakat di Manado, menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulut.

Diketahui Pilgub akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Pengumpulan data dilakukan pada 12-17 Oktober 2020 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 600 responden yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kota Manado. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (*multistage random sampling*) dengan *margin of error* ±4% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei ini, Charta Politika Indonesia menemukan beberapa temuan menarik.

"Pasangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw unggul di Kota Manado dengan tingkat keterpilihan 58,7% cukup jauh berada di atas pesaingnya, pasangan Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (16,5%) dan Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Corneles Mamengko Runtuwene (13,7%). Sementara sebanyak (11,2%) responden menyatakan tidak tahu/tidak jawab (*undecided voters*)," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, Selasa (3/11).

Secara lebih terperinci, pasangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw terlihat unggul di kecamatan Bunaken, Malalayang, Manget, Sario, Tikala, Wanea dan Wenang. Sementara Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar terlihat mengimbangi di kecamatan Bunaken Kepulauan dan Singkil. "Sedangkan Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Corneles Mamengko Runtuwene mengimbangi Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar di kecamatan Paal Dua dan Tuminting," ujar Yunarto.

Dukungan Tertinggi

Olly Dondokambey-Steven Kandouw unggul mendominasi pemilih laki-laki dan perempuan di Kota Manado. Sementara Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar dan Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Corneles Mamengko Runtuwene cukup bersaing pada pemilih laki-laki dan perempuan.

Dari segi usia, pasangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw juga mengungguli Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar dan Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Corneles Mamengko Runtuwene, dengan dukungan tertinggi dari pemilih usia 17-20 tahun dan pemilih usia 36-50 tahun. [C-6]

Presiden Akan Anugerahkan Gatot Nurmantyo Bintang Mahaputera



ISTIMEWA

Mahfud MD

[JAKARTA] Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menganugerahkan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo Bintang Mahaputera.

"Tanggal 10 dan 11 November 2020 Presiden akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional (PN) dan Bintang Mahaputera (BM)," kata Mahfud dalam akun *Twitternya @mohmahfudmd* yang terpantau di Jakarta, Selasa (3/11).

Selain Gatot, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat bakal mendapatkan penghargaan yang sama.

Selain memberikan Bintang Mahaputera kepada Gatot dan Arief, Presiden Jokowi juga akan memberikan gelar pahlawan nasional SM Amin dan Soekanto.

Mahfud menambahkan, semua mantan panglima TNI dan mantan menteri serta pimpinan lembaga negara juga akan mendapatkan Bintang Mahaputera.

"*Ya*, semua mantan panglima dan semua mantan menteri serta Pimpinan Lembaga Negara yang selesai satu periode juga dapat BM. Itu harus diberikan tanpa pandang bulu," tutur Mahfud. [W-12]

Libatkan ASN di Pilkada Bisa Disanksi Pidana



ANTARA

Ratna Dewi Pettalolo

[JAKARTA] Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah menegur 67 kepala daerah karena ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di Pilkada 2020. Data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pelanggaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk nomor dua tertinggi.

Menanggapi kondisi ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun kembali menegaskan bahwa pelibatan ASN di pilkada bisa dipidana.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, sanksi pidana atas pelibatan ASN dalam pilkada oleh calon kepala daerah. Undang-Undang pelibatan ASN mencantumkan sanksi yang tegas dan jelas.

"Apalagi calon petahana jika libatkan ASN, bukan netralitas lagi tetapi melanggar pidana karena melanggar UU," kata Ratna, di Jakarta, Selasa (3/11).

Menurutnya, NTB sebagai salah satu yang tertinggi juga diawasi ketat oleh Bawaslu. Dirinya mengaku sudah melakukan pemetaan di daerah yang memiliki kerawanan tinggi. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pendampingan kasus-kasus yang dianggap cukup berat libatkan calon petahana.

"Memang kalau Bawaslu fokus kepada pengawasan netralitas ASN, jadi sampai hari ini masih ada beberapa kasus yang diproses di daerah terkait netralitas ASN. Karena memang secara jumlah, calon petahana yang ikut di Pilkada kali ini tinggi, ini berpotensi terhadap netralitas ASN," ujarnya.

Bagi ASN yang melanggar netralitas akan diteruskan Bawaslu ke KASN. Selanjutnya, setelah dianggap dokumen cukup, mereka yang melanggar akan langsung ditindak.

Apresiasi Pemprov Jatim

Sementara itu, KASN mengapresiasi Pemprov Jatim atas langkah yang diambil dengan cepat menangani rekomendasi pelanggaran netralitas pegawai negeri/ASN di lingkungan kerja setempat.

"Terima kasih kepada Pemprov Jatim yang telah memroses sanksi bagi ASN yang telah melanggar aturan," ujar Ketua KASN Agus Pramusinto, seperti dikutip Antara, Selasa (3/11).

Ia berharap adanya teguran tersebut bisa menjadi pelajaran bagi ASN-ASN lain agar tidak melakukan hal sama. [Y-7/W12]

Indonesia Berpotensi Jadi Pusat Ekonomi Maritim

[JAKARTA] Budaya maritim merupakan bagian dari pertahanan maritim yang bersifat nirmiliter. Kesadaran akan kebesaran sejarah dan budaya maritim Indonesia sangat penting sebagai landasan kebijakan strategi pertahanan maritim Indonesia.



ISTIMEWA

Susaningtyas NH Kertopati

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati menilai, Geostrategis Indonesia dalam jalur perdagangan internasional berada di antara benua Australia dan Asia serta di antara Samudera Hindia dan pasifik menempatkan Indonesia memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional.

"Sebagai negara maritim, Indonesia berpotensi sebagai pintu gerbang dan pusat aktivitas ekonomi maritim serta penyangga maritim di kawasan," kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu, dalam Seminar Maritim Seskoal Tahun 2020 "Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui KKI dengan SPMI", di Jakarta, Selasa (3/11.

Namun demikian, diingatkan Nuning, selain memiliki potensi besar menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi maritim, wilayah perairan Indonesia juga dapat menjadi ancaman terbesar bagi bangsa.

"Hal ini juga menjadikan Indonesia rentan terhadap ancaman keamanan yang dapat menyebabkan instabilitas di kawasan," ucap Nuning.

Dijelaskan, saat ini ada agresivitas Tiongkok yang memiliki kekuatan besar ekonomi dan militer untuk menguasai jalur perdagangan Indopasifik dengan membangun beberapa pelabuhan di negara partisipan. Semua dilakukan untuk kepentingan strategis Tiongkok yang tentunya dapat membawa ancaman di kawasan.

Di sisi lain, Amerika Serikat bersama dengan Jepang, India dan Australia juga telah membentuk suatu aliansi strategis untuk memperkuat konsep *free and open* Indopasifik. Secara tidak langsung, upaya tersebut juga untuk melaksanakan fungsi menahan pengaruh Tiongkok di kawasan.

"Belakangan aliansi tersebut juga mulai menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN," ujar Nuning.

Saat ini perubahan postur pertahanan global juga telah memunculkan adanya ancaman siber, termasuk kejahatan siber, perebutan data personal untuk kepentingan bisnis dan pertahanan untuk mendeteksi pola mobilitas penduduk dan kompetisi nubika.

Karena itu peran dan fungsi TNI AL dalam menjaga kedaulatan laut yuridiksi nasional dan stabilitas keamanan maritim harus menjadi konsentrasi utama dalam berbagai operasi militer, baik unilateral, bilateral, ataupun multilateral.

"Untuk itu, kualitas operasi militer harus lebih efektif dan efisien dalam mengantisipasi dinamika lingkungan strategis dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola dan jenis gelar operasi militer," ujarnya.

Secara khusus, kemampuan diplomasi dan kerjasama antar Angkatan Laut negara-negara Asean juga sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjaga sentralitas ASEAN.

Dijelaskan Nuning, ada enam elemen kekuatan laut yang harus dimiliki jika ingin mewujudkan kekuatan poros maritim dunia. Di antaranya yaitu posisi geografis, bentuk fisik, luasnya, wilayah, jumlah populasi, karakter pemerintah dan karakter bangsa.

"Indonesia sudah memenuhi lima elemen, dan tinggal elemen bangsa yang harus dikembalikan sebagai bangsa maritim," kata Nuning.

Saat ini bangsa Indonesia harus menyadari bahwa bentuk negaranya adalah kepulauan dan jati diri bangsa adalah bangsa maritim. Kebijakan kelautan Indonesia harus memperkuat identitas bangsa sebagai bangsa maritim dan menggunakan identitas bangsa maritim untuk melakukan diplomasi maritim.

Terlebih strategi pertahanan maritim juga menjadi visi dalam poros maritim dunia dan kebijakan kelautan Indonesia. Semua demi upaya pengembangan kekuatan pertahanan maritim guna penegakan kedaulatan negara di laut dan menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia.

Kekuatan Pertahanan

Sementara itu, Asisten Operasi Kasal, Laksda TNI Didik Setiyono mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus ditopang oleh kekuatan pertahanan maritim yang mumpuni dan menjadi salah satu prioritas nasional. Jika tidak, maka akan sulit mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Karena itu perlu adanya strategi pertahanan maritim yang dibangun dan dikembangkan yang dapat sejalan dan mendukung peningkatan budaya maritim untuk mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia dalam rangka mencapai tujuan nasional," katanya.

Dijelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan lima pilar konsep poros maritim dunia. Di antaranya membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut (kedaulatan pangan dan industri perikanan), prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim dan membangun kekuatan pertahanan maritim.

Menurut Didik, saat ini dinamika lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Perubahan dinamika tersebut seperti yang terjadi secara regional dalam konflik Laut China Selatan.

"Diharapkan kita bisa mengimbangi negara kawasan kita. Aspek pembangunan kekuatan pertahanan maritim, tanpa diikuti pembangunan kekuatan yang tepat, strategi ini menjadi konsep yang tidak bisa diterapkan," ujarnya.

Diingatkan Didik, rancangan pembangunan kekuatan pertahanan maritim yang dibuat saat ini menentukan kemampuan pertahanan maritim Indonesia di masa mendatang. Penguatan pertahanan maritim meliputi peningkatan profesionalisme personil, peningkatan platform (alutsista, peralatan lain dan infrastruktur), dan konsep (teknologi, perubahan ancaman, tugas yang dihadapi). [Y-7]

BPOM: Izin Darurat Obat dan Vaksin Tetap Utamakan Keamanan, Khasiat dan Mutu

Badan POM sangat berhati-hati di tengah percepatan ketersediaan obat dan kepastian dalam mendapatkan akses terhadap vaksin.

Hadirnya pandemi saat ini serupa berkibarnya bendera start di arena adu cepat. Naiknya jumlah orang yang terinfeksi berpacu dengan begitu cepatnya. Setiap negara juga harus tancap gas untuk menambah kecepatan, sekaligus bisa menyusul, sampai akhirnya menjadi pemenang dalam adu cepat. Sebagian besar pemerintahan di dunia ini sedang berlomba mendahului laju penularan virus COVID-19.

Vaksin, sebagai salah satu modal penting untuk menyusul laju bertambahnya orang yang terinfeksi, ikut diburu. Lomba di dalam negeri, dibarengi dengan lomba mendapatkan vaksin. Situasi yang membutuhkan kegesitan setiap negara untuk menemukan celah hingga lebih cepat mendapatkan vaksin.

Saat beradu cepat ini, prinsip kehati-hatian serta asas keamanan dan manfaat menjadi pilar utama yang dipegang teguh oleh pemerintah dalam menyediakan vaksin untuk rakyat. Proses pembuatan vaksin itu berjenjang dan berlapis demi mencapai standar keamanan dan keampuhan yang mumpuni. Dalam kondisi tertentu yang sangat genting, vaksin bisa digunakan dengan dasar Persetujuan Pengunaan Darurat (*Emergency Use Authorization*/ EUA).

Persetujuan Pengunaan Darurat adalah suatu mekanisme registrasi khusus untuk obat dan vaksin pada kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19 saat ini, yang diterbitkan oleh otoritas *regulatory* di bidang obat sebuah negara. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menjadi lembaga yang diamanatkan pemerintah dan undang-undang untuk memastikan keamanan vaksin COVID-19 sebelum diedarkan ke masyarakat, termasuk mengeluarkan EUA.

Direktur Registrasi Obat Badan POM, Dr. Lucia Rizka Andalucia, Apt. M.Pharm. MARS menjelaskan bahwa pada prinsipnya, suatu pendaftaran vaksin maupun obat tidak mensyaratkan harus dilakukan uji klinik di negara tersebut. Badan pengawasan obat suatu negara mempunyai independensi terhadap keputusan pemberian perizinan obat atau vaksin sehingga tidak perlu menunggu uji klinis dari negara mana dia mengambil atau harus menunggu semuanya selesai. Manakala sudah dirasa cukup jumlah subjeknya, dan sudah selesai, uji klinisnya bisa digunakan.

Terhadap obat dan vaksin yang diberikan Persetujuan Pengunaan Darurat , harus didukung bukti keamanan, khasiat dan mutu yang memadai dan dalam penggunaanya harus tetap dalam pemantauan yang ketat. Badan POM secara berkesinambungan melakukan pengawasan proses produksi dan distribusi vaksin dari hulu hingga hilir. Salah satunya adalah dengan melakukan inspeksi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau *Good Manufacture Practice* (GMP) ke fasilitas produksi untuk memastikan mutu produk. Industri farmasi pemegang EUA pun wajib melakukan studi atau uji klinik kelanjutan, pemantauan farmakovigilans dan pelaporan efek samping vaksin serta juga melaporkan realisasi, importasi, produksi, dan distribusi vaksin selama persetujuan penggunaan darurat, kepada Badan POM.

Proses Panjang EUA

Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., PhD, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 mengungkapkan bahwa pengembangan vaksin memiliki lima tahap sebelum memasuki masa produksi secara massal, yaitu penelitian dasar, sebelum dilakukan uji pre-klinis, yang dilanjutkan dengan tiga fase uji klinis.

Setelah lulus fase uji klinis tiga, baru kemudian bisa diajukan untuk persetujuan oleh Badan POM. Di tahap persetujuan, atau paling akhir inilah keputusan EUA bisa diambil atau tidak. Badan POM sangat berhati-hati di tengah percepatan ketersediaan obat dan kepastian dalam mendapatkan akses terhadap vaksin.

Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, pemberian EUA dimungkinkan sesuai dengan Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat terhadap vaksin dan obat untuk penanganan COVID-19. EUA atau persetujuan pengunaan darurat ini diberikan karena semua obat dan vaksin yang akan digunakan dalam penanganan COVID-19 masih dalam pengembangan.

Dengan memahami bahwa pada proses pengembangan vaksin memiliki lima tahap sebelum memasuki masa produksi secara massal, kemudian ada proses persetujuan dari Badan POM, keputusan EUA bukanlah langkah yang tergesa. Karena untuk menyetujui EUA, minimal ada lima tahap yang harus dilalui dan memenuhi aspek terkait keamanan dan manfaat. EUA atau persetujuan pengedaran darurat, khususnya pada vaksin COVID-19, diputuskan dengan kehati-hatian dan telah melewati proses yang baik dan benar, demi memulihkan kesehatan dan membangitkan ekonomi.

Adu cepat bukan berarti asal cepat. Kehati-hatian dan kecermatan menjadi modal penting. Perburuan mendapatkan vaksin adalah kegesitan pemerintah untuk sungguh-sungguh melindungi seluruh warga negara Indonesia. [KPCPEN/KOMINFO]



Korupsi PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru



ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia Ferry Santosa Subrata (kiri) dan Arie Wibowo (kanan) setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (3/11).

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi terkait penjualan dan pemasaran produk PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Ketiga tersangka itu, yakni Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tahun 2007-2014 dan Direktur Produksi PT DI tahun 2014 sampai dengan 2019; Didi Laksamana selaku Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa, dan Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT Selaras Bangun Usaha.

Penetapan ketiga tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus yang sama yang telah menjerat Budi Santoso selaku Dirut PT DI, mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rinaldi Zailani, dan Direktur Utama PT PAL Indonesia, Budiman Saleh dalam kapasitasnya sebagai Direktur Aerostructure PT DI periode 2007- 2010, Direktur Aircraft Integration PT DI (2010-2012), dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI (2012-2017).

"Dalam proses penyidikan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/11).

Alex, sapaan Alexander Marwata, memaparkan, kasus ini bermula saat Direksi PT DI (Persero) periode 2007-2010 melaksanakan Rapat Dewan Direksi (BOD/Board of Director) pada akhir tahun 2007. Dalam rapat itu dibahas dan disetujui penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada pembeli PT DI (Persero) atau *end user* untuk memperoleh proyek. Rapat itu juga membahas pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait.

"Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada *customer/end user* dilanjutkan oleh direksi periode 2010-2017," kata Alex.

Biaya *Entertainment*

Pada awal 2008, Budi Santoso selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Irzal Rinaldi Zailani selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure dan Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan membahas kebutuhan dana PT DI untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya, termasuk biaya *entertaintment* dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

Menindaklanjuti persetujuan direksi tersebut, para pihak di PT DI melakukan kerja sama dengan tersangka Didi Laksamana serta para pihak di lima perusahaan yakni PT Bumiloka Tegar Perkasa (BTP), PT Angkasa Mitra Karya (AMK), PT Abadi Sentosa Perkasa (ASP), PT Penta Mitra Abadi (PMA), dan PT Niaga Putra Bangsa (NPB)) dan tersangka Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT Selaras Bangun Usaha (SBU) untuk menjadi mitra penjualan.

"Penandatanganan kontrak mitra penjualan sebanyak 52 kontrak selama periode 2008 sampai dengan 2016. Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada *customer/end user,*" papar Alex.

Alex membeberkan, pembayaran dari PT DI kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan. Kemudian sejumlah dana yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI. Dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif dialirkan kepada pejabat PT DI, pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya.

Atas perbuatan para tersangka, keuangan negara menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp 202.196.497.761,42 dan US$ 8.650.945,27 atau sekitar Rp 315 miliar dengan asumsi kurs 1 US$ adalah Rp 14.600. [F-5]

Pilih Lokasi Wisata yang Terapkan 3 M



ISTIMEWA

Ferdiansyah

[JAKARTA] Masyarakat yang hendak berlibur ke tempat wisata diimbau memilih tempat yang menerapkan protokol kesehatan. Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M) pada destinasi wisata.

Masyarakat diminta lebih selektif memilih destinasi wisata yang menerapkan pariwisata berbasis Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE).

"Sertifikasi CHSE ini berfungsi sebagai jaminan wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan," kata Ferdiansyah dalam keterangannya, belum lama ini.

Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat XI yang meliputi Kabupaten Garut, dan Kota Tasikmalaya itu pun mengajak semua pihak terutama para pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem kepariwisataan yang ada di Garut.

"Semua pihak harus ikut membantu mempromosikan objek wisata yang ada di Garut ini. Tidak mungkin beban ini diberikan ke dinas pariwisata setempat saja," paparnya.

"Kita harus bersama-sama dan nanti difasilitasi oleh Kemparekraf yang bisa menyampaikan bagaimana mempromosikan, bentuk, metode atau klasifikasi bagaimana cara menyampaikan promosi," katanya. [W-12]

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa 14 Saksi

[JAKARTA] Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi terkait dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero).

Saksi saksi yang diperiksa atau diminta keterangannya, yaitu saksi untuk Tersangka Korporasi PT OSO Management Investasi, yaitu Suzkanta, selaku Sales Equity PT Binaartha Sekuritas dan Maudy Mangke selaku *nominee* terdakwa JHT.

"Sedangkan saksi untuk Tersangka Korporasi PT Millenium Capital Management, yaitu Aryo W Adhikari selaku Direktur PT. Millinium Capital Management dan Edhie Setito Pramono selaku Head of Operation PT Millenium Capital Management," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, di Jakarta, Selasa (3/11).

Kemudian saksi lainnya yang diperiksa untuk tersangka korporasi PT MNC Asset Management yaitu Yong Yulia selaku Direktur Keuangan PT MNC Asset Management, Febriani Shofjan selaku mantan Director PT MNC Asset Management.

Selanjutnya saksi untuk tersangka korporasi PT Corfina Capital, yaitu Agutina selaku Head of Finance PT Corfina capital dan Donny Sudarmono Karyadi selaku Mantan Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya (persero).

Saksi untuk tersangka korporasi PT Pool Advista Asset Management, yaitu Evi Firmansyah selaku Direktur Utama PT Pool Advista Indonesia, Tbk dan Mahendra, Direktur PT Advista Multi Artha.

Saksi untuk tersangka korporasi PT. Jasa Capital Asset Management, yaitu Deny Sjahbani selaku Internal Audit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Rudolffus Pribadi selaku Direktur Utama PT Jasa Capital Asset Management.

Sedangkan saksi untuk Tersangka Pieter Rasiman yaitu Mariane Imelda selaku Executive Asisten PT Endress Hauser (mantan Sekretaris Heru Hidayat PT. Maxima Integra) dan Inggrid Pribadi selaku Direktur Electronic City Indonesia

Sebanyak 14 orang saksi baik sebagai pengurus maupun sebagai karyawan koorporasi atau perusahaan manager investasi, keterangan yang diambil dari saksi dianggap perlu untuk mengungkap sejauh mana peran para saksi dalam menjalankan perusahaannya dan kaitannya dengan jual beli saham dari pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. [Y-7]

LSI: Publik Nilai Korupsi Meningkat



ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, baru-baru ini. Penyidik KPK melimpahkan perkara Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur nonaktif Encek Unguria yang diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2019-2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Samarinda.

[JAKARTA] Sebagian masyarakat menilai tingkat korupsi meningkat selama pandemi Covid-19. Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan sebanyak 39,6% responden menilai korupsi meningkat dalam kurun 2 tahun terakhir.

"Bulan Oktober (2020) itu hampir 40% (39,6%) yang menyatakan tingkat korupsi dalam dua tahun terakhir itu mengalami peningkatan," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam *webinar* "Tren Persepsi Korupsi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19", Selasa (3/11).

Metodologi penelitian yang dilakukan LSI dengan cara menelepon responden demi meminalisir penyebaran Covid-19. Responden yang ditelepon yakni mereka yang pernah diwawancara oleh LSI secara langsung pada Maret 2018 hingga Maret 2020. Terdapat 1.200 responden yang berhasil ditelepon oleh LSI. Adapun metode yang digunakan yakni *random sampling* dengan *margin of error*--MoE 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan pada 13 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2020.

Djayadi mengatakan, berdasarkan survei tersebut, sebanyak 13,8% responden menyatakan tingkat korupsi menurun di masa pandemi. Sementara 31,9% responden menyatakan tak terjadi perubahan dan sebanyak 14,8% responden lainnya tidak berpendapat.

Menurut Djayadi, hasil survei pada masa pandemi menunjukkan orang yang menyatakan korupsi meningkat lebih banyak ketimbang masyarakat yang memiliki persepsi korupsi menurun.

"Itu artinya persepsi korupsinya masih negatif, sama seperti ketika sebelum pandemi," kata Djayadi.

Dalam dua survei sebelumnya, masyarakat yang memiliki persepsi korupsi memiliki tren meningkat juga lebih banyak ketimbang yang menilai korupsi menurun. Pada September 2020 sebanyak 42,1% responden menyebut korupsi meningkat dan 14,8% menurun, sedangkan pada Agustus 2020 terdapat 38,4 responden menilai korupsi meningkat dan 12,3% menurun.

Sementara pada 2018 responden yang percaya tingkat korupsi naik menyentuh angka 56,6% responden. Selanjutnya pada 2017 sejumlah 54% responden yang menyebut meningkat, dan pada 2016 sebanyak 70% responden yang menyebut korupsi meningkat.

"Tapi poin yang bisa kita ambil adalah di masa pandemi ini, berapa pun jumlahnya, orang yang menyatakan korupsi meningkat masih jauh lebih banyak dari yang menyatakan korupsi menurun," kata Djayadi. [F-5]

Tata Kelola Lapas Perlu Dievaluasi

[JAKARTA] Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih menjadi salah satu instrumen penegakan hukum yang disorot masyarakat. Mulai dari maraknya narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lapas, hingga kaburnya narapidana kelas kakap yang baru-baru ini terjadi.

Beberapa kasus yang menyita perhatian adalah pengendalian narkoba pada 29 Mei 2020 lalu. Dimana sabu seberat 66 kg dan 16.000 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam karung beras berhasil digerebek Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengendalinya diketahui merupakan napi Lapas Salemba yang memanfaatkan pengiriman bantuan di tengah pandemi.

Kasus berikutnya yang diungkap BNN adalah penyelundupan 200 kg sabu-sabu yang disembunyikan di dalam jagung. Enam orang pelaku diamankan di sebuah gudang beras di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Pada kasus itu juga, napi yang menjadi pengendali peredaran barang haram tersebut.

Selanjutnya adalah pengungkapan ganja seberat 410 kg yang disimpan di dalam tumpukan pisang. Selain dua orang tersangka yang diamankan, seorang narapidana kembali diketahui mengatur pendistribusian itu.

Terakhir yang cukup menghebohkan adalah kaburnya napi Cai Changpan alias Cai Ji Fan, dari lapas Tangerang. Napi terpidana mati ini pun kabur dengan cara menggali lubang sepanjang 30 meter dan lebar 1,5 meter untuk dapat keluar dari lapas. Cai Changpan kemudian ditemukan tewas gantung diri di dalam hutan.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, berbagai permasalahan yang muncul di dalam Lapas tidak terlepas dari peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

Dengan banyaknya masalah yang muncul di Ditjen PAS, untuk menjawab kepercayaan publik Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly diminta untuk segera mengevaluasi Dirjen PAS.

"Dirjen PAS juga harus diberi peringatan, banyak masalah di lapas, harusnya mengundurkan diri," katanya, di Jakarta, Selasa (3/11).

Dikatakan Trubus, jika tidak ada kemajuan dalam pembenahan di dalam Lapas, maka menteri hukum dan HAM harus segera mencopot pejabat tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

"Jadi harus dicopot supaya tidak terulang kembali, apalagi masalah ini sudah berulang-ulang terjadi dan hanya mengorbankan pegawai-pegawai kecil saja," ungkapnya.

Dirinya mencontohkan, dari kaburnya bandar narkoba, seharusnya menteri bisa menegur dan memerintahkan untuk segera dilakukan pembenahan di dalam. Jika tidak dibenahi, semuanya akan berdampak ke kepercayaan publik.

"Kalau tidak segera ditindak, di lapas lain juga akan ikut seperti itu. Karena mereka yang lepas selain bandar narkoba juga orang yang punya kedudukan," katanya. [Y-7]

Jajak Pendapat...

sambungan dari hal 1

"Teman-teman, saya merasa kita akan berkumpul bersama untuk meraih kemenangan besar besok," kata Biden setelah menjalani 18 bulan kampanye di tengah pandemi Covid-19.

Saat Biden berkampanye bersama Lady Gaga di Pittsburgh, pasangannya calon wapres Kamala Harris, berkampanye di Philadelphia dengan penyanyi John Legend. Biden juga memanfaatkan hari terakhir kampanyenya menuju Ohio yang memiliki 18 suara elektoral.

"Ini saatnya bagi Donald Trump untuk membereskan barangnya dan pulang ke rumah. Mayoritas warga Amerika sudah selesai dengan kekacauan, korupsi, kegagalan, dan tidak bertanggung jawab, ketidakpedulian kepada kehidupan dan kehormatan Amerika," ujar Biden.

Dukungan Pemimpin Agama

Sementara itu, lebih dari 1.600 pemimpin agama di AS telah mempublikasikan dukungannya untuk Joe Biden. Situasi itu mengubah sejarah pemilu 2016 saat 80% evangelis kulit putih memberikan dukungannya kepada Trump.

"Empat tahun lalu, banyak pemilih dari kalangan keagamaan memutuskan untuk melihat ke arah lain dan memberikan kesempatan kepada Trump, tapi setelah menyaksikan kekejaman dan korupsinya, semakin banyak dari mereka yang berpaling dari presiden," ujar direktur eksekutif organisasi kampanye Vote Common Good, Doug Pagitt.

Pada pemilu 2016, lebih dari 80% evangelis kulit putih memilih Trump karena banyak yang memperhatikan janjinya untuk menempatkan konservatif dan pro-kehidupan ke Mahkamah Agung (MA), bahkan melampaui kegelisahan atas perilaku pribadi Trump. Namun, sejumlah survei menunjukkan erosi dukungan terhadap Trump di kalangan evangelis kulit putih.

Kelompok yang menyebut diri sebagai Pro-Kehidupan Evangelis untuk Biden, meskipun tidak setuju dengan pendirian capres Demokrat itu terkait aborsi, menyatakan keyakinan dengan keseimbangan dan kebijakan Joe Biden lebih konsisten dengan etika hidup dari Alkitab dibandingkan Trump. "Untuk itu, kami mendesak kaum evangelis untuk memilih Biden sebagai presiden," katanya.

Biden, seorang Katolik yang sering bersaksi bahwa imannya membantunya bertahan melewati masa-masa menantang, berharap bisa memenangkan para pemilih Katolik yang belum memutuskan pilihannya lewat iklan-iklan di negara bagian penentu.[The Guardian/NY Post/Daily Mail/Al Jazeera/B-1/C-5]

Pilkada Harus Jadi...

sambungan dari hal 1

Erwan mengatakan publik telah mengetahui sejumlah alasan yang membuat pilkada pada 9 Desember 2020 tetap dilaksanakan. Salah satunya yakni tidak ada kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. "Kemudian perlunya jaminan demokrasi kepada masyarakat. Berikutnya kepastian akan adanya *policy maker* yang ada di daerah, yang justru bisa menanggulangi Covid-19 itu sendiri," katanya.

Selanjutnya, Viryan Aziz menyatakan, KPU optimistis target partisipasi pemilih sebesar 77,5% bisa tercapai. Hal itu dengan meyakinkan para pemilih bahwa semua tempat pemungutan suara (TPS) aman dan sehat karena sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dia mengakui banyak kritik dan sikap pesimistis atas target tersebut. Pasalnya pilkada dilakukan di tengah penyebaran virus *corona*.

Viryan mengimbau para pemilih agar tidak takut datang ke TPS. KPU menetapkan 12 perangkat sebagai protokol kesehatan wajib ada di setiap TPS.

Menurutnya, pemilih tidak perlu khawatir berlebihan. Sebab, berkaca pada kegiatan ibadah yang sudah dilaksanakan di tempat ibadah dengan protokol kesehatan, tidak ada laporan munculnya klaster penyebaran Covid-19 dari rumah ibadah.

Dengan demikian, dia yakin pemungutan suara kelak dapat berlangsung dengan aman, mengingat momentum warga datang ke TPS hanya singkat, dan peluang terjadinya kerumunan bisa diantisipasi dengan mengatur kedatangan pemilih.

Untuk itu, dia meminta para paslon agar membanjiri media sosial dengan narasi-narasi positif sehingga pemilih mau datang ke TPS.

Zona Merah Berkurang

Optimisme juga disampaikan Akmal Malik. Menurutnya, zona merah penyebaran Covid-19 berkurang di daerah yang menggelar pilkada. "Data dari Satgas Penanganan Covid-19, ternyata daerah-daerah yang melaksanakan pilkada itu justru zona merahnya berkurang. Ini kami melihat tren positif," katanya

"Ada ikhtiar cukup kuat dari pemda (pemerintah daerah), seluruh komponen yang laksanakan pilkada untuk memerangi Covid-19. Jadi kalau dikatakan tidak ada korelasi antara melaksanakan pilkada dengan pencegahan Covid-19, itu tidak benar. Karena yang penting sekarang adalah ikhtiar. Pilkada bisa menjadi gerbong untuk memerangi Covid-19, ketika semua protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik," sambungnya.

Akmal meminta 738 paslon menjadi agen pengendalian Covid-19. "Kami berharap kiranya minimal para kontestan 738 pasangan calon ini bisa menjadi agen dengan seluruh pengikutnya, simpatisannya, untuk bisa membuat sejarah bahwa dengan sinergisitas, kita bisa memerangi Covid-19," kata Akmal.

Dia menambahkan, dari pemantauan masa kampanye sejak 26 September 2020, tercatat 506 atau 68,7% paslon yang sudah melaksanakan kampanye dengan metode 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Menurut Akmal, pilkada di tengah pandemi sejatinya menjadi kesempatan untuk belajar. "Belum pernah kita laksanakan pilkada di tengah pandemi. Ini tantangan dan ujian bagi demokrasi Indonesia, khususnya demokrasi lokal. Tentunya kita tidak mau kalah dengan kondisi pandemi sekarang," ungkap Akmal.

Hal senada disampaikan Widodo Muktiyo. "Kita berharap para pemimpin daerah ke depan berkualitas dan demokrasi yang terjadi ke depan menjadi lebih bermutu. Tidak demokrasi pragmatis," kata Widodo.

Menurut Widodo, Bawaslu juga bisa memonitor sebaik-baiknya pelaksanaan pilkada. Ditambahkan, para mahasiswa juga dapat menjadi pilar untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia di tengah pandemi.

"Artinya pandemi pada satu sisi menjadi suatu musibah, tetapi mari kita ikuti arahan Presiden. Mari kita 'bajak' pandemi ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Untuk mengubah cara berpikir kita memilih pemimpin ke depan yang lebih baik," kata Widodo.

"Hari-hari ini kita sudah lihat di media televisi, berbagai informasi praktis sederhana. Mudah-mudahan bisa ditangkap seluruh masyarakat. Target kami yaitu bagaimana kita bisa laksanakan pilkada, tetapi pemilihnya tetap sehat atau tidak terpapar Covid-19," ungkapnya.

Protokol Kesehatan Ketat

Sementara itu, Riris Andono Ahmad mengakui, sebagai epidemiolog, dirinya berpendapat pilkada serentak sebaiknya ditunda. Hal ini mengingat berbagai risiko yang dihadapi jika pilkada tetap digelar. "Jika terjadi penularan yang tidak terkendali maka risiko ketidakpercayaan publik semakin besar," katanya.

Namun, karena sudah menjadi ketetapan, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus memiliki argumentasi yang kuat mengenai urgensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, dan wajib setiap tahapan pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Riris mencontohkan, Malaysia dan Vietnam merupakan contoh negara yang mampu mengendalikan laju penyebaran virus *corona*. Namun, setelah pelaksanaan pemilu pada 26 September 2020, penyebaran virus di Malaysia melonjak drastis dari 9.000 kasus menjadi 13.000 kasus. "Meskipun protokol kesehatan diharuskan, problemnya ketika terjadi kerumunan, orang tidak punya rasionalitas untuk melakukan protokol kesehatan," katanya.

Untuk itu, dia mengapresiasi penyelenggara pemilu yang menekankan kampanye pilkada lewat media sosial dan secara virtual. Menurutnya, kampanye tersebut lebih tepat sasaran untuk menjaring pemilih, termasuk pemilih mengambang.

Riris menambahkan, penyelenggara pemilu jangan menggunakan alat pemilu bersama, seperi alat mencoblos. "Memperbanyak TPS itu juga perlu dilakukan sehingga kerumunan lebih kecil. Mengatur jadwal pemilihan secara ketat. Harapannya setiap satuan waktu, intensitas kerumunan bisa dijaga," katanya.

Sedangkan, Mada Sukmajati mengungkapkan, banyak negara yang juga menyelenggarakan pemilu nasional atau lokal saat pandemi. Negara dimaksud di antaranya AS, Jerman, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Mengutip data dari sebuah lembaga riset internasional antara 21 Februari sampai 1 November 2020, Mada menunjukkan bahwa lebih banyak negara yang tetap menggelar pemilu daripada yang menunda.

"Ada 73 negara dan teritori dalam negara itu yang menunda pemilu nasional atau pemilu lokal, dan ada 80 negara yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi," ungkapnya.

Hal yang harus menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan kontestasi yang adil ketika banyak pemilih mungkin ragu-ragu untuk ke tempat pemungutan suara dan banyak kampanye dibatasi gara-gara pandemi.

Meskipun umumnya tingkat partisipasi pemilih turun karena pandemi, tetapi ada beberapa negara yang mencatat kenaikan jumlah suara masuk dibandingkan sebelumnya.

"Partisipasi pemilu di Korea Selatan mencapai 66%, tertinggi setelah Pemilu 1962 di mana ketika itu Korsel beralih dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Di Selandia Baru naik sekitar 2% tingkat partisipasinya. Selandia Baru dianggap bisa mengelola pandemi," kata Mada.

Partisipasi bukan hanya diukur lewat jumlah pemilih pada hari-H, tetapi juga keterlibatan masyarakat di setiap tahapan pemilihan. Mada mencatat bahwa kelompok milenial masih jarang dilibatkan dalam tim penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai ke TPS, padahal jumlah pemilih terdaftar dari kelompok ini sangat besar.

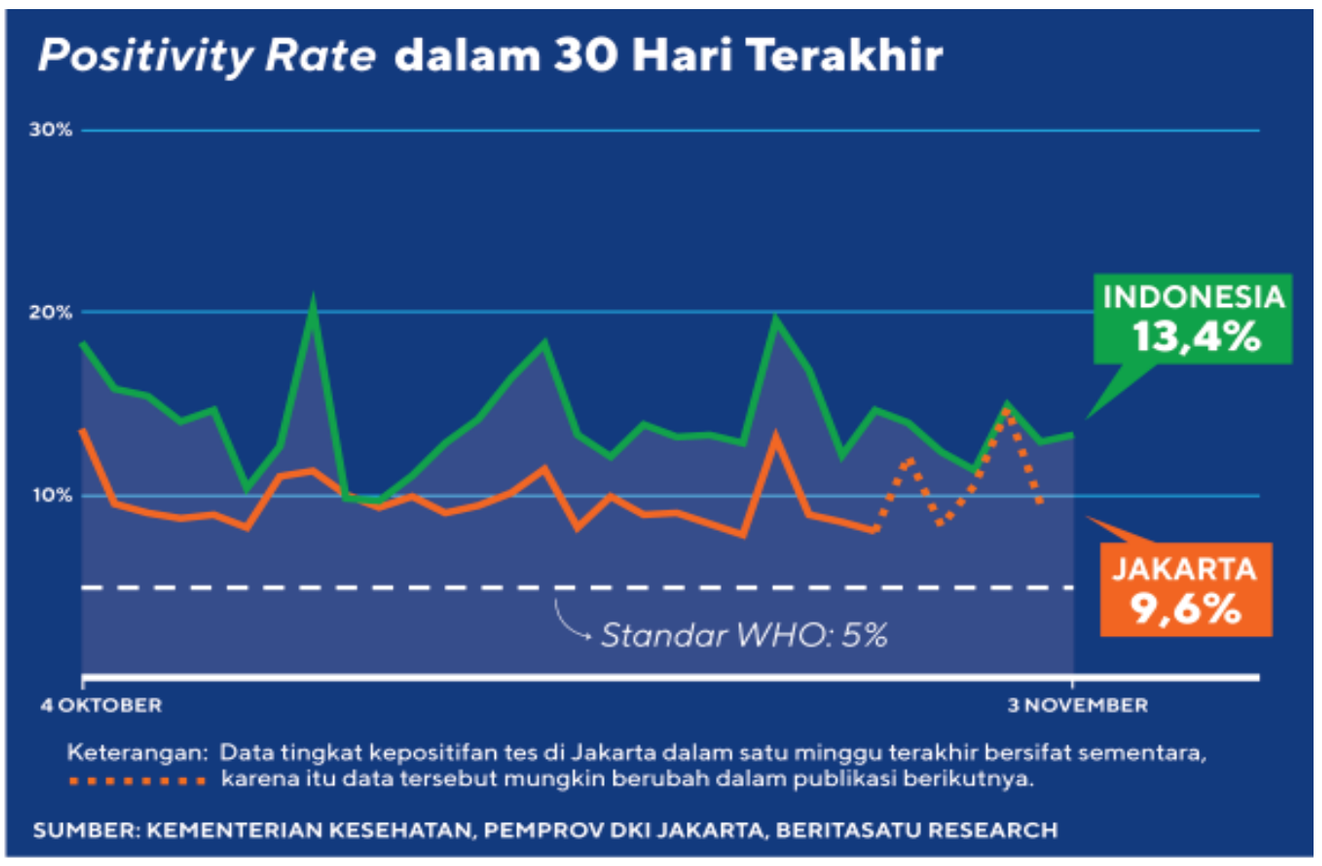
Sementara, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, ada tiga indikator pelaksanaan Pilkada 2020 dikatakan sukses. *Pertama,* seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan sukses. "Sejauh ini seluruh tahapan berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

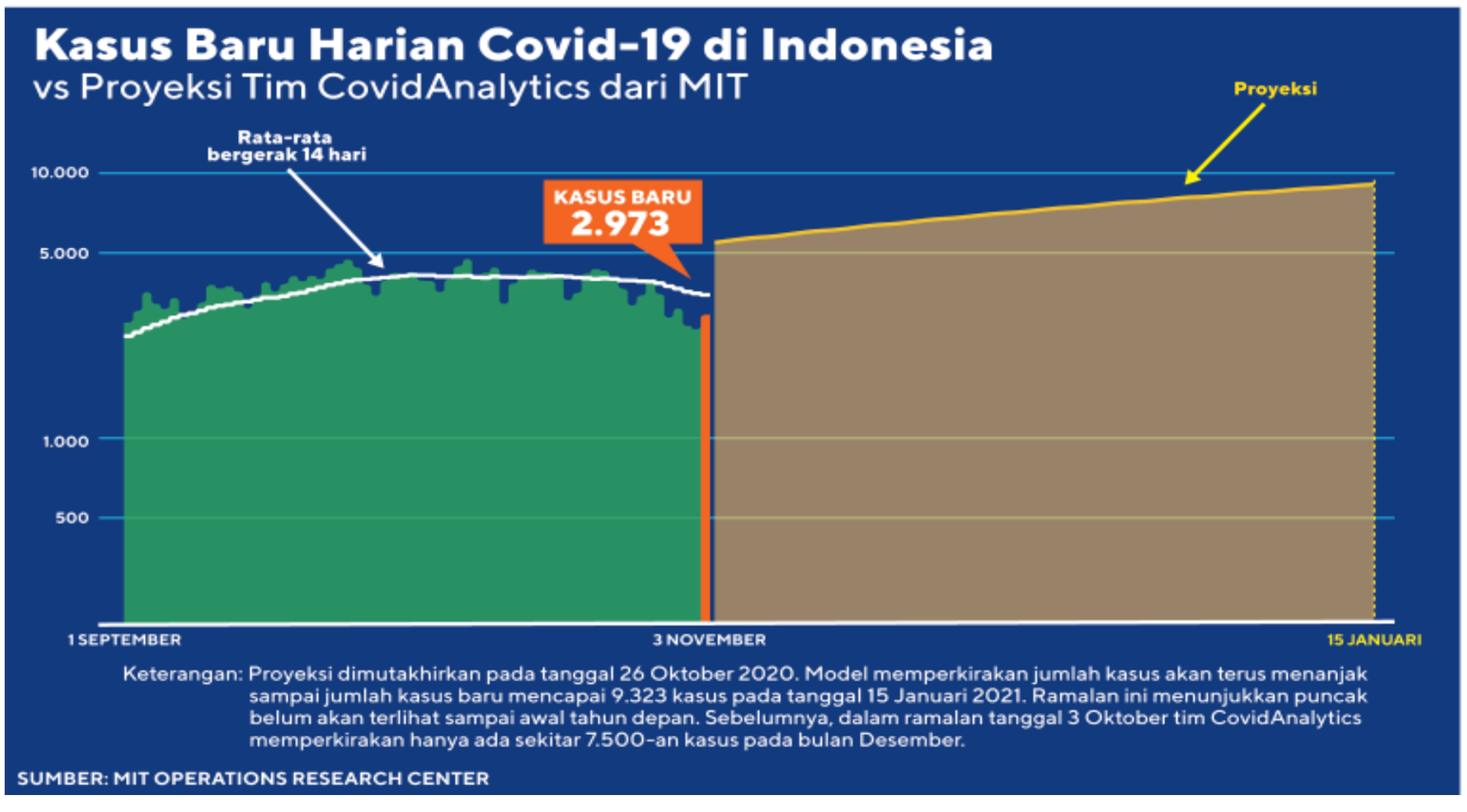
Kedua, lanjut Doli, tingginya partisipasi pemilih pada pilkada. KPU telah tetapkan target 77,5 persen. Target ini cukup realistis karena mengacu pada pengalaman Pemilu Serentak 2019, yang partisipasi pemilih mencapai 83 persen.

Ketiga, pilkada berjalan selamat dan sehat. Kondisi ini ditujukan kepada para pemilih, penyelenggara, paslon dan seluruh komponen masyarakat. "Jika semua selamat dan sehat maka Pilkada 2020 menjadi transformasi pola baru kehidupan masyarakat yang beradaptasi dengan Covid 19," ujarnya.
[MJS/C-6/R-14/B-1/F-5]

Covid-19 dalam Grafik







Jumlah Kematian Covid-19 s/d 3 November 2020

3	November	102
2	November	101
1	November	74
31	Oktober	87
30	Oktober	81
29	Oktober	89
28	Oktober	100
27	Oktober	101

TOTAL KEMATIAN
14.146

TOTAL SEMBUH
349.497

SP

Memihak Kebenaran

Pemimpin Umum: Sinyo H Sarundajang (Nonaktif)

Wakil Pemimpin Umum: Randolph Latumahina

Direktur Pemberitaan: Primus Dorimulu

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: ME Aditya Laksmana Yudha

Editor at Large: John Riady

Tajuk Rencana

Tantangan Pilkada

Pemerintah telah memutuskan untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 270 daerah telah menetapkan para calon kepala daerah beserta wakilnya sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

Lazimnya sebuah pesta demokrasi, kampanye untuk merebut hati rakyat tetap digelar di tengah pandemi Covid-19. Tentu saja pelaksanaan kampanye wajib mengindahkan protokol kesehatan, meski di sana-sini masih terjadi sejumlah pelanggaran.

Setidaknya ada dua isu penting yang mengemuka terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Pertama, kekhawatiran terhadap munculnya klaster baru Covid-19 dan kedua, minimnya partisipasi pemilih yang bisa membuat legitimasi pilkada dipertanyakan.

Berdasarkan data dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sampai saat ini tercatat 21 pelanggaran protokol kesehatan dalam masa kampanye. Jumlah tersebut relatif sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah daerah yang melaksanakan pilkada, jumlah peserta sebanyak 736 pasangan calon, serta kampanye yang telah berlangsung selama lebih dari 1 bulan.

Meski demikian, kita tetap tidak boleh memberi toleransi atas pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye yang akan berlangsung hingga 5 Desember. Setiap pelanggaran harus diberi sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya pembubaran kampanye hingga sanksi pidana.

Selain itu, selama lebih dari sebulan kampanye belum ditemukan klaster baru Covid-19 dari ajang kampanye pilkada. Hal ini menunjukkan peserta pilkada, parpol pengusung/pendukung, serta simpatisan, patuh melaksanakan protokol kesehatan, terutama memakai masker dan menjaga jarak.

> **KPU sebagai penyelenggara pilkada juga harus memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tetap mengindahkan protokol kesehatan.**

Ke depan, KPU sebagai penyelenggara pilkada juga harus memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tetap mengindahkan protokol kesehatan. Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta aparat keamanan yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) hendaknya memastikan bahwa para pemilih tidak terindikasi terinfeksi Covid-19 melalui pengukuran suhu tubuh, serta wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan hak suara. Bahkan, apabila pemerintah memiliki anggaran yang cukup, sebelum pemungutan suara, para pemilih diwajibkan menjalani rapid test secara gratis.

Tantangan lainnya dalam Pilkada Serentak 2020 adalah tercapainya target partisipasi pemilih. KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,5%. Dengan jumlah pemilih sekitar 106 juta orang, sekitar 82 juta pemilih diharapkan menggunakan hak suaranya.

Untuk mencapai target tersebut, KPU perlu bekerja ekstrakeras dengan melakukan sosialisasi agar pemilik suara menggunakan haknya dalam pilkada. Selain sosialisasi melalui media massa dan media sosial, KPU juga bisa menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengajak pengikutnya menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan.

KPU tentu saja tak bekerja sendiri karena peserta pilkada dan parpol pengusung/pendukung juga berkepentingan mengerahkan pendukung untuk memenangkan pasangan calonnya. Dengan demikian, target partisipasi pemilih diharapkan bisa tercapai dan hasil pilkada pun mendapatkan legitimasi.

Sesuai pepatah sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui, kehadiran jumlah pemilih sebanyak itu di TPS bisa dimanfaatkan untuk menyosialisasikan protokol kesehatan. Sebelumnya, dalam setiap kampanye, protokol kesehatan juga terus dikumandangkan sehingga diharapkan bisa menjadi gaya hidup masa kini.

Hal lain yang tak kalah penting adalah KPU harus memastikan bahwa para pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena menjalani perawatan akibat terinfeksi Covid-19 atau menjalani isolasi tetap bisa menyalurkan suaranya. Para petugas bisa mendatangi mereka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Meski pilkada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi, prinsip dasar pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, hendaknya tetap ditegakkan. Dengan demikian, Pilkada Serentak 2020 dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas serta selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.

Tulisan opini panjang 900 kata disertai riwayat hidup singkat, foto kopi NPWP, foto diri penulis dikirim ke opini@suarapembaruan.com. Bila setelah dua minggu tidak ada pemberitahuan dari redaksi, penulis berhak mengirim ke media lain.



Diplomasi *E-Commerce* di WTO untuk Indonesia Maju

E-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) merupakan sektor ekonomi yang semakin penting bagi Indonesia. Saat ini, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 54% dari jumlah penduduk. Bahkan, menurut data idEA (Asosiasi e-Commerce Indonesia), sektor *e-commerce* Indonesia tumbuh 500% antara tahun 2015-2019.

Arti penting *e-commerce* semakin terasa pada masa pandemi Covid-19. Hal ini mengingat kemampuan *e-commerce* untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari berbagai bentuk PSBB yang ada. Apa yang diutarakan Bill Gates beberapa tahun lalu, "*If your business is not on the internet, then your business will be out of business*", semakin terasa relevansinya.

Penurunan drastis perekonomian global sebagai dampak pandemi Covid-19 tidak dapat dihindarkan. Namun, aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik membantu menghindari kemerosotan ekonomi yang lebih dalam serta menjaga keberlangsungan bisnis pelaku usaha.

Salah satu pelajaran terpenting bagi Indonesia dan berbagai negara lainnya di masa pandemi ini adalah nilai strategis *e-commerce* sebagai sektor ekonomi masa depan yang penting bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Termasuk dalam hal ini, peran *e-commerce* menjaga keberlangsungan sektor UMKM, yang merupakan 99% dari pelaku usaha Indonesia. Penelitian Sea Insights menemukan bahwa 45% UMKM Indonesia beralih ke *e-commerce* di masa pandemi, dengan rata-rata peningkatan pendapatan 160% dan peningkatan produktivitas 110%.



Febrian A Ruddyard

E-commerce dan WTO

Perkembangan pesat aktivitas transaksi perdagangan elektronik terjadi di hampir seluruh negara. Namun, peningkatan ini tidak berbanding lurus dengan pembentukan tata perdagangan *e-commerce* global. Hingga saat ini, belum terdapat suatu norma atau aturan global yang secara khusus mengatur berbagai aspek internasional PMSE.

Bagi Indonesia, keberadaan tata perdagangan *e-commerce* global sangatlah penting. Adanya norma yang didasarkan pada aturan yang disepakati bersama akan memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar, melainkan juga pelaku yang dapat memanfaatkan peluang yang ada. Di samping itu, mengingat arti penting *e-commerce* bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, Indonesia juga perlu memastikan agar tata kelola *e-commerce* global tidak hanya mengedepankan aspek komersial melainkan juga dimensi pembangunan.

Sebagai satu-satunya organisasi multilateral yang berurusan dengan aturan perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO) menjadi wadah yang diharapkan oleh para anggotanya untuk dapat membentuk aturan global mengenai *e-commerce* tersebut.

Isu *e-commerce* pertama kali dibahas di WTO dalam pertemuan tingkat menteri tahun 1996 di Singapura. Selanjutnya, WTO mengeluarkan Declaration on Global Electronic Commerce pada 1998 di Jenewa. Deklarasi tersebut belum secara khusus menyasar pembentukan norma internasional mengenai *e-commerce*, namun lebih bersifat menelusuri berbagai aturan internasional yang ada.

Walaupun keinginan untuk membentuk tatanan perdagangan elektronik global tetap ada, berbagai perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang membuat kemajuan pembahasannya tidak sepesat perkembangan *e-commerce* itu sendiri. Beberapa isu yang mengemuka di antaranya bea masuk dan data lokalisasi.

Kemajuan yang cukup berarti terjadi pada awal 2019, di mana 76 anggota WTO menyampaikan komitmen untuk memulai suatu proses yang secara khusus membahas pembentukan tatanan e-*commerce* global. Proses ini dikenal sebagai Joint Statement Initiative on E-Commerce (JSI E-Commerce), dan merupakan proses WTO yang bersifat plurilateral (diikuti sebagian anggota WTO yang memiliki kepentingan atas isu yang dibahas).

Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan JSI E-Commerce pada November 2019. Keputusan ini diambil untuk memastikan agar Indonesia terlibat langsung dalam proses pembentukan tatanan *e-commerce* global, sehingga norma internasional yang terbentuk akan mencerminkan kepentingan negara berkembang, khususnya Indonesia.

Ketika diluncurkan pada 2019, proses JSI diawali dengan tahap *exploratory* atau pertukaran pandang antara negara-negara peserta. Pada 2020 ini, proses JSI telah memasuki ranah negosiasi. Saat ini 85 negara anggota WTO telah bergabung dalam proses negosiasi JSI e-Commerce. Diharapkan ke depannya akan semakin banyak negara anggota WTO yang bergabung, sehingga meningkatkan inklusivitas pembahasan.

Diplomasi Indonesia

Dalam diplomasi multilateral, keputusan yang diambil suatu organisasi internasional sangat dipengaruhi oleh *engagement* dan pola perilaku negara -negara anggotanya. Dengan kata lain, keterlibatan aktif sangat diperlukan untuk memastikan agar kepentingan nasional suatu negara tercermin dalam pengambilan keputusan suatu organisasi internasional.

Dalam konteks ini, bergabungnya Indonesia dalam JSI E-Commerce tidak terlepas dari Visi Indonesia 2045, yaitu tercapainya Indonesia sebagai negara maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Keputusan ini juga merupakan perwujudan dari prioritas politik luar negeri Indonesia 2019-2024, yang menekankan penguatan diplomasi ekonomi di berbagai forum.

Karenanya, sejak bergabung pada November 2019, Indonesia terus terlibat aktif, termasuk menyampaikan berbagai proposal pada proses kepentingan nasional yang strategis, khususnya dimensi pembangunan dari *e-commerce*. Secara khusus, Indonesia akan memastikan agar pembentukan norma *e-commerce* global akan tetap memberikan ruang kebijakan atau *policy space* bagi negara anggota, memastikan proses perundingan yang inklusif dan transparan, serta pemberdayaan UMKM dalam rantai nilai global (*global value chains*).

Diplomasi Indonesia di WTO juga ditujukan untuk memastikan keselarasan antara pembentukan norma global dengan kerangka kebijakan *e-commerce* nasional serta berbagai komitmen internasional pada perjanjian-perjanjian perdagangan bilateral dan regional. Sinergi kebijakan di tataran nasional, regional, dan multilateral diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas para pelaku usaha Indonesia dalam memanfaatkan *e-commerce* dan ekonomi digital, termasuk akses pasar internasional.

Di era virtual ini, perdagangan tidak lagi diselenggarakan secara fisik semata melainkan juga secara elektronik. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor ini, mengingat penetrasi internet yang tinggi serta jumlah pelaku usaha dan kelas menengah yang besar.

Keberhasilan memanfaatkan peluang ekonomi digital akan sangat menentukan keberhasilan Indonesia naik ke jenjang pembangunan yang lebih tinggi. Diplomasi multilateral Indonesia akan terus mendukung upaya ini, yang pada gilirannya akan mempercepat perwujudan cita-cita Indonesia Maju.

Penulis adalah Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri

Harian Umum
Suara Pembaruan

Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore SINAR HARAPAN yang terbit pertama 27 April 1961.

Penerbit: PT Media Interaksi Utama
SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1987
Presiden Direktur: Theo L Sambuaga, **Direktur:** Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA
Alamat Redaksi: BeritaSatu Plaza, lantai 11
Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981
BERITA SATU MEDIA HOLDINGS: Chief Executive Officer: Nicky Hogan, **Chief Operating Officer:** Anthony Wonsono,
News Director: Primus Dorimulu, **Finance Director:** Lukman Djaja, **Editor at Large:** John Riady.

Dewan Redaksi: Theo L Sambuaga (Ketua), Markus Parmadi, Sinyo H Sarundajang, Baktinendra Prawiro MSc, Ir Jonathan L Parapak MSc, Didik J Rachbini, Samuel Tahir, **Penasihat Senior:** Samuel Tahir, **Redaktur Pelaksana:** Dwi Argo Santosa, **Asisten Redaktur Pelaksana:** Anselmus Bata, Asni Ovier Dengen Paluin, **Redaktur:** Alexander Madji, Bernadus Wijayaka, Irawati Diah Astuti, Siprianus Edi Hardum, Surya Lesmana, Unggul Wirawan, Willy Masaharu Indracahya, **Asisten Redaktur:** Elvira Anna Siahaan, Carlos KY Paath, Heri S Soba, Jeis Montesori, Jeany A Aipassa, Yuliantino Situmorang, **Staf Redaksi:** Advento Chistian Saudale, Ari Supriyanti Rikin, Bayu Marhaenjati, Carlos KY Paath, Carlos Roy Fajarta, Chairul Fikri, Dina Fitri Anisa, Dina Manafe, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Farouk Arnaz, Gardi Gazarin, Hendro D Situmorang, Herman, Hotman Siregar, Joanito De Saojoao, Lenny Tristia Tambun, Lona Olavia, Maria Fatima Bona, Markus Junianto Sihaloho, Natasia Christy Wahyuni, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Yeremia Sukoyo, Yustinus Paat, Adi Marsiela (Bandung), Fuska Sani Evani (Yogyakarta), I Nyoman Mardika (Denpasar), Laurensius Dami (Serang), Arnold H Sianturi (Medan), John Dafril Lory (Palu), Mikael Niman (Bekasi), Radesman Saragih (Jambi), Robert Isidorus Vanwi (Papua), Stefy Thenu (Semarang), Usmin (Bengkulu), **Kepala Sekretariat Redaksi:** Rully Satriadi, **Koordinator Tata Letak:** Rommy Likumahwa, **Koordinator Grafis:** Antonius Budi Nurcahyo.

Advertising: General Manager: Djemmy Piether, **Senior Manager:** Benediktus Utoro, Arlan Darmawan,
Marcomm & Event Management: General Manager: Sari Oetomo, **Manager:** Herry Wardiyanto, **Event Officer:** Budiman Mulyadi,
Circulation: Amson Nainggolan, **Finance:** Anna Gertruida, **Alamat Iklan:** BeritaSatu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950,
Rekening: Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C.115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.755 (iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi),
Harga Langganan: Rp 75.000/ bulan, Terbit 6 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim.
Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 **Percetakan:** PT Gramedia

http://www.suarapembaruan.com e-mail: koransp@suarapembaruan.com

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri.
Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungan pemberitaan.

Meikarta Raih Rekor MURI Kategori Taman Terluas

[JAKARTA] Meikarta Central Park, ruang terbuka hijau dengan danau buatan serta bermacam jenis tanaman dan satwa, serta arena menarik, kembali meraih Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI), sebagai perusahaan properti dengan taman buatan terluas se-Indonesia.



ISTIMEWA

Advisor Lippo Cikarang Henry Riady (kiri), Chief Marketing Officer Meikarta Lilies Surjono (tengah) dan Senior Operational Manager MURI Triyono saat penyerahan Rekor MURI belum lama ini.

Ini merupakan rekor MURI yang ketiga, setelah sebelumnya menyabet rekor penjualan terbanyak pada 2017 dan *topping off* gedung apartemen terbanyak Juli 2020 lalu.

"Central Park tersaji pemandangan lahan dengan tanaman hijau yang jarang ditemukan di pusat kota di Indonesia. Untuk menyegarkan pikiran, Anda bisa menghirup udara yang sejuk di lahan seluas 105 hektare tersebut," ungkap Chief Marketing Officer (CMO) Meikarta, Lilies Surjono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11).

Selain itu, kata dia, Central Park yang mengusung konsep Kota New York menghadirkan 12 arena menarik dapat dinikmati penghuninya maupun pengunjung, antara lain jogging track, rumah Hobbit, jembatan cinta, taman hewan (*mini zoo*), gembok cinta, carousell, sepeda tandem, lapangan futsal rumput, taman pergola cinta, *container shop* hingga arena bermain anak. Ditambahkan, spot yang paling menarik bagi warga sekitar ialah jembatan penghubung antara taman di sisi Timur dan Barat.

Ketika berkunjung ke Central Park pekan lalu, Putri Indonesia Lingkungan 2019 dan Miss International 2019, Jolene Marie, mengatakan Central Park merupakan satu-satunya taman kota paling luas yang pernah dibuat pengembang di Indonesia, bahkan di Asia.

"Sangat layak mendapatkan rekor MURI, karena ini sesuatu yang amazing ada di tengah kota, sebuah hasil perencanaan yang cerdas, *a verywell plan*," ujar Jolene Marie.

Dia kagum dengan taman yang bersahabat bagi anak-anak dan keluarga. "Keberadaan Central Park ini benar-benar mendukung *green living* dan *healthy lifestyle* bagi semua penghuni apartemen Meikarta. Ini tempat yang kita idam-idamkan di kota besar seperti Jakarta. Ini betul-betul asri, rimbun, *hommy, and family friendly,*" katanya.

Lilies melanjutkan, ada sekitar 96.000 tumbuhan yang telah ditanam di area Meikarta Central Park, upaya penghijauan melibatkan sejumlah warga sekitar dan juga petani lokal.

"Berbagai pohon bertekstur keras seperti randu, beringin, dan pulai juga ditanam di area taman. Selain itu, bunga warna-warni pun turut di tanam agar tidak hanya terlihat hijau, tetapi Meikarta Central Park juga akan menjadi lebih cantik," paparnya.

Pihak MURI mengapresiasi konsep taman terbuka hijau yang sangat luas, dilengkapi dengan danau buatan.

"Dengan adanya taman di tengah kota, maka akan menjadikan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan konsep *back to nature*. Hal ini menjadikan Meikarta menjadi sebuah kota baru yang menyuguhkan keasrian dan kenyamanan ruang terbuka hijau yang sangat luas bagi penghuninya," perwakilan dari MURI, Triyono.

Di dalam Central Park terdapat danau seluas 50 hektare dengan daya tampung maksimal 300.000 meter kubik untuk menghindari banjir. Fungsinya sebagai reservoir semakin optimal jika didukung dengan adanya pohon hijau di sekitarnya.

Dari pengalaman sejumlah penghuni dan pengunjung, spot menarik di Central Park Meikarta ini akan lebih indah jika dinikmati pada sore hari saat matahari mulai terbenam. Selain dapat menikmati keindahan danau Meikarta yang cantik, Anda juga akan disuguhkan suasana romantis ketika lampu-lampu taman mulai menyala. [160]

Grand Opening Travertine Estate



INVESTOR DAILY / EMRAL FIRDIANSYAH

Chief Executive Officer (CEO) PT Lippo Cikarang Tbk Rudy Halim (kedua kanan) bersama dengan Chief Customer Officer (CCO) PT Lippo Cikarang Tbk Bobby Benarto Suadi (kiri), Chief Financial Officer (CFO) PT Lippo Cikarang Tbk Tevilyan Yudistira Rusli (kedua dari kiri), Chief Operating Officer (COO) PT Lippo Cikarang Tbk Ju Kian Salim (kanan) meresmikan Grand Opening Travertine Estate yang merupakan persembahan dari Waterfront Estates Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu lalu (1/11).

Asuransi Sinar Mas Luncurkan Jaminan Perluasan Covid-19

[JAKARTA] PT Asuransi Sinar Mas meluncurkan jaminan perluasan Covid-19 produk asuransi perjalanan simas travel. Peluncuran jaminan Covid-19 produk simas *travel* ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini dimana dunia masih dilanda pandemi ini.

Direktur PT Asuransi Sinar Mas Dumasi M M Samosir mengatakan, pandemi ini membuat perjalanan keluar daerah dan keluar negeri dibatasi oleh pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19.

Beberapa negara meniadakan kebijakan nonvisa, serta pembatasan hanya untuk keperluan bisnis atau keperluan yang dinilai mendesak. Bahkan beberapa negara juga mewajibkan syarat adanya tambahan asuransi yang meng*cover* risiko akibat Covid-19.

Produk ini, tambah Dumasi, utamanya menyasar segmen para pekerja yang sudah harus melakukan perjalan dinas. "Target pasarnya adalah pekerja dari multinasional perusahaan yang sudah punya tugas untuk bekerja di luar negeri. Begitu juga yang kunjungan klien ke daerah. Di mana untuk itu harus ada ketentuan bebas Covid. Jadi, harus ada polis asuransi.

Soalnya polis asuransi travel dan kesehatan yang kami punya tidak ada menjamin Covid. Untuk itu, kami ajukan izin produk ini ke OJK supaya ada tambahan produk untuk *cover* Covid-19," ujarnya dalam peluncuran Jaminan Perluasan Covid – 19 Produk Simas Travel, Selasa (3/11).

Simas Travel, jelas Dumasi merupakan produk asuransi perjalanan Asuransi Sinar Mas yang memberikan perlindungan saat melakukan perjalanan, baik perjalanan bisnis maupun perjalanan wisata. Terdapat dua jenis asuransi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan yaitu simas *travel overseas*, simas *travel domestic*.

"Jaminan perluasan Covid-19 akan menjamin biaya perawatan medis akibat Covid-19 selama dalam perjalanan. Dengan adanya jaminan tambahan ini kami berharap dapat menjawab kebutuhan nasabah khususnya untuk mereka yang diharuskan melakukan perjalanan ke negara yang mensyaratkan adanya jaminan asuransi yang meng-*cover* risiko akibat Covid-19," pungkasnya.

Di mana, premi individu untuk keberangkatan luar negeri dikenakan biaya US$ 7,5 dengan periode perjalanan 1-4 hari atau U$ 14 per keluarga (suami, istri, dan dua anak). Sementara, untuk perjalanan domestik dengan periode perjalanan 1-8 hari dikenakan premi Rp 55.000.

Bisnis *travel insurance* kecil kontribusinya hanya di bawah 2%, tetapi rasio *profitability*-nya tinggi. Dari premi kita Rp 11 triliun, kalau *travel insurance* paling hanya Rp 6,6 miliar. Kita buat produk ini untuk menjawab kebutuhan karena banyak yang memintanya di website karena para pekerja sudah harus dinas kembali," kata Dumasi. [O-2]



ISTIMEWA

Direktur PT Asuransi Sinar Mas Dumasi M M Samosir berfoto saat peluncuran Jaminan Perluasan Covid-19 Produk Simas Travel, Selasa (3/11).

Pemegang Polis Wanaartha Life Ajukan *Class Action*

[JAKARTA] Nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) terus mencari keadilan setelah rekening efek Wanaartha Life dibekukan. Beberapa nasabah sudah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi gagal dikabulkan karena proses hukum sudah berjalan. Sehingga, nasabah mengajukan upaya *class action.*

"Kami dari pemegang polis juga akan mengajukan keberatan melalui *class action* yang sudah diajukan. Kami juga akan mengajukan surat keberatan juga. Kami pemegang polis juga masih membahas akan mengajukan melalui kelompok di pemegang polis maupun pribadi-pribadi, ini sedang kami bicarakan mekanismenya seperti apa," ujar salah satu nasabah Wanaartha Wahjudi, Selasa (3/11).

Wahjudi menjelaskan, sidang ketiga kasus *class action* digelar pada 30 November 2020. Namun, diprediksinya sidang ke empat akan berlangsung pada 2021. *Class action* menurutnya dilakukan agar uang nasabah bisa kembali. Para pemegang polis juga sudah lapor ke Komisi Yudisial untuk minta perlindungan hukum dan mengawal persidangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Seperti diketahui, kejaksaan membekukan Rekening Efek Wana Artha dengan tudingan terkait kasus Jiwasraya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan belum bisa memberikan informasi lanjutan terkait dengan nasib nasabah atau pemegang polis Wanaartha Life mengingat pembahasan terkait suntikan modal dan proses hukum masih berjalan.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa kali diskusi dengan pemegang saham dan manajemen perusahaan asu- ransi jiwa tersebut. Namun, pemegang saham belum bisa memberikan respons terkait dengan penambahan modal perusahaan.

"Wanaartha sudah beberapa kali diskusi, pemegang saham belum bisa kasih respons gimana tambahkan modal, proses hukum masih berlaku kita masih amati proses yang sedang berjalan," ucap Riswinandi dalam konferensi pers, Selasa (2/11). [O-2]

Inflasi Oktober Belum Cerminkan Daya Beli Sudah Pulih

[JAKARTA] Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengungkapkan, inflasi yang terjadi pada Oktober 2020 sebesar 0,07% belum bisa menggambarkan sudah membaiknya daya beli masyarakat. Inflasi pada Oktober 2020 tersebut dinilainya masih sangat rendah lantaran permintaan yang masih melemah akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Oktober 2020 sebesar 0,07% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,92. Dari 90 kota IHK, 66 kota mengalami inflasi dan 24 kota masih mengalami deflasi. Ini merupakan inflasi pertama setelah sebelumnya selama tiga bulan berturut-turut mengalami deflasi.

"Inflasi ini belum mencerminkan adanya kenaikan daya beli. Kalaupun membaik, tetapi inflasinya masih sangat rendah. Jadi ini belum menggambarkan perubahan permintaan," kata Piter Abdullah kepada *SP,* Senin (2/11).

Piter menyampaikan, akibat pandemi Covid-19, sebagian masyarakat kehilangan daya beli, sebagian lagi menahan konsumsi. Ia melihat inflasi yang terjadi pada Oktober 2020 salah satunya didorong oleh adanya beberapa pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bukan disebabkan oleh membaiknya daya beli masyarakat.

Hingga akhir tahun, Piter juga memprediksi tingkat inflasi masih akan rendah. Prediksinya sama dengan Bank Indonesia (BI) yang memproyeksikan tingkat inflasi hingga akhir 2020 akan tetap rendah, bahkan lebih rendah dari 2% atau di batas bawah sasaran 3% plus minus 1%.

"Saya kira inflasinya akan rendah di kisaran 1% hingga 2%. Apalagi kondisinya masih pandemi di mana permintaan turun, sehingga inflasinya pasti rendah," kata Piter.

Dari data BPS, pada Oktober 2020, inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,04% dengan IHK sebesar 104,43 dan terendah terjadi di DKI Jakarta, Cirebon, Bekasi, dan Jember masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 105,40; 102,50; 106,95; dan 104,65. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 1,81% dengan IHK sebesar 105,12 dan terendah terjadi di Surabaya sebesar 0,02% dengan IHK sebesar 104,03.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Oktober 2020, antara lain: cabai merah, bawang merah, minyak goreng, dan nasi dengan lauk. [HER/E-8]



ISTIMEWA

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah.

Ikut Program Kartu Prakerja, 13% Pengangguran Dapat Pekerjaan

[JAKARTA] Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari memastikan program Kartu Prakerja yang telah dijalankan sudah tepat sasaran. Program yang bersifat semi-bansos ini telah membantu mempertahankan status kebekerjaan pesertanya, serta mengurangi laju pengangguran di tengah pandemi Covid-19.



ISTIMEWA

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam seminar Peran Program Kartu Prakerja dalam Pembangunan SDM di Masa Pandemi, Selasa (3/11).

Denni Puspa memaparkan, per Februari 2020, 41% peserta Kartu Prakerja yang disurvei mengaku tidak bekerja sebelum mengikuti program. Kemudian saat disurvei pada Agustus hingga Oktober 2020, 13% dari peserta yang tidak bekerja tersebut telah berubah statusnya dari menganggur menjadi bekerja. Survei evaluasi I ini melibatkan sekitar 2,4 juta peserta Kartu Prakerja.

"Berdasarkan data Februari, ada sekitar 59% peserta program Kartu Prakerja yang memiliki pekerjaan. Ketika disurvei pada Agustus hingga Oktober 2020, sebanyak 42% peserta yang bekerja berhasil mempertahankan pekerjaannya," papar Denni Puspa dalam seminar Peran Program Kartu Prakerja dalam Pembangunan SDM di Masa Pandemi, Selasa (3/11).

Terkait pemanfaatan insentif Kartu Prakerja, Denni memaparkan sebanyak 96% memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, 75% untuk membayar listrik, dan 63% untuk modal usaha.

Survei evaluasi II juga kembali dilakukan pada 4-31 Oktober 2020 dengan melibatkan sekitar 300.000 peserta. Dari survei tersebut, terlihat bahwa program Kartu Prakerja juga telah mendorong kewirausahaan, di mana 25% dari peserta yang disurvei mengaku telah menjadi wirausaha setelah mengikuti pelatihan Kartu Prakerja.

Status Kepesertaan Dicabut

Hingga 10 gelombang pendaftaran, program Kartu Prakerja telah berhasil mendapatkan lebih dari 5,59 juta peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,2 juta peserta sudah membeli pelatihan, 4,94 juta telah menyelesaikan minimal satu pelatihan, dan 4,9 juta peserta telah menerima insentif. Total insentif yang sudah disalurkan sebanyak Rp 5,7 triliun.

Denni menambahkan, hingga gelombang ke-10, kuota untuk peserta Kartu Prakerja di tahun ini sebetulnya sudah terpenuhi. Namun, ada hampir 400.000 peserta yang statusnya dicabut lantaran tidak memenuhi ketentuan program Kartu Prakerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2020, setiap penerima Kartu Prakerja wajib menggunakan bantuan untuk mengikuti pelatihan pertama dalam waktu 30 hari sejak menerima Kartu Prakerja. Apabila tidak melakukan hal ini, maka kepesertaannya akan dicabut.

"Kami telah membuka pendaftaran gelombang ke-11 untuk menggantikan peserta yang status kepesertaannya dicabut," jelas Denni.

Dalam acara yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin juga menyampaikan, melalui Program Kartu Prakerja, kompetensi para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban PHK diharapkan bisa ditingkatkan pada masa pandemi Covid-19 ini. Tentunya untuk bisa membawa dampak jangka menengah dan panjang.

"Kartu Prakerja pada hakikatnya disiapkan untuk mengurangi gap antara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja," kata Rudy Salahuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja.

Sebagai informasi, Program Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan untuk mengembangkan kompetensi, produktivitas, daya saing dan kewirausahaan angkatan kerja Indonesia. Kartu Prakerja tidak menggunakan kartu fisik, tetapi 16 angka unik seperti dalam kartu kredit, yang saldonya bisa dipakai untuk membayar pelatihan. Sasaran penerima Kartu Prakerja adalah WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah/kuliah.

Untuk merespons dampak pandemi Covid-19, Kartu Prakerja bersifat semi-bansos. Setiap penerima Kartu Prakerja mendapatkan bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pascapelatihan sebesar Rp 2,4 juta.

Insentif tersebut dibayarkan secara bertahap dalam waktu 4 bulan dengan besaran Rp 600.000 setiap bulannya, serta insentif pascasurvei maksimal sebesar Rp 150.000 untuk tiga survei evaluasi. [HER/E-8]

Lini Farmasi Dorong Laba RNI Naik 192%

[JAKARTA] PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI mencatatkan laba bersih Rp 68 miliar pada penutupan kuartal III 2020 atau meningkat 192% dibanding pencapaian tahun lalu di periode yang sama dengan rugi sebesar Rp 73 miliar.

Direktur Keuangan RNI Pramusti Indrascaryo mengatakan, pencatatan laba ini ditopang oleh penjualan yang berasal dari sejumlah lini usaha, di mana kontribusi terbesar berasal dari lini farmasi dan alat kesehatan sebesar 43%, disusul agro industri gula sebesar 39%, perdagangan umum sebesar 16% dan perkebunan sebesar 3%.

Dia mengatakan, kinerja positif ini tidak terlepas dari sejumlah strategi yang dijalankan, diantaranya penerapan *cost leadership*, diferensiasi produk, serta pemberdayaan SDM. Sampai dengan September 2020, tercatat perseroan berhasil menekan biaya usaha hingga sebesar 18% di bawah anggaran dan di bawah realisasi tahun lalu.

"Pengendalian biaya menjadi strategi yang tepat di tengah kondisi pandemi saat ini. Di kuartal ke IV, otomatisasi dan penjualan akan terus ditingkatkan guna mendorong efisiensi biaya," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (3/11).

Strategi lainnya adalah penerapan diferensiasi produk. Menurut Pramusti, perseroan saat ini tengah gencar meningkatkan nilai tambah produk dengan menyasar pasar ritel melalui pengembangan produk baru dan *rebranding* produk eksisting.

"Dengan penerapan strategi yang tepat, diharapkan penjualan dari sektor ritel dapat terus tumbuh pada kuartal ke IV," ucap Pramusti Indrascaryo. [O-2]

Chairul Tanjung Kuasai 73,71% Saham Bank Harda



ISTIMEWA

Chairul Tanjung

[JAKARTA] Pengusaha Chairul Tanjung melalui PT Mega Corpora mengakuisisi perusahaan PT Bank Harda Internasional Tbk dengan menguasai 73,71% atau 3,08 miliar saham bank tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Harda dan PT Hakimputra Perkasa selaku pemegang 3.084.461.000 saham atau 73,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli saham dengan PT Mega Corpora tanggal 16 Oktober 2020.

Pelaksanaan pengambilalihan perseroan akan mengacu pada Peraturan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum, di mana disyaratkan bahwa direksi perseroan dan pihak yang akan mengambil alih akan melaksanakan hal-hal seperti menyiapkan dokumen persiapan pengambilalihan perseroan untuk disampaikan kepada OJK.

Kemudian menyusun rancangan pengambilalihan yang akan diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan, serta melaksanakan RUPSLB yang menyetujui pengambilalihan perseroan. Dari keterbukaan tersebut, perkiraan jumlah saham yang akan diambil alih sebanyak 73,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Harda.

"Adapun, tujuan akuisisi tersebut untuk mendukung kebijakan perbankan di Indonesia dan mengembangkan perseroan untuk menjadi bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi operasional maupun permodalan," tulis keterbukaan informasi Selasa (3/11).

Dalam rencana pengambialihan perseroan, penjual dan pihak yang akan mengambil alih telah menyiapkan dokumen rencana pengambilalihan. Perseroan akan melaksanakan RUPSLB untuk menyetujui pengambilalihan perseroan dan setelah itu mengajukan izin pengambilalihan kepada OJK sebagai pengawas perbankan.

Beberapa persyaratan untuk mempertahankan kondisi perseroan dengan kondisi pada saat penandatanganan. Sesuai dengan perjanjian kondisi yang dilanggar dari kesepakatan akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pengambilalihan.

Dari sisi dampak, rencana pengambilalihan Bank Harda dilakukan melalui pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan kepada pihak yang akan mengambil alih.

"Rencana akuisisi masih dalam proses pelaksanaan persetujuan RUPSLB sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin akuisisi dari OJK. Apabila izin telah diperoleh, maka akuisisi akan dilaksanakan dengan penandatanganan akta pengambilalihan," tulis keterbukaan tersebut. [ID/E-8]

Ketersediaan Listrik



SP/RUHT SEMIONO

Teknisi melakukan perawatan rutin instalasi saluran listrik di Jakarta, Selasa (3/11). PLN terus melakukan pembangunan guna memastikan kebutuhan listrik dapat terpenuhi. Seluruh sistem kelistrikan di Indonesia dalam kondisi cukup, bahkan sebagian besar memiliki cadangan daya lebih dari 30%. Di sisi pembangkit, hingga September 2020, kapasitasnya telah mencapai 63,3 Gigawatt (GW) atau meningkat sekitar 7,8 GW sejak 2015 yang ketika itu baru mencapai 55,52 GW.

Industri Manufaktur Tanah Air Perlahan Bangkit

[JAKARTA] Industri manufaktur Tanah Air perlahan mulai bangkit kembali di tengah tekanan berat akibat dampak pandemi Covid-19. Geliat ini tercermin dari P*urchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur Indonesia bulan Oktober yang menembus level 47,8 atau naik dibanding capaian pada September yang menempati posisi 47,2 sebagaimana dilansir oleh IHS Markit.

"Alhamdulillah, ini berita yang baik. Walaupun terjadi kenaikan tipis, masih menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari para pelaku industri. Semoga menjadi semangat bersama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (3/11).

Agus menilai, peningkatan PMI manufaktur Indonesia pada awal kuartal IV tahun 2020 ini juga sebagai sinyal positif terhadap performa ekonomi yang kian bergairah. "Sektor manufaktur memang cukup terpengaruh oleh penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara penuh di beberapa daerah," ungkapnya.

Oleh karena itu, Agus memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang telah melakukan pelonggaran PSBB di wilayahnya. Selain mampu menunjang aktivitas sektor industri, upaya tersebut menandakan bahwa penyebaran virus *corona* sudah dapat ditekan.

"Kami bertekad menjaga roda perekonomian terus berputar dengan menjamin keberlangsungan operasi dan mobilitas kegiatan industri, namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Melalui Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (Iomki), Kemperin optimistis, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi serta mencegah PHK dalam jumlah yang massif," paparnya.

Agus menambahkan, upaya menaikkan daya beli masyarakat juga menjadi sangat penting karena bisa meningkatkan kepercayaan diri dari para pelaku industri untuk ekspansi. "November dan Desember bisa dijadikan acuan apakah *recovery* benar-benar terjadi," ujarnya.

Menurut Agus, turunnya PMI September ketimbang bulan sebelumnya disebabkan industri yang tadinya melakukan ekspansi menjadi bersikap wait and see dan lebih hati-hati. Hal ini dinilai dapat berpengaruh pada rencana-rencana produksi dan peningkatan utilitasnya.

Kepala Ekonom IHS Markit, Bernard Aw menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 dan ketersediaan vaksin menjadi kunci peningkatan permintaan pada bulan-bulan berikutnya. [E-8]

Rakornas ICCN 2020 Dorong Ekosistem Ekonomi Kreatif Segera Bangkit

[JAKARTA] Indonesia Creative Cities Network (ICCN) kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada tahun ini dengan mengangkat tema "Jenggirat Obah Bareng", atau yang dapat diartikan sebagai "Bergegas Bergerak Bersama". Rakornas ICCN 2020 ini akan diselenggarakan pada 5-7 November 2020, di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Ketua Umum ICCN, Fiki Satari menyampaikan, selain untuk melakukan koordinasi para pengurus serta anggota di seluruh Indonesia secara hybrid, yaitu melalui sistem komunikasi daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan), Rakornas ICCN 2020 juga akan diisi oleh aktivitas diskusi bersama para tokoh representatif dari ekosistem ekonomi kreatif dalam model Pentahelix A-B-C-G-M (Academics - Business - Community - Government – Media).

"Jejaring ICCN yang terdiri dari orang-orang kreatif di seluruh Indonesia selalu terhubung dan siap bahu-membahu untuk saling bantu. Terutama begitu pandemi Covid-19 ini terjadi, ICCN langsung sigap bergerak, sebab banyak sekali pelaku kreatif lokal yang terdampak. Harapannya, Rakornas ICCN 2020 ini juga dapat menghasilkan program-program terintegrasi yang bermanfaat besar, sambil mempererat sinergi dan solidaritas jejaring Kabupaten/Kota Kreatif untuk bantu mendorong ekosistem ekonomi kreatif Indonesia segera bangkit dan lebih maju," tutur Fiki Satari dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (3/11).

Fiki menyampaikan, pada momentum Rakornas 2020 ini akan turut digadiri Gubernur Bangka Belitung, Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Jayapura, Perwakilan Kota Chiang Mai, Thailand, serta komunitas-komunitas kreatif dari berbagai kabupaten/kota seluruh Indonesia, termasuk Batam, Lombok, Sukabumi, Banyuwangi, Numbay, juga tingkat provinsi termasuk Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Barat, serta Sulawesi Tenggara.

Ragam diskusi akan disajikan dengan pembahasan seputar program-program ICCN, hingga cara serta potensi inovasi kreatif dalam proses bertahan hingga bangkit saat pandemi. [HER/E-8]

Jaga Iklim Investasi

BKPM Fasilitasi Perusahaan *Existing* Beroperasi

[JAKARTA] Di tengah kondisi pandemi Covid-19, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mengoptimalkan kinerja investasi, baik itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).



ISTIMEWA

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan dalam acara diskusi yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) secara daring, Selasa (3/11).

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan menyampaikan, ada empat strategi yang dilakukan untuk menjaga iklim investasi pada saat pandemi.

Pertama, memfasilitasi perusahaan *existing* yang sudah beroperasi agar benar-benar segera merealisasikan investasinya, termasuk melakukan penyerapan tenaga kerja Indonesia dan melakukan kegiatan produksi.

"BKPM akan mengawal dia sampai dengan melakukan kegiatan produksi, karena kalau dia belum sampai melakukan kegiatan produksi, belum ada pajak yang bisa ditarik oleh pemerintah," kata Nurul Ichwan dalam acara diskusi yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) secara daring, Selasa (3/11).

Strategi *kedua*, memfasilitasi potensi perusahan *existing* yang belum tereksekusi. Nurul menyampaikan, pada Oktober tahun lalu, ada banyak investasi mangkrak yang totalnya mencapai Rp 708 triliun. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, BKPM ditugaskan agar dapat mengeksekusi adanya investasi mangkrak tersebut, di mana sebagian besarnya disebabkan oleh persoalan lahan, arogansi sektoral, ada aturan yang tumpang-tindih.

"Dari Rp 708 triliun investasi yang mangkrak, yang sudah kita eksekusi hingga saat ini lebih dari separuhnya atau sekitar Rp 409 triliun," kata Nurul.

Strategi *ketiga* adalah mendatangkan investasi baru, dan strategi keempat memberikan insentif bagi perusahaan eksisting yang melakukan ekspansi.

Nurul menambahkan, dalam situasi pandemi Covid-19 ini, BKPM juga memberikan layanan fasilitasi realisasi investasi. Antara lain mengoptimalkan fasilitasi bagi perusahan yang melakukan percepatan pembangunan dan operasional kegiatan usaha melalui penerbitan surat dukungan kepada perusahaan dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

Selanjutnya adalah memberikan rekomendasi bagi kunjungan pimpinan perusahan PMA dalam rangka penjajakan atau relokasi industri dan operasional perusahan untuk mendapatkan izin masuk atau visa kunjungan selama pemberlakuan PSBB. Layanan fasilitasi berikutnya adalah pengawalan realisasi investasi eksisting, serta optimalisasi pelayanan perizinan berusaha.

"Kami juga memberikan rekomendasi visa untuk TKA ahli yang akan masuk dalam rangka realisasi atau pelaksanaan penanaman modal," tambahnya.

Dari data BKPM selama periode Januari-September, realisasi investasi telah mencapai Rp 611,6 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 861.581 orang dari 102.276 proyek investasi. Capaian ini sudah 74,8% dari target realisasi investasi pada 2020 sebesar Rp 817,2 triliun.

Rencana Kegiatan 2021

Untuk tahun depan yang diperkirakan kondisinya masih penuh tekanan akibat pandemi Covid-19, Nurul menyampaikan ada beberapa rencana kegiatan yang juga telah disusun. Antara lain penyusunan peluang investasi di 34 provinsi dalam bentuk yang mendekati *feasibility study*.

"Kita melakukan upaya terkait dengan penyiapan produk-produk yang bisa kita siapkan dalam rangka kegiatan promosi investasi, yaitu penyusunan peluang investasi di 34 provinsi dalam bentuk *feasibility study*. Sehingga dagangannya itu sudah real, tidak hanya menjual tentang angka-angka yang berhubungan dengan jumlah bonus demografi, garis pantai, jumlah pulau, tetapi kita sudah buat dalam bentuk *feasibility study*, per proyek yang ada di tiap-tiap provinsi," terang Nurul.

Selanjutnya adalah menyusun rencana aksi *ease of doing business* 2022. Sebab hal tersebut menjadi indikator yang dipertimbangkan para investor untuk memilih negara mana yang akan mereka pilih untuk melakukan kegiatan investasinya. "Saat ini kita memang baru sampai pada rekening 73, dan targetnya pada 2025 kita ingin pada level 40," kata Nurul.

Ketiga, optimalisasi pengembangan sistem *online single submission* (OSS) berbasis *risk based approach* dalam mengantisipasi implementasi O*mnibus Law*. Kemudian, memfasilitasi relokasi industri dari Tiongkok dan juga dari tempat lain yang masuk ke Indonesia sebagai akibat dari perang dagang.

"Selanjutnya adalah pengembangan kawasan industri yang kompetitif yang bisa bersaing dengan kawasan industri yang ada di Vietnam, Thailand dan tempat-tempat negara pesaing lainnya. Sementara ini kita mengusahakan di kawasan industri Brebes dan Batang yang progresnya kelihatan," kata Nurul. [E-8]

Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 814 M pada Kuartal III

[JAKARTA] PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) sepanjang 9 bulan terakhir pada 2020 telah membukukan laba bersih sebesar Rp 814 miliar, mengalami penurunan 42,6% dibandingkan dengan posisi September 2019 akibat dampak pandemi Covid-19.

Presiden Direktur Adira Finance, Hafid Hadeli, mengatakan, pendapatan bunga yang diperoleh perseroan sebesar Rp 8,5 triliun atau turun sebesar 5,2% dibandingkan periode sama tahun lalu. Sementara itu, beban bunga juga tercatat turun sebesar 4,6% secara tahunan (*year on year*/YOY) menjadi Rp 3,4 triliun.

Sehingga pendapatan bunga bersih Adira Finance sebesar Rp 5,1 triliun, turun 5,6% (YOY) dan margin bunga bersih Adira Finance tercatat sebesar 13,1% di 9M20. Perseroan telah menurunkan biaya beban operasional sebesar 1,1% menjadi Rp 2,7 triliun.

Di samping itu, *cost of credit* mengalami kenaikan sebesar 6,9% (YOY) dan beban lain-lain meningkat akibat adanya biaya kerugian atas restrukturisasi kredit sebesar Rp 385 miliar di kuartal III 2020. "Dengan demikian Adira Finance mencatatkan laba bersih sebesar Rp 814 miliar atau turun sebesar 42,6% dibandingkan periode sama tahun 2019. rasio ROA dan ROE masing-masing tercatat sebesar 3,3% dan 14,3%," kata Hafid dalam konferensi pers virtual, Selasa (3/11).

Hafid menjelaskan, dalam menghadapi tantangan di masa pandemi Covid-19 ini, perseroan telah menyiapkan strategi-strategi utama agar dapat terus melayani konsumen seperti memastikan kegiatan operasional Adira Finance berjalan dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan program restrukturisasi kredit kepada konsumen yang terkena dampak langsung Covid- 19, mendorong program penjualan dengan menetapkan program pemasaran yang menarik bagi konsumen. "Serta menjaga kualitas aset melalui praktik kehatihatian dalam menyalurkan pembiayaan baru dan memperkuat aktivitas collection, serta menjaga likuiditas secara efektif," kata Hafid. [ID/E-8]

Merek Dagang Dihapus, Pemilik Ayam Geprek "Bensu" Surati Presiden

[JAKARTA] PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Yangcent selaku pemegang sah merek dagang "I Am Ayam Geprek Bensu" berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Surat tersebut dibuat dan dikirim melalui kuasa hukum PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Yangcent, Eddie Kusuma, pada Selasa (27/10).

Eddie Kusuma dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11), mengatakan, Kepada Presiden Joko Widodo, ia atas nama kliennya melaporkan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang diduga sengaja dilakukan oleh Freddy Harris, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan cara melakukan penghapusan merek merek terdaftar secara semena-mena atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Yangcent.

Perbuatan Freddy, menurut Eddie Kusuma, dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena merek terdaftar tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum dan hak eksklusif (vide Pasal 1 ayat 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Mereka dan Indikasi Geografis) dan telah diuji keabsahannya melalui Pengadilan Niaga hingga putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tindakan Freddy tersebut, lanjut Eddi dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo, melanggar asas hukum/prinsip hukum "*Res Judicara Pro Veritata Habetur*" dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai pasal 10 dan 18 ayat 3 huruf b, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Ini merupakan preseden buruk hukum di Indonesia yang bertentangan dengan perjuangan Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia terutama yang sedang bersemangat membangun *Omnibus Law* yang memberi kepastian hukum kepada para investor dan masyarakat," tulis Eddie Kusuma dalam suratnya.

Eddie Kusuma meminta Presiden Joko Widodo dapat mengambil tindakan tegas dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan merusak marwah pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. [E-8]

Harga Ikan Kering Naik



ANTARA FOTO/SAIFUL BAHRI

Pekerja menjemur ikan di Desa Polagan, Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (3/11). Dalam sepekan terakhir produksi ikan teri paron dan wilis di daerah itu mulai meningkat antara 0,5 ton hingga 2 ton per hari. Kedua jenis ikan itu kemudian dipasarkan ke daerah Solo dan sekitarnya dengan harga Rp 8.000 per kg untuk ikan wilis kering, dan Rp 65.000 per kg teri paron kering.

Harga Gabah Turun



ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS

Pekerja menata karung berisi padi di salah satu pabrik padi Desa Ujong Tanjong, Kemacatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Selasa (3/11). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 1,56% dan harga beras premium di penggilingan turun 0,59% selama Oktober 2020.

SDGs Desa Hasilkan Desa Tanpa Kemiskinan

[JAKARTA] Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abul Halim Iskandar mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs jadi dasar praktik pembangunan di desa yang diarahkan ke *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.

SGDs Desa, kata Halim, adalah pembangunan total atas desa yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. SDGs Desa ini diyakini berkontribusi 74% atas pencapaian SDGs nasional.

"Kami melokalkan SDGs global ke dalam konteks desa, agar memudahkan kampanye, implementasi di lapangan, dan pengorganisasian dari pusat ke desa. SDGs Desa diimplementasikan mulai 2021 sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Hal ini disampaikan Halim saat menjadi pembicara dalam dialog panel dengan tema "Kolaborasi antar Sektoral untuk Mendukung Kemajuan Digital Menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs)" secara virtual, Senin (2/11). Acara ini diselenggarakan *The International Telecommunication Union* (ITU).

SDGs Desa berturut-turut mencakup tujuan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi.

Tujuan berikutnya ialah desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Berikutnya tujuan desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat. Lalu tujuan desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Untuk membumikan narasi SDGs Desa, konteks desa-desa di Indonesia diwakili oleh SDGs Desa yang ke-18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. SDGs Desa menghargai keberagaman agama, budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia, juga menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang. [E-8]

Unilever Indonesia Pangkas *Capex* Jadi 1% dari Total Penjualan

[JAKARTA] Menyikapi pandemi, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pangkas besaran alokasi belanja modal (*capital expenditure/capex*) pada tahun ini, menjadi hanya 1% dari total penjualan dari biasanya di angka 2%-2,5% sebelum pandemi.

"Investasi *capex* biasanya kami *spent* 2%-2,5% dari penjualan. Namun, dalam kondisi ini batas 1% yang kami tetapkan. Ini diberikan kepada produk yang sangat berkembang pesat dalam kondisi krisis ini," kata Direktur Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk Arif Hudaya dalam paparan publik secara virtual, Selasa (3/11).

Ada pun pada kuartal III 2020, perseroan mencatat peningkatan positif pada penjualan ritel domestik (tanpa UFS) sebesar 1,7%. Pertumbuhan ini didorong peningkatan penjualan produk kesehatan dan kebersihan, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan selama pandemi. Lalu, pertumbuhan penjualan bersih perseroan Rp 32,4 triliun atau tumbuh tipis 0,3%. Pertumbuhan penjualan ini didorong oleh pertumbuhan penjualan domestik 0,8%. Namun, dari segi laba bersih, Unilever Indonesia hanya catatkan perolehan Rp 5,4 triliun atau turun 1,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 5,51 triliun.

Perolehan tersebut diperoleh melalui inovasi produk baru untuk mendorong penjualan dan juga pengetatan biaya operasional. Termasuk kenaikan harga jual 2% yang diberlakukan sejak awal tahun ini. Adapun, pada tahun ini Unilever mengeluarkan 63 produk barunya yang didorong atas kebutuhan masyarakat terkait kebersihan dan kesehatan selama masa pandemi.

"Perseroan optimistis untuk terus bisa membangun bisnis yang konsisten, kompetitif, menguntungkan, serta bertanggung jawab. Sepanjang 2020, perseroan berfokus pada tiga hal yaitu memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan, memastikan keberlangsungan bisnis dan pemenuhan kebutuhan produk untuk konsumen, serta membantu masyarakat luas dalam berbagai upaya mengatasi pandemi Covid-19," kata Arif.

Dalam hal memastikan keberlangsungan bisnis, perseroan jelasnya fokus pada produk-produk inti yang relevan untuk menjawab kebutuhan konsumen saat ini dan meluncurkan serangkaian inovasi termasuk di antaranya Lifebuoy Hand Sanitizer, Wipol Wipes, Wipol Disinfectant Spray, Rinso Laundry Disinfektan, Vixal Bleach Disinfektan, Molto Fabric Spray, Sahaja Hygienic Spray, Bango Bumbu Kuliner Nusantara, Jawara Cabai Tabur, Sariwangi Teh Mawar, Walls Strawberry Cheesecake dan Walls Unicornetto Mini Pack. Selain itu, perseroan juga meluncurkan produk yang disesuaikan dengan daya beli saat ini, seperti misalnya varian Lifebuoy Sabun Mandi Cair kemasan Rp 5.000. [O-2]

Dunia Cemas Menanti Hasil Pilpres AS

[LONDON] Pemerintah di seluruh dunia dengan cemas menyaksikan pertarungan menuju Gedung Putih. Bersiap untuk Donald Trump dari Partai Republik yang mungkin meraih masa jabatan kedua sebagai presiden AS atau untuk kemenangan elektoral oleh penantang Demokrat, mantan wakil presiden Joe Biden. Siapa yang akan menjadi pemenang dan pecundang dari pemilihan umum Amerika Serikat (AS) pada Selasa (2/11)?

"Empat tahun terakhir telah mengonfirmasi bahwa pilihan yang dibuat AS sangat penting bagi politik internasional," menurut komentar kelompok penelitian kebijakan luar negeri terkemuka Inggris, Chatham House.

Menurut Chatham House, presiden AS berikutnya akan menentukan bagaimana sumber daya diplomatik, ekonomi dan militer Amerika diinvestasikan, dan, terutama, nilai apa yang AS akan sertakan pada aliansi dan institusi multilateral yang ada.

"Siapa pun yang duduk di Gedung Putih akan membentuk lintasan Hubungan AS-Tiongkok dan ekonomi global, dengan implikasi signifikan bagi mitra Amerika," kata Chatham House.

Pemenang pilpres AS juga berimplikasi bagi musuh AS, seskipun beberapa orang mengaku bahwa dampaknya mungkin tidak sebesar yang dipikirkan beberapa orang.

Reaksi Tiongkok

Menurut *Asia Times*, seperti dikutip asiamediacentre, Tiongkok punya banyak rencana jika Biden memenangkan pemilu AS. Setidaknya, kepercayaan di Beijing adalah bahwa hubungan AS-Tiongkok tidak akan memburuk di bawah presiden Demokrat.

Asia Times melaporkan bahwa hingga 2020, ibu kota Tiongkok memiliki preferensi tak terucapkan untuk Trump, sampai serangan Tiongkoknya dimulai dengan pandemi. Jika Biden terpilih, Beijing berharap dapat menstabilkan hubungan dan kembali memperkuat mekanisme perdagangan multilateral. Tradisi "hegemon liberal" dalam kebijakan luar negeri Amerika, menurut artikel Asia Times, adalah yang ideal.

Sementara, *South China Morning Post* juga melaporkan bagaimana kawasan Asia akan mendapatkan keuntungan dari kemenangan Biden. Media ini menduga bahwa "Presiden Biden" kembali ke dunia diplomasi dengan keterlibatan aktif dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, KTT Asia Timur dan Forum Regional Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Biden juga akan mengisi kembali korps diplomatik Amerika (saat ini tidak ada Duta Besar AS untuk Jepang atau Singapura).

Beberapa kalangan di Hong Kong percaya "hanya Trump yang bisa memukul Partai Komunis". Di Taiwan, ada sentimen bahwa Trump adalah "satu-satunya kakak yang dapat diandalkan". Di Vietnam, Trump "berani sampai ke titik kecerobohan dan bahkan agresi" dan tindakan ini diperlukan dalam menangani seorang pemimpin di Tiongkok.

Hubungan Rusia-AS

Pakar Rusia mengatakan mereka mengharapkan sedikit perbaikan dalam hubungan antara Moskwa dan Washington, terlepas dari siapa yang menang.

"Putin dan orang-orang di sekitarnya mungkin menyukai Trump karena dia sangat cocok dengan pandangan mereka tentang dunia," menurut Andrey Kortunov dari Dewan Urusan Internasional Rusia, satu kelompok penelitian yang berbasis di Moskwa, saat merujuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kortunov menunjuk pada skeptisisme Trump tentang pentingnya lembaga multilateral dan pendekatannya yang lebih transaksional terhadap diplomasi.

Dia tidak berharap Moskwa mengubah kebijakan luar negerinya dalam beberapa bulan mendatang, terlepas dari siapa yang ada di Gedung Putih. Bagaimanapun antagonisme akan terus berlanjut.

"Para pemimpin Rusia telah lama yakin bahwa setiap langkah sepihak atau perubahan dalam kebijakan luar negeri Moskwa akan dianggap di Barat sebagai tanda kelemahan, dan dengan demikian undangan untuk meningkatkan tekanan pada Rusia. Rusia tidak mundur. Prinsip ini tetap menjadi inti dari kebijakan luar negeri Rusia selama bertahun-tahun," katanya.

Mantan pejabat Rusia selama beberapa bulan terakhir juga mengatakan kepada *VOA* bahwa mereka mengharapkan hubungan tetap antagonis dengan Amerika Serikat dan Eropa. Mereka menyalahkan apa yang mereka lihat sebagai konspirasi pimpinan AS untuk mengekang pengaruh Rusia.

Selain daya tarik pada politik AS, pemerintah asing sering kali memandang pemilu melalui prisma kepentingan strategis mereka.

"Meskipun kepresidenan AS tidak sekuat yang dipikirkan banyak orang, itu pasti, baik di dalam maupun di luar AS, posisi terpilih paling kuat di dunia. Saat ini, dunia sedang memandang AS dengan sangat cemas dan harapan," menurut Cas Mudde, profesor urusan internasional di Universitas Georgia, menulis di surat kabar Inggris *The Guardian*.
[VoA/asiamediacentre/U-5]



AFP

Donald Trump (kiri) berbicara saat rapat umum di Bandara Regional Manchester-Boston, pada 25 Oktober 2020, dan Joe Biden menyampaikan sambutan acara di Cincinnati, Ohio, pada 12 Oktober 2020.



Biden Unggul Tipis di Enam Negara Bagian Penentu

[WASHINGTON] Calon wakil presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Joe Biden, memegang keunggulan tipis atas capres petahana dari Partai Republik, Presiden Donald Trump, di enam negara bagian penentu (*battleground states*) yaitu Arizona, Florida, Michigan, Carolina Utara, Pennsylvania, dan Wisconsin menurut survei CNBC/ Change Research, Senin (2/11).

Keenam negara bagian itu, yang mewakili 101 dari minimal 270 suara elektoral menuju Gedung Putih, berhasil dimenangkan Trump dalam pemilu 2016.

Survei putaran terakhir *CNBC s*ebelum Hari Pemilu, Selasa (3/11) waktu AS, tetap menunjukkan persaingan ketat kedua kandidat untuk sebagian besar suara elektoral. Arizona, Florida, Carolina Utara, dan Pennsylvania akan mengalami pertarungan sengit. Trump memiliki peluang di Michigan dan Wisconsin yaitu dua negara bagian biru (Demokrat) yang berhasil direbutnya pada 2016.

Secara keseluruhan negara bagian, Biden masih memimpin Trump dengan 50%-46%. Pada enam battleground states, Biden juga mencatat keunggulan dengan perincian Arizona (Biden 50%, Trump 47%), Florida (Biden 51%, Trump 48%), Michigan (Biden 51%, Trump 44%), Carolina Utara (Biden 49%, Trump 47%), Pennsylvania (Biden 50%, Trump 46%), dan Wisconsin (Biden 53%, Trump 45%). Di tingkat nasional, Biden memimpin Trump dengan 52% ke 42%.

Jajak pendapat CNBC/ Change Research diikuti 3.328 orang mulai Kamis (29/11) sampai Minggu (2/11) dengan batas kesalahan (*margin of error*) plus atau minus 1,7% poin. Survei tingkat nasional juga digelar dalam periode waktu sama dengan ukuran sampel 1.880 calon pemilih dengan batas kesalahan 2,26% poin.



THE NEWS AND SENTINEL VIA XINHUA /KAREN HARRIGAN

Seorang pemilih (tengah) memberikan suaranya dalam pemilihan presiden AS di Dixville Notch, New Hampshire, Amerika Serikat, Selasa (3/11). Pemungutan suara Hari Pemilihan dimulai di AS pada Selasa pagi dengan surat suara pertama diberikan di timur laut, negara bagian New Hampshire.

Tidak jelas seberapa besar sentimen pemilih akan mengubah pertandingan presiden AS tahun ini, mengingat jumlah pemilih awal sudah mencapai 97 juta orang. Angka itu hampir dua kali lipat dari 50 juta pemilih awal pada 2016 dan mewakili hampir 71% dari total seluruh suara pemilu 2016. Proyek Decision Desk memperkirakan jumlah pemilih awal bisa mendekati 100 juta sampai Selasa.

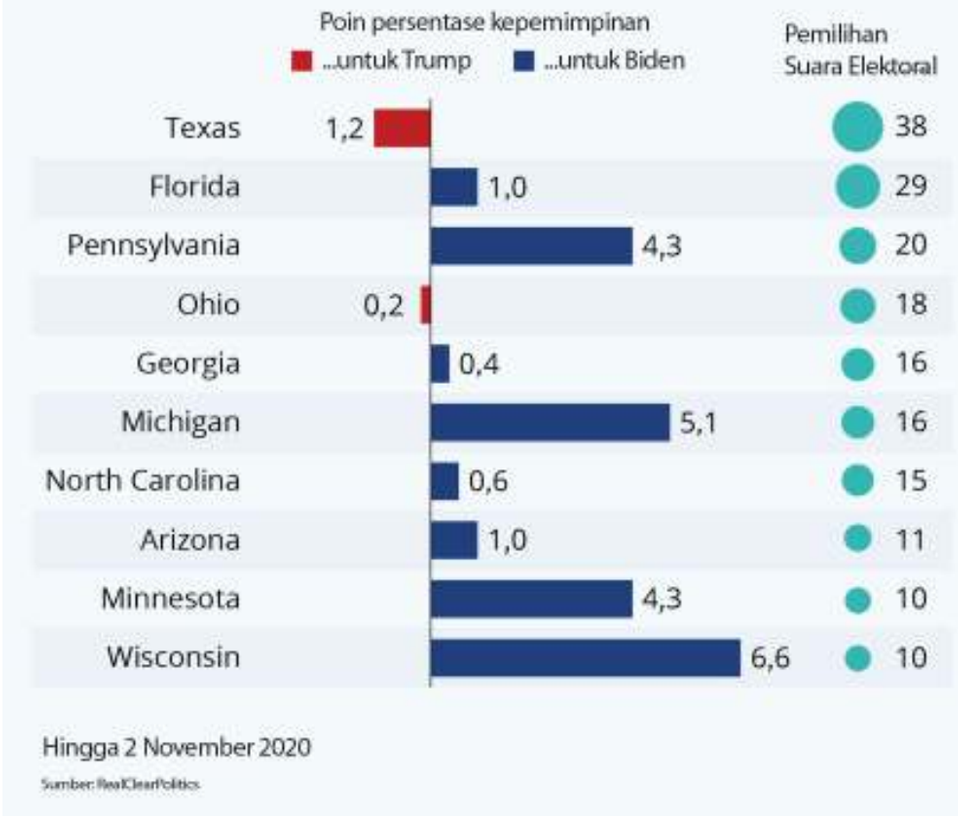
Menurut Proyek Pemilu AS, pemungutan suara awal di tengah pandemi juga melonjak di hampir keenam negara bagian penentu, termasuk Florida dan Carolina Utara telah melampaui 90% jumlah pemilih 2016, sedangkan Arizona melewati 80%, Wisconsin melampaui 60%, dan Michigan melewati 50%.

Dua perubahan besar terjadi sejak September di negara-negara bagian yang dipimpin Trump yaitu Georgia dan Texas dimana dia menikmati rata-rata keunggulan 1,2 poin di Georgia pada 28 September, namun kini Trump hanya unggul 0,8% dari Biden. Di Texas, Trump awalnya memimpin 2,7%, tapi kini turun menjadi 1,1%.

Kejar Biden

Sebaliknya, Trump juga mengejar Biden di Arizona, yang awalnya mencatat keunggulan Biden 3,6% tapi turun menjadi 1,7%. Biden juga kehilangan dukungan besar di Nevada dari 5,9% menjadi 4,2%, sedangkan keunggulannya di Carolina Utara turun 0,6%. Pada Senin, Biden berkampanye di Ohio dimana dia sempat memimpin Trump dengan selisih 2,2% pada 28 September, tapi sekarang hanya berjarak 1% dengan Trump.

Sementara itu, Trump dinilai harus memenangkan Florida yang memiliki 29 suara elektoral, untuk meningkatkan peluangnya terpilih kembali. Florida dianggap sebagai "lemparan koin" antara Trump dan Biden yang juga sempat terjadi dalam pemilu 2000 saat George W Bush mengalahkan Al Gore dengan 537 suara dari hampir 6 juta suara. Penentuan pemenang ketika itu membutuhkan lima minggu dan perintah Mahkamah Agung menghentikan proses penghitungan ulang sebelum Florida menentukan presiden selanjutnya. [CNBC/USA Today/Fox News/AP/C-5]



Warga Amerika Khawatir Situasi Negara yang Memburuk

[NEW YORK] Warga Amerika Serikat (AS) mengalami banyak ketakutan tahun ini yang justru dikenali lewat pidato dan iklan kampanye. Virus melonjak, rumah sakit terisi lagi, anak-anak tidak bisa masuk sekolah, sedangkan dari sisi ekonomi, para penyewa berisiko diusir dan bisnis terhambat.

Namun, saat ditanyakan hal paling mengkhawatirkan pada malam pemilu 3 November, sebagian besar pemilih tidak menyebutkan masalah pribadi seperti keuangan, peluang kerja, atau keamanan. Survei dari The Upshot dan Siena College, dilansir oleh *The New York Times*, Senin (2/11), menyatakan warga AS tidak terlalu mengkhawatirkan diri mereka sendiri, sebaliknya lebih mencemaskan tentang kondisi negara.

Presiden Donald Trump telah memperingatkan kejahatan kekerasan telah meningkat dan bisa mencapai lingkungan terdekat. Dalam masa meresahkan saat ini, orang Amerika bisa kehilangan perawatan kesehatan, pekerjaan, dan nilai properti, bahkan departemen kepolisian setempat.

Alih-alih, warga Amerika justru mencemaskan generasi mendatang mereka akan lebih buruk. Beberapa pemilih, yang mengaku dirinya lebih baik dibandingkan empat tahun lalu, juga menyebut negara secara keseluruhan lebih buruk. Dengan selisih luas, para pemilih kiri dan kanan semuanya merasa khawatir dengan stabilitas demokrasi Amerika.

Temuan ini mencerminkan penelitian lama tentang politik ketakutan, yaitu kecemasan luas tentang masyarakat cenderung mempengaruhi pemilih dan bagaimana mereka memandang pemerintah, lebih dari sekadar kekhawatiran pribadi. Lewat wawancara lanjutan, peserta survei menyampaikan tingkat kekhawatiran tentang negara dan demokrasi Amerika khususnya.

"Saya tidak pernah merasa seperti ini tentang negara kami," kata pemilih Trump di Yamhill, Oregon, Jerry Thatcher (76).

Dia tidak mengenali negara yang disebutnya pecah dalam kerusuhan tahun ini atau para politisi yang diyakininya hanya bertindak sedikit. Dia juga masih dihantui oleh janji-janji kebijakan Demokrat saat pemilihan utama.

"Ini bukan lagi negara yang saya perjuangkan. Mereka berusaha mengubahnya menjadi sosialisme dan saya hanya khawatir mereka akan melakukannya," kata Thatcher.

Pendukung Biden di Avon, Ohio, Diane Haller (50), mengatakan Presiden Trump telah mengancam fondasi negara dengan membengkokkan Departemen Kehakiman demi kepentingan pribadinya.

"Bagaimana demokrasi akan berjalan jika hal itu diizinkan. Kita hanya tertatih-tatih dan menakutkan karena semuanya keluar," kata Haller.

AS pernah mengalami saat krisis dan kecemasan mendalam dalam abad lalu. Pemilu 1920 diikuti perang dunia dan pandemi, serta terjadi saat perselisihan buruh dan kekerasan rasial. Kampanye 1968 juga digelar di tengah kekerasan perkotaan dan protes anti-perang.

"Tapi dalam momen-momen tersebut, negara tidak mempunyai presiden yang dilihat banyak orang bisa memangkas tiang tenda institusi demokrasi," kata Prof David Bennett, sejarawan di Universitas Syracuse.

Sejarawan Universitas Yale, Prof Beverly Gage, mengatakan sentimen Amerika juga telah berubah.
[The New York Times/C-5]

Vaksin Covid-19

Argentina Akan Beli 25 Juta Dosis Sputnik V

[BUENOS AIRES] Argentina dapat memperoleh 25 juta dosis vaksin Covid-19 Rusia "Sputnik V" antara Desember 2020 dan Januari 2021. Hal itu dikonfirmasi Presiden Alberto Fernandez kepada media Rusia, Senin (2/11).

"Mereka akan berada dalam posisi untuk memberi kami 10 juta dari masing-masing dua dosis (wajib). Kami dapat memilikinya di sini pada bulan Desember, dan pada hari-hari pertama Januari kami dapat memiliki, 15 juta lebih dosis," kata Fernandez saat wawancara dengan kantor berita Rusia *Sputnik*.

Menurut Fernandez, pada Desember, Argentina dapat memulai vaksinasi. Satu perkembangan yang digambarkan sebagai sangat penting.

"Pembelian itu akan memungkinkan kami untuk memvaksinasi sektor-sektor yang rentan di Argentina," ujarnya.

Media lokal menyatakan kesepakatan dengan Rusia diselesaikan setelah otoritas Argentina mengunjungi Moskwa. Vaksin Sputnik V sedang dikembangkan oleh Institut Penelitian Gamaleya Moskwa dan dipasarkan oleh Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF).

Argentina mendaftarkan kasus pertama Covid-19 pada 3 Maret, dan telah melaporkan 1.173.533 kasus dengan 31.140 kematian pada Minggu (1/11) malam. Vaksin tersebut, yang dikenal sebagai Sputnik V, diberikan dalam dua dosis dan dapat mulai tiba paling cepat bulan depan.

Dalam rilis, Presiden Alberto Fernandez, harga vaksin Rusia akan "lebih atau kurang rata-rata" dibandingkan dengan vaksin yang lain.

"Kami mendapat proposal dari kementerian luar negeri Rusia dan Dana (Investasi Langsung) Rusia untuk melihat apakah Argentina tertarik memiliki dosis vaksin pada bulan Desember dan tentu saja kami mengiyakan," kata Fernandez. [Xinhua/Reuters/U-5]



AFP/ JUAN MABROMATA

Seorang ilmuwan bekerja di pabrik laboratorium antibodi monoklonal biosimilar mAbxience di Garin, provinsi Buenos Aires, tempat vaksin virus "corona" eksperimental akan diproduksi untuk Amerika Latin, pada 14 Agustus 2020.

Pemimpin UE Kutuk Penembakan di Wina

[BRUSSELS] Presiden Dewan Eropa Charles Michel dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen serta para pemimpin negara -negara Eropa mengutuk serangan penembakan di Wina pada Senin (2/11) malam waktu setempat.



AFP/ JOE KLAMAR

Polisi bersenjata tiba di distrik pertama dekat gedung opera negara di Wina tengah, Austria, Senin (2/11), menyusul penembakan di dekat sinagoga.

"Eropa mengutuk keras tindakan pengecut yang melanggar kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan kita,. Kami mendukung Austria," kata Michel di Twitter.

Von der Leyen mengaku terkejut dan sedih dengan serangan brutal di Wina. "Eropa berdiri dalam solidaritas penuh untuk Austria. Kami lebih kuat dari kebencian dan teror," ujar dia.

Pada Senin malam, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis turut merasakan keterkejutan dan kesedihan rakyat Austria dalam aksi penembakan di Wina. Ia menyatakan, "Kami tidak akan menyerah."

"Setelah Prancis, negara sahabatlah yang diserang. Ini Eropa kami. Musuh kami harus tahu dengan siapa mereka berhadapan. Kami tidak akan menyerah," cuit Macron di Twitter.

Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman memberi pernyataan via Twitter Senin malam. "Bahkan kami belum tahu sejauh mana teror itu, pikiran kami tertuju pada yang terluka dan korban di saat sulit ini. Kami tidak akan memberi tempat pada kebencian yang bertujuan memecah belah masyarakat kami."

Rumah Bersama

Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte juga berkicau di Twitter, "Tidak ada ruang untuk kebencian dan kekerasan di Eropa, rumah kita bersama."

Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio dalam kicauannya mendesak bahwa "Eropa harus bereaksi" terkait "serangan pengecut."

Sejumlah komentar itu muncul setelah terjadinya baku tembak antara penyerang bersenjata dan polisi di pusat kota Wina pada Senin malam, menyusul insiden di dekat sinagoga terbesar di kota itu.

Pejabat Austria menyebutnya sebagai serangan teroris, sementara motif penyerang masih belum jelas. Polisi telah memastikan bahwa "beberapa tersangka bersenjata senapan" telah menembakkan senjata mereka di enam lokasi berbeda, menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai beberapa lainnya. Polisi mengatakan, salah seorang pria bersenjata juga ditembak hingga tewas oleh petugas.

Pada Selasa pagi, polisi melaporkan bahwa tiga orang tewas dalam serangan itu yakni dua pria dan seorang perempuan.

Tindakan Tegas

Kanselir Austria Sebastian Kurz mengutuk "serangan teroris yang mengerikan" di ibukota Austria itu. Ia bersumpah untuk "mengambil tindakan tegas" terhadap para pelakunya.

"Kami saat ini sedang melalui masa-masa sulit di republik kami. Kami tidak akan pernah membiarkan diri kami diintimidasi oleh terorisme dan akan melawan serangan ini dengan tegas dengan segala cara," tulis Kurz di Twitter.

Kurz menambahkan, "Seluruh negeri sedang memikirkan para korban, yang terluka, dan keluarga mereka, kepada merekalah saya menyampaikan belasungkawa mendalam."

Kurz mengumumkan bahwa angkatan bersenjata akan mengambil alih beberapa tugas polisi di kota itu. Tugasnya untuk "mengambil alih perlindungan properti yang sebelumnya dilakukan oleh polisi di Wina."

"Saya ingin berterima kasih kepada semua layanan darurat yang mempertaruhkan nyawa mereka, terutama hari ini untuk keselamatan kami," kata Kurz dalam serangkaian kicauannya pada Senin malam.

Teroris

Polisi Austria mengonfirmasi di Twitter bahwa satu orang tewas dan beberapa lainnya luka parah dalam beberapa penembakan yang terjadi di Wina, Senin malam.

Menteri Dalam Negeri Austria Karl Nehammer telah mengonfirmasi bahwa salah satu pelaku di balik penembakan di Wina adalah "teroris Islam". Setidaknya salah satu kaki tangannya diyakini masih dalam pelarian.
[Xinhua/RT/Y-4]





Perekrutan 8.060 Petugas Lapangan

Pemerintah Masifkan *Tracing*

[JAKARTA] Kementerian Kesehatan (Kemkes) meluncurkan program penguatan *tracing contact* atau pelacakan kontak terhadap kasus konfirmasi Covid-19 di 51 kabupaten/kota di 10 provinsi prioritas. Dengan program itu, ditargetkan lebih 80% kontak erat bisa terdeteksi, sehingga memutus rantai penularan.



ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

Warga menjalani tes usap atau "swab test" di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta, Senin (2/11).

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19, Dr Alexander Ginting mengatakan, program penguatan *tracing* ini ditandai dengan rekrutmen terbuka untuk relawan pelacakan kontak dan manajer data di 51 kabupaten/kota di 10 provinsi prioritas. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, hingga Papua.

"Satgas Covid-19 Bidang Kesehatan dan Kemkes bersinergi untuk meningkatkan jumlah petugas lapangan dengan merekrut *tracers* (pelacak) yang nantinya ditempatkan di 1.612 puskesmas. Target kita adalah 8.060 *tracers* direkrut dan ditempatkan dalam dua bulan ke depan," kata Alexander pada *workshop* aplikasi pelacakan kontak yang diselenggarakan Kemkes secara virtual, Selasa (3/11).

Selain petugas pelacakan kontak, Kemkes juga merekrut dua orang petugas manajer data di tiap 51 kabupaten/kota tersebut. Petugas ini nantinya bertugas membantu dinas kesehatan (dinkes) dalam menyusun analisis epidemiologi.

Mereka juga memberikan rekomendasi kebijakan terhadap pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing maupun secara nasional. Mereka adalah orang-orang yang selama ini sudah terbiasa berkutat dalam kegiatan pengendalian Covid-19 baik di puskesmas maupun dinkes.

"Perlu penambahan beberapa tenaga khususnya dalam mengumpulkan data karena data ini penting sekali. Bukan hanya programnya, tetapi *reporting* dan *recording* yang baik akan menghasilkan hasil kajian yang baik, dan kajian ini akan kita berikan kepada pemerintah dalam rangka proses pengambilan kebijakan," kata Alexander.

Ia mengatakan, melalui program ini, diharapkan kegiatan pelacakan kontak lebih kuat sampai di tingkat kecamatan atau kelurahan dan desa, sehingga gambaran epidemiologi Covid-19 lebih jelas. Tujuannya adalah untuk membatasi penularan dan menurunkan tingkat kefatalan di 10 provinsi, baik di RS rujukan maupun RS lain yang merawat pasien Covid-19.

Menurutnya, para relawan ini adalah garda terdepan dalam melakukan pelacakan kontak. Tanpa mereka, pemerintah tidak akan mendapatkan data yang sebenarnya mengenai penyebaran Covid-19, dan tanpa data tidak bisa dilakukan kajian untuk pengendalian.

Para relawan yang berdomisili di 51 kabupaten/kota tersebut dapat melaporkan diri ke dinkes setempat dan mendaftarkan diri melalui *website* yang sudah disiapkan. Dalam melaksanakan pelacakan, para petugas ini bisa menggunakan aplikasi pelacakan kontak Silacak.Kemkes.go.id. Aplikasi ini merupakan salah satu instrumen agar kegiatan lacak bisa dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi.

"Harapan kita kepada *tracers* sungguh besar sebagai garda terdepan dalam mengumpulkan dan melacak seluruh kontak yang ada. Kita tekankan pada mereka yang konfirmasi positif, kita juga harus melihat mereka yang kontak erat supaya tidak luput dari pengamatan dan kajian," kata Alexander.

Ia menambahkan, dalam menghadapi wabah Covid-19, ada dua hal yang harus dicapai, yaitu membatasi penyebaran dan melakukan berbagai kajian penting yang diberikan kepada pemerintah untuk agar pengelolaan Covid-19 ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ini penting agar pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan.

Positivity Rate

Sementara itu, tingkat kepositifan atau *positivity rate* kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Saat ini, angkanya sebesar 14,2% dari total spesimen yang diperiksa. Angka ini masih jauh dari target dan rekomendasi World Health Organisation (WHO) yakni di bawah 5%. Berhasil atau tidaknya upaya pengendalian Covid-19 di Indonesia terlihat dari tingkat kepositifan ini.

"Berhasil tidaknya pengendalian Covid-10 dilihat dari tingkat kepositifan. Target kita itu di bawah 5%, dan ini tidak bisa dicapai kalau surveilens atau pelacakan kontak tidak berjalan dengan baik," kata Direktur Surveilens dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Vensya Sitohang.

Vensya mengatakan, dalam hal surveilens, yang paling menentukan adalah pelacakan kontak. Oleh karena itu ia meminta para petugas lacak terutama di 10 provinsi prioritas untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan pelacakan kontak. Semua kasus suspek atau kontak erat yang belum dilakukan penyelidikan epidemiologi, testing, karantina, atau terindektifikasi harus segera diselesaikan.

Di masa *new normal* ini menurut Vensya, intervensi harus tetap dilakukan dan tidak bisa ditawar terutama penerapan protokol kesehatan. Selain itu, upaya surveilens dan penemuan kasus yang aktif dan dilanjutkan dengan pemeriksaan *swab* PCR pun harus ditingkatkan. Sedapat mungkin target pemeriksaan 1 kasus per 1.000 penduduk per minggu menurut standar WHO mesti dicapai.

Kemudian hasil *swab* PCR harus dikeluarkan dalam waktu 3x24 jam. Setelah hasil konfirmasi positif keluar, segera lakukan isolasi dengan cepat terhadap kasus suspek atau konfirmasi. Lakukan pelacakan kontak erat dengan kasus konfirmasi positif dan karantina bagi seluruh kontak erat yang ditemukan. Target minimal 80% kasus baru dilakukan pelacakan kontak dan dikarantina dalam waktu 72 jam sejak dikonfirmasi.

"Minimal 80% kontak erat dilakukan pemantauan selama 14 hari sejak paparan terakhir. Pastikan masyarakat untuk sering mencucui tangan, menggunakan masker (dianjurkan tiga lapis) di tempat umum dan tempat kerja, dan jaga jarak minimal 1 meter," kata Vensya.

Hingga Senin (2/11) masih ada 10 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua.

Sementara kasus konfirmasi positif hingga Selasa (3/11), terdapat sebanyak 418.372 kasus, naik 2.973 kasus dari sehari sebelumnya. Kenaikan kasus positif tertinggi dilaporkan pada 8 Oktober sebanyak 4.850 kasus per hari. Menurut Vensya, bila pelacakan kontak dimasifkan atau diperluas maka kemungkinan penambahan kasus positifnya tinggi, tetapi selanjutnya akan terjadi penurunan. [D-13]

Roadmap Vaksinasi Covid-19 dalam Tahap Finalisasi



ANTARA/NYOMAN HENDRA WIBOWO

Tim medis melakukan penanganan terhadap pasien dalam persiapan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali, Senin (5/10).

[JAKARTA] Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) Wiku Adisasmito menyebutkan *roadmap* atau peta jalan pengadaan vaksinasi sudah dalam tahap finalisasi.

"Jadi sudah ada dan *roadmap* sudah dalam tahap finalisasi mencakup," kata Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Selasa (3/11).

Roadmap tersebut mengatur kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin. Penyusunan *roadmap* dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti di antaranya, ketersediaan vaksin, penduduk, wilayah berisiko, tahapan pemakaian, dan indeks pemakaian.

Selain itu, lanjut Wiku, *roadmap* yang disusun mencakup perkiraan skema platform vaksin dan sasaran klaster kelompok, estimasi kebutuhan, dan rencana pemberian vaksin. Bahkan, demi mencapai efektivitas vaksin yang maksimal, maka *roadmap* disusun juga memperhatikan ketersediaan *cold chain* dan kapasitas SDM yang melibatkan beberapa jenis tenaga kesehatan.

"Termasuk vaksinator, jejaring layanan untuk menjamin alur distribusi juga telah disusun dengan melibatkan lintas sektor," ujar Wiku Adisasmito.

Selain hal-hal tersebut, Wiku menjelaskan pemerintah juga mengkaji hal-hal penting lainnya yang tidak boleh terlewat dalam persiapan vaksinasi secara nasional. Tindakan itu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketersediaan serta mekanisme penyuntikan vaksin dengan melibatkan pendapat dari berbagai elemen baik lintas kementerian dan lembaga.

"Kehadiran vaksin adalah angin segar untuk kita semua. Namun hingga vaksin siap, bahkan meski pun vaksin sudah ada dan siap, kita pastikan masyarakat dan pemerintah harus selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan primer," tegas Wiku.

Spesifik

Dalam kesempatan terpisah, dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog, Dirga Sakti Rambe mengungkapkan, vaksin adalah salah satu pencegahan terhadap infeksi yang efektif karena sifatnya mampu melindungi secara spesifik.

Salah satu bukti kesuksesan vaksin adalah musnahnya penyakit *smallpox* (cacar) sejak dekade 1900-an. Padahal, dahulu satu dari tiga penderita penyakit *smallpox* ini meninggal dunia.

Selain itu, dengan vaksin, dunia juga mampu mengeliminasi campak dan polio, termasuk di Indonesia yang hingga saat ini sudah terbebas dari polio. Inilah bukti nyata kesuksesan imunisasi dengan cakupan tinggi.

"Kita harus memahami bahwa saat suatu vaksin itu digunakan secara luas oleh masyarakat, berarti dia sudah mendapatkan izin edar. Di negara kita, izin edar dikeluarkan oleh Badan POM. Artinya, itu sudah melalui serangkaian tahapan yang panjang sekali," terangnya pada acara Dialog Produktif bertema "Vaksin : Intervensi Kesehatan Masyarakat yang Efektif dan Aman", yang diselenggarakan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (3/11).

Dirga pun menjelaskan bahwa proses pembuatan vaksin merupakan proses bioteknologi yang rumit. Pada awalnya, peneliti atau pembuat vaksin menentukan bibit vaksin. Saat sudah mendapatkan kandidat vaksin yang tepat, kemudian bibit tersebut diujikan kepada hewan untuk mengetahui keamanan dan efektivitasnya.

Ketika pada hewan terbukti aman dan efektif, maka barulah bibit vaksin diujicobakan pada manusia yang dikenal sebagai uji klinis Fase I, II, dan III.

"Tujuan dari proses uji klinis ini adalah, memastikan keamanan vaksin yang diuji. Sebab, kalau kita bicara soal vaksin tidak ada tawar menawar tentang keamanan, itu mutlak. Kedua baru kita bicara tentang efektivitas," terangnya.

Menurut Dirga, dalam vaksinasi dikenal konsep *herd community*, sehingga disebut kekebalan kelompok. Bila ada banyak orang yang diimunisasi dalam suatu populasi, orang itu tidak hanya terlindung secara pribadi tetapi juga melindungi orang-orang sekelilingnya. [LEN/DFA/D-10]

Jokowi: Perguruan Tinggi Jangan Terjebak pada Rutinitas

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul, perguruan tinggi diharapkan tidak terjebak pada rutinitas. Ia meminta perguruan tinggi untuk memiliki waktu, energi, dan keberanian untuk melakukan perubahan.

"Harus terus-menerus mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan begitu dapat menciptakan generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju," kata Jokowi saat meluncurkan program Merdeka Belajar Episode 6 tentang Transformasi Dana Pemerintah Untuk Pendidikan Tinggi secara daring, Selasa (3/11).

Oleh karena itu, Jokowi menuturkan, pada situasi pandemi Covid-19 ini upaya perguruan tinggi untuk mencetak SDM Indonesia yang unggul tak boleh surut dan berhenti. Menurut Jokowi, kondisi pandemi dengan segala dampak di setiap sendi kehidupan ini justru menyadarkan semua pihak betapa pentingnya SDM tangguh, yakni orang-orang yang mampu berpikir dan bertindak dengan cara luar biasa. Ini terkait dengan kemampuan beradaptasi cepat agar bisa *survive* menghadapi kesulitan, tidak tertinggal, dan menang dalam persaingan.

"Pandemi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional. Salah satunya perguruan tinggi," kata Jokowi.

Menurutnya, perguruan tinggi perlu merelaksasi kurikulum dari yang sebelumnya bersifat kaku menjadi lebih fleksibel. Perguruan tinggi juga harus membuka diri terhadap paradigma-paradigma baru dan cara-cara yang lebih responsif. Dari mono menjadi multi, mono menjadi inter, bahkan transdisipliner.

"Dari berorientasi *theory building* menjadi *problem solving*, bahkan *impact making*. Kita harus siap menjalani standar normalitas baru," ucapnya.

Memfasilitasi

Jokowi menyebutkan, dosen yang baik adalah dosen yang memfasilitasi mahasiswanya belajar kepada siapa saja, melalui media apa saja, dan dilakukan kapan saja. Sementara, perguruan tinggi yang baik adalah yang membangun ekosistem Merdeka Belajar dan memanfaatkan materi dan media belajar yang terbuka luas.

Jokowi menuturkan, standar normalitas baru tersebut harus dirumuskan dalam berbagai kebijakan, yakni kebijakan tentang *key performance indicators* (KPI) dosen, kebijakan program prioritas perguruan tinggi, serta alokasi anggaran, infrastruktur, hingga berbagai standar operasional prosedur (SOP) baru yang harus dirumuskan.

Demikian pula halnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berbagai standar normalitas baru harus dirumuskan.

"Saat ini awal abad digital, berbagai riset dan pengembangan teknologi di bidang digital seharusnya memprioritaskan bagaimana teknologi, analisis *big data* dan *artificial intelligence* bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang," ujarnya. [FAT/D-10]

Hingga September 2020, Realisasi Perhutanan Sosial Capai 4,2 Juta Ha

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program perhutanan sosial telah dilaksanakan selama 6 tahun. Hingga September 2020 ini, realisasi program perhutanan sosial sudah mencapai 4,2 juta hektare dari target yang ditetapkan 12,7 juta hektare.

"Perhutanan sosial yang telah kita laksanakan dalam enam tahun ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sudah berjalan. Yang pertama, dari target 12,7 juta hektare, untuk capaian perhutanan sosial sampai 2024, sampai September tahun ini tercapai 4,2 juta hektare," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11).



SETPRES

Joko Widodo

Artinya, lanjut Jokowi, masih ada sisa target sebanyak 8,5 hektare lagi yang harus diselesaikan selama empat tahun mendatang. Ia ingin sisa target tersebut segera dapat diselesaikan dalam periode keduanya memimpin Indonesia.

Meski demikian, Jokowi merasa cukup puas karena ada peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam pencapaian target perhutanan sosial selama lima tahun pertama pada periode pertama ia menjabat sebagai Presiden.

"Kta masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk diselesaikan di empat tahun mendatang, kurang lebih 8 juta lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin," terang Jokowi.

Seperti diketahui, program perhutanan sosial diluncurkan sejak 2015 lalu. Program ini diluncurkan karena pemerintah melihat adanya ketidakadilan akses pemanfaatan hutan. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan akses pemanfaatan hutan oleh masyarakat ditingkatkan menjadi 12,7 juta hektare atau sekitar 30% dari jumlah total pemanfaatan hutan sebanyak 42 juta hektare.

Jokowi juga mengingatkan pelaksanaan program perhutanan sosial tidak hanya sebatas pemberian izin kepada masyarakat atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Perlu juga dilakukan pendampingan kepada masyarakat.

Pendampingan masyarakat yang dilakukan adalah program-program lanjutan setelah SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial diterbitkan. Dengan demikian masyarakat sekitar hutan memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur SK yang diberikan.

Kepala Negara memberikan contoh program lanjutan yang bisa diberikan kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya *agroforestry*, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bio energi, serta bisnis hasil hutan bukan kayu. [LEN/D-10]

Satgas Akui Angka Testing Menurun

[JAKARTA] Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) Wiku Adisasmito mengakui jumlah testing nasional menurun terutama pada akhir pekan dan libur panjang. Padahal seperti diketahui, testing adalah salah satu upaya mendeteksi orang yang terpapar.



ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

Warga menjalani tes usap atau "swab test" secara "drive thru" di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta, Senin (2/11).

"Ini merupakan salah satu tantangan yang sedang coba kita selesaikan," kata Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers secara virtual, Selasa (3/11).

Satgas Covid-19 mendorong daerah untuk melakukan testing secara maksimal dan menyeluruh sebagai upaya deteksi dini. Selain itu perlu ada evaluasi operasional laboratorium.

Sepeti diberitakan *SP*, Indonesia sempat melakukan tes terhadap 34.000 orang per hari secara rata-rata dalam seminggu pada pertengahan Oktober. Jumlah itu sedikit lagi mencapai jumlah tes minimal untuk surveilans yang diminta World Health Organization (WHO) yaitu sebanyak 38.500 tes per hari. Selama ini WHO memformulasikan standar testing sebagai satu tes per 1.000 populasi per minggu.

Namun setelah itu jumlahnya anjlok di paruh kedua Oktober, di mana hanya 24.300-an orang per hari yang dites. Sedangkan terkait laporan laboratorium di daerah, biasanya ada 90 sampai 100 laboratorium Covid-19 yang telat melapor. Hanya saja di bulan Oktober, jumlah laboratorium semacam itu melonjak jadi 160 sampai 175 unit.

Sementara untuk jumlah *suspect* yang juga turun, Wiku mengatakan saat ini Satgas melakukan perbaikan dan penyelarasan koordinasi pelaporan data, dari daerah kabupaten/kota ke provinsi dan ke pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan.

"Hal ini menyangkut teknik pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya sangat besar, dan membutuhkan waktu pemrosesannya, sehingga belum bisa betul-betul *realtime*. Ini menyangkut upaya satu data Covid-19," jelasnya.

Dalam memproses data, pihaknya mengantisipasi *update* data setelah terjadi proses verifikasi yang dilakukan di tingkat daerah dan tingkat pusat. Hal ini dilakukan, kata Wiku, karena menjadi bagian dari proses satu data Covid-19 dan upaya interoperabilitas data pusat dan daerah.

"Menurut analisis data, memang terjadi tren penurunan setiap akhir minggu atau saat libur panjang," kata Wiku.

Kondisi tersebut diakui Wiku merupakan salah satu tantangan yang sedang Satgas Covid-19 selesaikan. Mengingat penyebaran virus Covid-19 tidak pernah libur untuk menyerang masyarakat. Karena itu, Satgas Covid-19 mengantisipasi momen *weekend* atau libur panjang ke depannya.

"Kami mencari cara, semisal melalui operasional laboratorium, penambahan *sif* kerja laboratorium, dengan pertimbangan intensif yang memadai," ujar Wiku Adisasmito.

Pada prinsipnya, tambah Wiku, Satgas Covid-19 terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan testing secara maksimal dan menyeluruh, sebagai upaya deteksi dini terhadap kasus positif Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Satgas Penanganan Covid-19, lanjut Wiku, akan selalu memberikan *update* kepada publik, tentang proses peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan data dalam rangka kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19 berdasarkan data ilmiah.

Sementara Kementerian Kesehatan juga telah melakukan pemutakhiran data berdasarkan *input* dari masing-masing provinsi. Hal ini sesuai definisi yang ada dalam surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020.

Lebih lanjut, Wiku memaparkan saat ini pemerintah telah menyiapkan 422 laboratorium untuk pemeriksaan PCR dan TCM di seluruh Indonesia. Pemerintah juga telah menyediakan reagen PCR untuk 795.00 spesimen. Pemerintah juga menyediakan reagen RNA sebanyak 686.000 spesimen.

Protokol Kesehatan

Tidak ketinggalan, pada kesempatan yang sama Prof Wiku juga meminta masyarakat tidak lengah dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Masyarakat diminta selalu disiplin protokol 3M dan pastikan beristirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan rutin berolahraga.

Selain itu, masyarakat diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika merasakan gejala. Bagi masyarakat yang positif Covid-19, agar ikuti anjuran tenaga kesehatan selama masa perawatan sehingga segera sembuh. Diingatkan, masyarakat jangan takut ke rumah sakit karena biaya perawatan semuanya ditanggung pemerintah.

"Ingat, kunci keberhasilan kita adalah menjalankan komitmen untuk menjalankan protokol kesehatan. Pandemi ini, akan lebih mudah ditangani apabila masyarakat dan pemerintah sepakat bahu membahu menjalankan perannya masing-masing," terang Wiku Adisasmito.

Wiku juga menyampaikan bahwa Satgas Penanganan Covid-19 mengapresiasi para pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk masyarakat dan pemerintah yang menerapkan protokol kesehatan.

Sementara dalam penanganan, Wiku memberi catatan, pada minggu keempat dan kelima Oktober 2020 terjadi penurunan cakupan testing yang bersamaan dengan libur panjang. [LEN/A-23]

Sherina Munaf dan Baskara Mehendra

Ikrar Janji Sehidup Semati



INSTAGRAM

Kabar gembira sekaligus mengejutkan datang dari pasangan Sherina Munaf dan Baskara Mehendra. Tak disangka keduanya telah resmi menikah. Akad nikah yang berlangsung sederhana digelar di rumah Triawan Munaf, Selasa (3/11).

Dikonfirmasi kepada sang ayah, Triawan, membenarkan bahwa akad nikah hanya berlangsung terbatas untuk orang-orang dekat.

"Iya benar tadi pagi. Tidak ada undangan. Hanya dihadiri oleh kedua orang tua mempelai, saksi nikah, dan penghulu," kata Triawan Munaf, dilansir dari *Antara*, Selasa (3/11).

Kabar pernikahan pasangan sejoli ini sebelumnya juga diperoleh dari pengamat musik Adib Hidayat, yang mengunggah foto Sherina dan Baskara di Twitter.

"Selamat untuk @sherinasinna & Baskara. Kang @Triawan & Mbak Loeki mantu," tulis pengamat musik Adib Hidayat dalam keterangan unggahan foto sebuah undangan di Twitter.

Dihadiri Keluarga Terdekat

Tampak dalam foto undangan itu tangan Sherina Munaf sedang menggandeng Baskara Putra. Keduanya kompak dengan mengenakan pakaian putih. Dalam undangan itu juga terlampir informasi bahwa akad nikah Sherina dan Baskara hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja guna mencegah penyebaran Covid-19.

"Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi, akad nikah hanya dihadiri kedua orang tua mempelai dan saksi dengan protokol kesehatan yang ketat. Sungguh keputusan yang ketat. namun saat ini yang terutama adalah kesehatan dan keselamatan kita semua," tulis keterangan dalam undangan pernikahan tersebut. [berbagai sumber/Ant/A-23]

Stevanus Grandy Budiawan

Proteksi Diri dengan 3M



DINA FITRI ANISA

Menjadi penderita Covid-19 bukanlah pengalaman yang menyenangkan, setidaknya itulah yang diceritakan Stevanus Grandy Budiawan, seorang penyintas Covid-19 bersama seluruh keluarganya. Meski termasuk bergejala ringan dan bisa sembuh dengan melakukan isolasi diri rumah, Stevanus Grandy Budiawan tidak pernah lupa konsultasi ke dokter apabila terjadi perubahan gejala pada dirinya dan anggota keluarganya.

Stevanus yang kini telah sembuh dari Covid-19 mengatakan, prinsip kehati-hatian tidak boleh kendur. Bersama keluarga, kini ia tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M di mana pun mereka berada. Mulai dari mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat ke luar rumah, dan juga menghindari kerumunan.

"Kita tetap menjalankan protokol seperti sebelum kita mengalami Covid-19. Saya pakai satu prinsip yang dipakai dalam keluarga. Anggap orang lain yang berhadapan dengan kita, itu orang tanpa gejala (OTG). Kita tidak tahu orang itu sakit atau tidak. Kalau mereka tidak pakai masker kita bilang, tolong dong pakai maskernya kalau m*engobrol* sama saya," jelasnya dalam acara Dialog Produktif bertema Vaksin : Intervensi Kesehatan Masyarakat yang Efektif dan Aman, yang diselenggarakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (3/11).

Dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog, Dirga Sakti Rambe pun menanggapi dengan baik sikap tenang dan positif keluarga Stevanus dalam menghadapi pandemi Covid-19. [DFA/A-23]

P2G Minta Kemdikbud Evaluasi PJJ Fase Dua

[JAKARTA] Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim meminta pemerintah (Kemdikbud) evaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang telah berlangsung selama 8 bulan ini. Permintaan evaluasi mengacu pada banyaknya siswa yang mulai jenuh dan stres menjalankan PJJ. Bahkan belum lama ini ditemukan kasus tiga anak meninggal karena PJJ.



ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

Sejumlah siswa belajar secara daring dengan memanfaatkan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di balai warga, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).

Tidak hanya anak didik yang stres karena PJJ, ternyata di sisi lain para guru juga tidak menjalankan pembelajaran dengan kondisi darurat. Bahkan, guru di beberapa daerah belum mendapat arahan dan petunjuk untuk menjalankan pembelajaran di masa pandemi. Mereka juga belum mendapat modul pendampingan. Hal Ini menyebabkan PJJ fase dua tidak jauh berbeda dengan fase pertama.

"Pelaksanaan PJJ fase kedua belum ada perubahan yang signifikan dari fase pertama. Indikasinya adalah belum ada intervensi yang berarti terkait dengan pelaksanaan PJJ," kata Satriwan kepada *SP*, Selasa (3/11).

Satriwan menyebutkan, sejak penerapan PJJ fase pertama, P2G telah mendorong Kemdikbud untuk bekerja sama lintas kementerian dan lembaga (K/L) termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan intervensi, agar PJJ fase dua mengalami perubahan.

Sayangnya intervensi hanya fokus pada PJJ dalam jaring (daring), sementara untuk PJJ luring selama 8 bulan ini belum ada intervensi yang berarti dari K/L. Dengan begitu, untuk daerah yang tidak memiliki jaringan internet sangat kesulitan menjalankan PJJ. Ditambah para guru sulit mendapat referensi pembelajaran, bahkan modul pembelajaran yang didesain Kemdikbud tidak semua dimiliki guru.

"Kebanyakan para guru tidak memahami modul. Wajar saja mereka tidak tahu dan tidak paham karena mereka tidak bisa membuka akses internet. Padahal kurikulum darurat semestinya sudah dipahami oleh guru-guru. Tetapi ternyata belum. Contohnya guru SD di Kabupaten Tanah Datar dan Padang Panjang, Sumatera Barat., saya mendapatkan laporan di sana mereka tidak mengetahui ada informasi tentang kurikulum darurat," kata Satriwan.

Ditempat terpisah, Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, ikut menanggapi kasus meninggalnya seorang siswi SMA di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Kota Tarakan yang bunuh diri karena tugas PJJ. Retno mengatakan hasil pemantauan pelaksanaan PJJ fase pertama pada Maret-Juni 2020, peserta didik cenderung mampu mengatasi tekanan psikologis karena pembelajaran tatap muka (PTM) sempat dilakukan selama 4 bulan. Namun hasil pemantauan pada PJJ fase kedua, anak-anak lebih sulit mengatasi permasalahan psikologis, sehingga berpengaruh pada kesehatan mental seorang anak/remaja.

Pergantian kelas dengan suasana yang baru tanpa tatap muka, menurut Retno, membuat anak-anak sulit memiliki teman dekat untuk saling berbagi dan bertanya. Akibatnya, kesulitan pembelajaran ditanggung anak sendiri jika anak tersebut tidak berani bertanya kepada gurunya. Kondisi ini diperburuk dengan ketidakmerataan akses terhadap fasilitas pendukung untuk pembelajaran daring maupun luring yang dialami pada anak yang sudah masuk usia sekolah,.

"Fase dua ini, anak naik kelas dengan situasi yang berubah, wali kelasnya ganti, guru mata pelajarannya berbeda, dan kemungkinan besar kawan-kawan sekelasnya juga berbeda dari kelas sebelumnya," kata Retno dalam siaran pers diterima *SP*, Selasa (3/11).

Psikososial

Tidak hanya masalah kurikulum darurat yang tidak dipahami guru, di masa pandemi ini tentu tidak dapat dipungkiri aspek psikososial anak terganggu. Mereka merasa bosan tinggal di rumah, khawatir tertinggal pelajaran, timbul perasaan tidak aman, dan lainnya. Situasi ini, anak membutuhkan orang tua untuk bisa menjadi penguat anak. Namun, tidak semua orang tua demikian, sebaliknya ada orang tua yang tidak sabar mengajar anaknya. [FAT/A-23]

Pameran Masker Indonesia



ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO

Petugas menata karya yang dipamerkan saat Pameran Masker Indonesia di Galeria Mall, Yogyakarta, Selasa (3/11), yang berlangsung hingga Januari 2021. Pameran yang menampilkan masker tiga lapis dengan berbagai model serta bahan ini adalah karya dari puluhan desainer kenamaan Indonesia dan penggiat UMKM.

Kilas Nusantara

Langgar UU ITE, Jerinx Dituntut 3 Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bali menuntut tiga tahun penjara kepada terdakwa I Gede Ary Astina alias Jerinx, karena dinilai melanggar beberapa pasal UU ITE dan KUHP. "Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jrx dengan pidana penjara 3 tahun, denda Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata Otong Rahayu sebagai koordinator jaksa penuntut, di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (3/11). Sidang dipimpin ketua majelis hakim PN Denpasar, Ida Ayu Adnya Dewi.

Otong mengatakan, hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak menyesali perbuatannya, pernah *walk out* di persidangan, perbuatan terdakwa melukai dan meresahkan masyarakat. Sebelumnya, dakwaan jaksa menjelaskan bahwa awalnya, postingan akun Instagram @jrxsid pada 13 Juni 2020 berisi postingan kata-kata antara lain "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites Covid-19". Terdakwa menulis di kolom komentarnya @jrxsid, "Bubarkan IDI saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini. Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? Tidak, IDI dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat". [137]

Dikabarkan Covid-19, Hendi Tunggu Hasil *Swab*

[SEMARANG] Calon petahana Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dikabarkan terpapar Covid-19 dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang. Saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/11), Hendi, sapaan akrabnya, hanya berkomentar singkat.



ANTARA

Hendrar Prihadi

"Mohon doanya saja supaya cepat sembuh. Ini sudah opname," ujar Hendi, menjawab melalui pesan singkat.

Ketua Tim Pemenangan Hendi - Ita, Kadarlusman yang dihubungi terpisah juga membenarkan kabar tersebut. Namun, Pilusm sapaan akrab Kadarlusman, menepis kabar bahwa Hendi dirawat karena terpapar Covid-19, melainkan hanya kelelahan, sehingga beristirahat di rumah sakit.

Untuk memastikan kondisi kesehatannya, menurut Pilus, Hendi telah diperiksa kesehatannya, yakni rapid tes dan *swab test*. "Kalau *rapid test* sudah dilakukan rutin setiap bulan. Mas Hendi juga sudah menjalani *swab*, tetapi hasilnya belum keluar," ujar Pilus yang menjabat Ketua DPRD Kota Semarang.

Menurut Pilus, kondisi stamina Hendi terkuras karena adanya aturan kampanye selama masa pandemi, yang hanya bisa mengumpulkan orang dalam jumlah terbatas, sehingga Hendi harus banyak turun gunung ke setiap warga. Akibatnya, Hendi kelelahan. "Kondisi kesehatan beliau turun, tidak enak badan akibat banyaknya aktivitas kampanye. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit, paling besok sudah pulang," kata Pilus.

Dirut RSUD KRMT Wongsonegoro, Susi Herawati yang dikonfirmasi terpisah mengaku, saat ini Hendi memang tengah sakit, dan menjalani perawatan. Namun demikian, pihaknya belum bisa komentar banyak.

"Tes *swab*-nya rutin di kami, tetapi belum bisa komentar," kata Susi Herawati, singkat.

Sembuh

Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarif Fasha dinyatakan sembuh dari Covid-19, setelah hampir 2 bulan melawan virus mematikan itu di tubuhnya. Saat ini, Syarif Fasha telah bertugas kembali sebagai wali kota Jambi, dan juga berkumpul bersama anak dan istrinya yang juga baru sembuh dari Covid-19.

"Selama menjalani isolasi mulai dari Jakarta hingga di Jambi hampir 2 bulan, saya benar-benar stres. Ketika saya menjalani isolasi di Jakarta, anak saya yang sudah tiga bulan menjalani perawatan akibat sakit ginjal dinyatakan juga terpapar Covid-19 dan akhirnya meninggal," kata Syarif Fasha, Selasa.

Seperti diketahui, putra bungsu Syarif Fasha, yakni Muhammad Fabiasnyah Putra (13) akhirnya meninggal dunia akibat Covid-19 setelah dirawat di Jakarta. Syarif Fasha sendiri membatalkan keiikutsertaannya di pemilihan gubernur Jambi karena memilih fokus mengurus anaknya. [141/142]

Demo Mengecam Anggota DPD Bali



ANTARA FOTO/NYOMAN HENDRA WIBOWO

Pengunjuk rasa dari Forum Komunikasi Taksu Bali menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam aksi mengecam pernyataan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK), di kantor DPD Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Selasa (3/11). Aksi tersebut untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada anggota DPD komite 1 bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM, Pemukiman dan Pertanahan itu karena dinilai menghina serta menodai simbol agama Hindu di Bali.

Pengusaha di DIY Sepakati Kenaikan UMP 2021

[YOGYAKARTA] Pemda DI Yogyakarta (DIY) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DIY 2021 naik sebesar 3,54%. Diketahui, UMP DIY pada 2020 sebesar Rp 1.704.608. Dengan kenaikan itu, maka besaran UMP DIY menjadi sekitar Rp 1.765.000 atau naik sekitar Rp 60.392.

Juru Bicara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, T Apriyanto menyatakan, para pengusaha di Yogya tidak berkeberatan dengan keputusan kenaikan UMP ini. Menurutnya, kenaikan UMP DIY cukup ideal di tengah ekonomi yang sedang lesu. "Memang sulit mencari mencapai titik temu, namun dengan semangat ingin memulihkan perekonomian Yogya, maka kami mencari solusinya," katanya, Selasa (3/11).

Menurutnya, Apindo DIY menerima dengan hasil akhir yang telah diputuskan oleh Gubernur DIY, dan siap melaksanakan. Keputusan sudah ditetapkan, dan yang menjadi perhatian selanjutnya adalah keberlanjutan usaha, karena hidup-matinya pengusaha juga sangat berkaitan dengan SDM yang dimiliki, dalam hal ini pekerja. "Kami sangat menghargai keputusan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, karena tidak semua berani melakukan keputusan bijaksana. Keputusan ini merupakan bentuk kepedulian kepada pengusaha dan pekerja," ujarnya.

Diakui Apriyanto, saat ini, semua kalangan pengusaha di DIY terpuruk. Bisa memproduk barang, tetapi kesulitan menjual. Namun, keputusan Gubernur DIY harus dipahami sebagai jalan tengah, dan bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Dikatakan, bagi pengusaha yang memang belum bisa menerapkan kenaikan upah tahun depan, Pemda DIY tetap memberikan ruang bagi pengusaha yang ingin mengajukan penundaan.



ANTARA

Sri Sultan Hamengku Buwono X

Sri Sultan HB X mengatakan, besaran kenaikan UMP 2021 tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah.

Menurut Sultan, ekonomi hanya tumbuh 3,34%. "Pertumbuhan itu yang kami negosiasikan, dengan kesepakatan Dewan Pengupahan diterima, 3,54%," kata Sultan, pada Selasa.

Sedangkan tuntutan buruh yang menyatakan, kenaikan UMP DIY berada di bawah kebutuhan hidup layak (KHL), Sultan menegaskan, meski UMP Rp 5 juta pun, belum dianggap layak jika kebutuhannya Rp 10 juta. "Rp 5 juta pun belum layak, kalau butuhnya Rp 10 juta. Namun, bagaimana akan menaikkan? Itu kan juga tergantung negosiasinya dengan Apindo," tegas Sultan.

Sultan juga menyampaikan, dari sisi pengusaha, maunya upah serendah mungkin, sementara pekerja maunya upah setinggi mungkin. "Pemda DIY, posisinya hanya memfasilitasi, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. UMP ini kan hanya diterapkan untuk pekerja baru yang memiliki masa kerja belum sampai setahun. Setelah setahun bekerja, para pekerja diharapkan sudah mendapat upah lebih besar," kata Sultan.

Banten

Sementara itu, UMP Banten 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 2.460.996,54. Nilai UMP 2021 tersebut masih sama dengan nilai UMP Banten 2020 lalu. UMP Banten 2021 tidak mengalami kenaikan.

Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan, tidak naiknya UMP Banten 2021 karena pertimbangan dampak Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta diperlukan kebijakan upah minimum sebagai salah satu upaya dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.

Tidak hanya itu, kata Wahidin Halim, penetapan UMP Banten 2021 juga memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19. Melalui Surat Edaran tersebut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memutuskan, tidak menaikkan upah minimum 2021 (UMP 2021). Wahidin Halim meminta serikat buruh untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. [149/152]

Kades: Banjir Kebumen Dipicu Tanggul Dilubangi Warga



ISTIMEWA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek lokasi banjir dan para pengungsi di Kebumen, Selasa (3/11).

[KEBUMEN] Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menemukan fakta mengejutkan saat mengecek lokasi bencana banjir di Kabupaten Kebumen, Selasa (3/11). Ternyata, jebolnya tanggul yang menyebabkan beberapa desa di Kecamatan Puring, Kebumen terendam banjir dan ribuan warga harus mengungsi, dikarenakan warga yang melubangi tanggul untuk keperluan pengairan sawah.

Fakta itu ditemukan Ganjar saat meninjau tanggul jebol di Desa Madurejo, Kecamatan Puring, Kebumen. Tanggul yang jebol mencapai panjang 50 meter dan lebar 6 meter.

Menurut laporan Kepala Desa (Kades) Madurejo Ajar Dwiyono dan Kades Sidobunder Sarno, tanggul jebol yang menyebabkan bajir di daerahnya itu, diakibatkan warga nekat melubangi tanggul untuk pengairan.

"Untuk itu, kami minta bantuan pompa air Pak, yang bisa menyedot air dari sungai ke sawah. Itu jebol karena warga melubangi tanggul," kata Ajar Dwiyono pada Ganjar.

Ganjar pun terkejut dengan laporan itu. Ia meminta kades dan aparat setempat mengedukasi warga untuk menjaga tanggul agar tidak terjadi bencana.

"Tadi ada temuan yang disampaikan Pak Lurah. Kenapa tanggulnya jebol, karena di bawahnya di-*bolongi* (dilubangi). Kenapa dilubangi, karena butuh air untuk pertanian. Maka saya minta ini tidak boleh terjadi lagi. Ayo warga semuanya tolong dijaga tanggulnya," kata Ganjar.

Terkait penyebab warga yang nekat melubangi tanggul karena membutuhkan pengairan sawah, Ganjar meminta ada solusi lain. Kades sudah mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan pompa air berkapasitas besar, dan menurutnya itu solusi bagus.

"Maka Pak Bupati Kebumen tolong dibantu. Kalau tidak bisa, nanti kami juga ikut bantu, Kementerian Pertanian, CSR pasti bisa bantu. Tapi ini tolong menjadi perhatian, karena kalau itu dijaga, maka semuanya bisa aman," tegasnya.

Sementara banjir yang menggenangi area permukiman warga Kebumen sudah surut. Ribuan pengungsi juga sudah pulang ke rumahnya. Tanggul yang jebol sudah ditangani Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

Plt Kepala BPBD Kebumen Teguh Kristiyanto mengatakan, sampai saat ini sudah ada 22 titik tanggul jebol di Kebumen, dan terdapat 230 titik longsor di sejumlah daerah. "Ada empat desa terdampak banjir, tapi yang parah di Madurejo dan Sidobunder. Pengungsi sekitar 2000 orang, tapi sudah pulang semuanya," katanya.

Di Lamongan, Jawa Timur, seorang nenek benama Taresni (65) warga Dusun Cumpleng, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong tewas tertimbun material rumahnya akibat tertimpa pagar makam yang ambruk ketika hujan deras turun, Senin (2/11). Pagar makam setinggi 2,5 meter ambruk dan menimpa rumah yang kamarnya dihuni korban.

"Pondasi tembok pagar makam tidak kuat digerogoti air hujan hingga membuat dinding tembok makam yang ada di atas bangunan kamar rumahnya ambruk. Reruntuhan inilah yang menimpa korban yang sedang tidur lelap hingga meninggal dunia," ujar Muslimin, salah seorang pengurus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamomgan, Selasa.

Bencana tanah longsor terjadi di Jalan lintas Sumatera (Jalinsum) di kawasan Batu Lobang, Desa Simaninggir, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumut, Selasa.

Komandan Pos Polisi Sitahuis Bripka Rindu Hutabarat menyampaikan, longsor terjadi akibat hujan turun sangat lebat di daerah tersebut.

Menurutnya, lalu lintas kendaraan dari arah Kabupaten Tapanuli Utara menuju Tapteng dan Sibolga maupun sebaliknya, untuk sementara belum dapat melintas kawasan Batu Lobang Kilometer 8, Desa Simaninggir, Sitahuis.

"Polisi sedang berusaha mengalihkan arus lalu lintas ke arah Jalan Rampa - Poriaha. Sebab, material longsor yang menutupi jalan akan dibersihkan menggunakan alat berat," katanya, Selasa.

Masih Dicari

Tim SAR gabungan masih terus mencari 3 korban penumpang *Speedboat* Fajar yang tenggelam di perairan Pulau Sonit, Kabupaten Banggai Laut (Balut), Sulteng.

"Tim SAR didukung kapal KN SAR Bhisma sedang mencari tiga korban yang masih hilang dalam kecelakaan *speedboat* di perairan Banggai Laut," kata Kepala Kantor SAR Palu Andrias Hendrik Johanes, Selasa.

Sesuai ketentuan operasi SAR, katanya, pencarian akan berlangsung selama 7 hari sejak kejadian, Senin (2/11).

Disebutkan, s*peedboat* 180 PK mengangkut 10 penumpang rombongan salah satu tim kampanye calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai Laut. Mereka berangkat dari Pulau Kasuari menuju Pulau Sonit, Senin, sekitar pukul 07.00 Wita.

Namun, dalam pelayaran itu, sekitar pukul 08.00 Wita, *speedboat* diterjang ombak besar dan terbalik di tengah laut. Empat penumpang berhasil diselamatkan nelayan setempat. Sedangkan tiga lainnya meninggal dunia, salah satunya calon wakil bupati bernama Asgar Badalia.

Para nelayan dan kapal penumpang di pantai timur Provinsi Jambi diminta mewaspadai dampak La Nina yang menyebabkan cuaca ekstrim bisa berubah secara mendadak.

"Seluruh kapal nelayan dan penumpang kami minta menyiapkan fasilitas keselamatan dan memantau koncisi cuaca secara crmat sebelum berlayar," kata Kapolres Tanjabbar AKBP Guntur Saputro, Selasa. [ARS/142/155/159/141]

Sejak 2006, Klinik Sejahtera Pandeglang Gugurkan 100 Janin

[SERANG] Klinik Sejahtera yang melakukan aborsi ilegal di Kampung Cipacing, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten, telah berpraktik sejak 2006 silam. Sebanyak 100 janin yang telah digugurkan hingga 2020 ini.



ISTIMEWA

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Kombes Pol Nunung Syaifuddin (kedua dari kanan) didampingi Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi (ketiga dari kanan), pada saat ekspos kasus aborsi ilegal di Mapolda Banten, Serang, Selasa (3/11).

Polda Banten telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus aborsi ilegal tersebut. Ketiga tersangka yakni bidan NN (53), asisten bidan E (38), dan seorang wanita RY (23), yang diduga mengaborsikan janinnya. Ketiga tersangka ditahan di Mapolda Banten.

Sementara kekasih RY, berinisial W (23), masih diperiksa sebagai saksi. Sepasang kekasih ini merupakan warga Rangkasbitung, Kebupaten Lebak.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Banten Kombes Pol Nunung Syaifuddin mengungkapkan, Klinik Sejahtera telah 14 tahun membuka layanan praktik aborsi ilegal sejak 2006, dan telah menggugurkan 100 lebih janin. Pelaku mematok harga senilai Rp 2,5 juta setiap pasien.

Kasus ini, kata Nunung, berhasil diungkap oleh Tim Sub Bidang IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus Polda Banten. Keberhasilan ini bermula dari adanya informasi masyarakat, soal adanya praktik aborsi ilegal di Klinik Sejahtera oleh pelaku NN. Nunung mengatakan, saat itu, Senin (26/10), sekitar pukul 16.00 WIB, polisi mengamankan sepasang kekasih RY dan W, yang diduga telah melakukan aborsi di klinik NN, warga Pandeglang.

"Kita amankan sepasang lelaki dan perempuan diduga melakukan aborsi atau menggugurkan seorang bayi," kata Nunung didampingi Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi saat konferensi pers di Mapolda Banten, Selasa (3/11).

"Saat diinterogasi kedua orang tersebut membenarkan bahwa baru saja menggugurkan janin yang usianya baru satu bulan di Klinik Sejahtera," ujar Nunung.

Sesuai Permintaan

Atas informasi tersebut, petugas memeriksa NN dan E, dan kedua pelaku mengakui baru saja selesai melakukan aborsi janin pasiennya.

"Dilakukan konfirmasi kepada seorang bidan dan asistennya yang masih berada di klinik itu. Hasilnya bidan itu mengakui baru saja melakukan aborsi sesuai dengan permintaan, yang selanjutnya polisi menggelandang pelaku-pelaku tersebut ke Polda Banten," ujar Nunung.

Sebagai barang bukti, petugas mengamankan baskom, alat kesehatan berupa alat suntik, alat injeksi dan uang tunai Rp 2,5 juta dari pelaku RY kepada pelaku NN hasil kegiatan aborsi ilegal tersebut.

Berdasarkan keterangan pelaku, untuk hasil aborsi yang usia janinnya di bawah tiga bulan atau masih berbentuk gumpalan darah maka akan dibuang ke wastafel, sedangkan janin yang usianya lebih dari 3 bulan atau sudah berbentuk maka akan dibawa oleh pasien dan dibuang sendiri.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menambahkan, dari hasil pemeriksaan oleh penyidik, diketahui NN memiliki motif untuk mencari keuntungan dari pekerjaannya.

"Sedangkan RY wanita yang menggugurkan kandungannya, tidak menghendaki lahirnya bayi yang ada dalam kandungannya," katanya.

Tersangka NN dan E dikenakan Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) UU 36/2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan RY dikenakan Pasal 346 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. [149]

Tebang Pokok Pohon, 2 Orang Disidang di PN Taluk Kuantan

[PEKANBARU] Marjohan Purba dan Ilham Marisi disidang di Pengadilan Negeri (PN) Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau hanya karena menebang satu pokok pohon di area konsesi PT RAPP. Pada sidang yang berlangsung Senin (2/11), pakar hukum pidana dari Universitas Riau Erdianto mengatakan, terdakwa Marjohan dan Ilham yang menebang satu pokok pohon di area konsesi PT RAPP tidak bisa di pidana karena mereka menebang pohon untuk kebutuhan hidupnya.

"Masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, atau karena ditebang hanya satu pokok pohon saja maka dalam hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu alasan pembenar dan pemaaf," kata Erdianto dalam keterangannya di Pekanbaru, Selasa (3/11).

Pendapat demikian disampaikannya sebagai ahli hukum pidana yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa Marjohan Purba dan Ilham Marisi dari LBH Pekanbaru yang sebelumnya tampil di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, Senin, dengan sidang perkara penebangan satu pokok pohon di areal konsesi PT RAPP.

Menurut Erdianto, alasan pembenar yaitu sebuah perbuatan pidana tertentu tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya. Alasan pembenar tersebut, katanya, lebih bersifat objektif, kemudian makna alasan pemaaf adalah suatu alasan yang menghapus unsur kesalahan dari sebuah perbuatan pidana bukan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

"Alasan pembenar hanya memperhatikan sisi pelaku saja bukan perbuatan sehingga lebih bersifat subjektif. Sedangkan alasan pemaaf pelaku tidak mampu bertanggung jawab secara hukum sesuai Pasal 44 ayat (1) KUHP," katanya.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangannya ahli itu, Erdianto menjelaskan bahwa UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (P3H) adalah UU yang bersifat administratif yang hadir sebagai jalan tengah atas keinginan negara yang memandang bahwa hutan adalah objek hukum yang bersifat ekonomis.

Untuk itu, hutan harus diatur tata cara pengelolaan, perlindungan dan peruntukannya dengan mengakomodasi hukum yang hidup di antara masyarakat yang menganggap hutan adalah milik masyarakat yang boleh dimanfaatkan dan dikelola sepenuhnya. "Sanksi pidana dalam penegakan UU P3H lebih menyasar kepada orang perorangan atau korporasi yang melakukan eksploitasi secara besar besaran demi mengejar keuntungan semata, bukan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang menebang kayu di hutan yang peruntukannya bukan untuk tujuan komersial," katanya. [Ant/L-9]

Uji Coba Semi Pedestrian Malioboro



ANTARA FOTO/ANDREAS FITRI ATMOKO

Warga berada di kawasan Malioboro saat uji coba Semi Pedestrian jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (3/11). Dalam uji coba yang digelar hingga 15 November 2020 itu, kendaraan bermotor dilarang melintasi ruas jalan Malioboro, kecuali Transjogja, becak motor dalam kapasitas terbatas dan beberapa kendaraan operasional seperti mobil patroli polisi, pemadam kebakaran maupun ambulans.

Covid-19

Satu Kecamatan di Bantul *Lockdown* 14 Hari

[YOGYAKARTA] Kapanewon (Kecamatan) Banguntapan Kabupaten Bantul, DIY menjadi wilayah zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi penularan Covid-19, sehingga harus mendapatkan penanganan khusus dengan penerapan pembatasan sosial lokal atau *lockdown* selama 14 hari mulai Selasa (3/11).

Juru Bicara Percepatan Penanganan Penularan Covid-19 Bantul Sri Wahyu Joko Santoso menjelaskan, Selasa, Pemkab Bantul melakukan pembatasan kegiatan terhadap warga selama 14 hari karena Banguntapan menjadi zona merah.

"Keputusan ini diambil berdasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantul," katanya.

Pemkab Bantul memang belum akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan hanya akan melakukan pembatasan di kecamatan.

"Sejauh ini hanya ada satu yang merah yaitu Kecamatan Banguntapan. Sedangkan sisa 16 kecamatan lain masuk zona oranye. Jadi pembatasan memang akan dilakukan pada Kecamatan Banguntapan saja," katanya.



ANTARA FOTO/IGGOY EL FITRA

Petugas BPBD Padang melakukan penyemprotan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Muaro Padang, Sumatera Barat, Selasa (3/11). BPBD bersama Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan di seluruh lapas, setelah 40 orang warga binaan dan seorang pegawai di lapas itu dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

Pembatasan itu akan mencakup pengurangan jam operasional tempat-tempat umum yang selama ini sudah buka kembali secara normal. "Intinya, pembatasan ini akan kembali membuat masyarakat khususnya di Kapanewon Banguntapan lebih berfokus melakukan kegiatan di rumah saja. Tempat ibadah juga akan kembali diatur dan dibatasi pemakaiannya. Jadi dianjurkan untuk beribadah dirumah masing-masing," tuturnya.

Walaupun hanya ada satu wilayah kecamatan yang berstatus zona merah hingga dilakukan pembatasan sosial, namun pihaknya tidak ingin terlena dengan kondisi yang ada. Salah satu langkah yang diambil yakni lebih memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan di kapanewon lain dan terutama di tempat-tempat wisata.

Terpisah, Camat Banguntapan Fauzan Mu'arifin mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan (forkopimcam), dan disepakati adanya pembatasan sosial tersebut.

"Termasuk pembatasan tempat umum seperti resto dan kafe yang ada di Banguntapan. Maksimal boleh buka hanya sampai pukul 22.00 WIB saja," ujar Fauzan.

Menurut Fauzan, masuknya Banguntapan ke dalam zona merah akibat dari kelalaian masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Ia menyatakan melalui gugus tugas kapanewon nantinya akan menyiapkan dan terus memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan terhadap semua kegiatan sosial dan keagamaan di wilayahnya.

Selain itu, pihaknya juga tidak akan lelah memberi edukasi untuk tetap disiplin melakukan isolasi mandiri selama 14 hari kepada para pendatang dari luar wilayah Banguntapan.

Diketahui, pasien konfirmasi positif di Kabupaten Bantul, telah mencapai 1.072 orang. Sedangkan khusus di Kecamatan Banguntapan per 2 November 2020, total pasien positif 199 orang, 163 orang telah dinyatakan sembuh, enam (6) orang meninggal dunia, dan masih dirawat 30 orang.

Fauzan menuturkan, penyebaran virus *corona* terjadi akhir-akhir ini bersumber dari keluarga dan tempat kerja.

"Dari total kasus positif 54 orang (27,1%) karena klaster keluarga, karena itu, semua tergantung dari kita. Mari putus rantai penyebaran virus Covid-19 dengan tidak kemana mana kecuali ada keperluan yang sangat penting," katanya.

Ditutup

Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kaur, Bengkulu, sampai Selasa masih ditutup, karena belasan pegawainya masih menjalani isolasi setelah menjalani *rapid test*, menyusul ditemukan seorang pegawai positif Covid-19.

Sekda Kaur Nandar Munadi mengatakan, Selasa, kantor BKD ditutup untuk memutus mata rantai penyebaran virus *corona*. "Kantor BKD sengaja kita tutup untuk beberapa hari ke depan guna memutus rantai penyebaran virus *corona* di instansi tersebut, sehingga tidak ada lagi pegawai yang tertular virus mematikan tersebut," ujarnya.

Sementara belasan aparatur sipil negara (ASN) di BKD Kaur masih menjalani isolasi setelah menjalani *rapid test* Covid-19. Namun, hasil *rapid test* negatif semua, tetapi demi memutus rantai penyebaran Covid-19, para pegawai itu melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

"Pekan depan kantor BKD Kaur kembali buka seperti biasa. Sebab, pekerjaan di kantor BKD menjelang tutup tahun cukup banyak, sehingga mulai pekan depan pelayanan sudah kembali normal," kata Nandar. [152/155/143]

42 Kasus Pelanggaran Kampanye di Bengkulu Diberi Teguran Tertulis

[BENGKULU] Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu selama Oktober 2020, telah memproses 42 kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan para calon kepala daerah bupati maupun calon gubernur.

Pelanggaran yang dilakukan antara lain tak menaati protokol kesehatan (prokes) dan pelanggaran administrasi.

"Mereka sudah diberikan sanksi teguran tertulis sesuai kewenangan Bawaslu," kata anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Halid Syaifullah, Selasa (3/11).

Dikatakan, pelanggaran prokes antara lain peserta yang hadir dalam kampanye melebihi batas ketentuan 50 orang, sebagian massa yang hadir tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak.

Selain itu, panitia tidak menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir di lokasi kampanye, untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sedangkan pelanggaran administrasi berupa tidak mengantongi izin kampanye dari pihak kepolisian, sehingga kampanye terpaksa dibubarkan oleh petugas Bawaslu kecamatan dan kabupaten.

"Pada bulan Oktober, ada beberapa kali kampanye calon gubernur Bengkulu dibubarkan oleh anggota Bawaslu, karena tidak mengantongi izin kampanye dari kepolisian, termasuk kampanye calon petahana Rohidin Mersyah. Hal yang juga dilakukan calon gubernur Helmi Hasan," ujarnya.

Halid menegaskan tidak pandang buluh sepanjang kampanye yang dilakukan melanggar aturan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan.

Untuk calon kepala daerah yang tidak menerapkan prokes saat berkampanye, katanya, masih diberikan teguran dan peringatan. "Jika hal yang sama berulang kali dilakukan, maka jadwal kampanye akan dikurangi bahkan pasangan calon bisa dilarang berkampanye sampai berakhir masa kampanye," tegasnya.

Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di 8 kabupaten dan satu provinsi yaitu pemilihan gubernur dan calon gubernur Bengkulu. Sesuai jadwal masa kampanye pilkada akan sampai akhir November ini.

Unggul

Sementara itu, hasil survei Lembaga Survei Poltracking Indonesia (PoLi) untuk Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020, menempatkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman lebih unggul dari pasangan Eri Cahyadi-Armuji.

Survei tersebut menyebutkan, elektabilitas Machfud Arifin-Mujiaman yang diusung koalisi 8 parpol PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, Nasdem, PAN,dan PPP mencapai 51,7%. Sedangkan pasangan Eri Cahyadi-Armuji yang diusung PDI-P dan PSI hanya mendapatkan 34,1%.

"Sebanyak 5,0% masih merahasiakan jawaban dan yang belum menentukan pilihan 9,2%," ujar Masduri, peneliti Poltracking Indonesia, dalam keterangannya, Selasa.

Survei dilaksanakan tanggal 19-23 Oktober 2020 dengan menggunakan metode *stratified multistage random sampling*. Jumlah sampel dalam survei sebanyak 1.200 responden dengan *margin of error* sekitar 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Masduri mengatakan, survei dilakukan di 31 dari 34 kecamatan di Surabaya secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih. Disebutkan, untul elektabilitas masing-masing calon wali kota, hasil survei menyebutkan apabila kedua pasangan tak dipasangkan, nama Machfud Arifin tetap mengungguli Eri Cahyadi dengan keunggulan 51,9% banding 34,3%.

"Elektabilitas Machfud Arifin mulai menunjukkan kenaikan pada Maret hingga Oktober 2020," ujar Masduri. [ARS/143]

Kejurnas Judo Digelar secara Virtual

[JAKARTA] Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) siap menggelar kejuaraan nasional (kejurnas) secara virtual pada 7 November 2020. Itu dilakukan karena masyarakat belum bisa berkumpul dalam satu lokasi secara massal guna memutus mata rantai penyebaran virus *corona*.

"Tujuan kejuaraan nasional kali ini adalah memotivasi atlet, pelatih, dan pengurus PJSI yang selama pandemi Covid-19 belum dapat bertanding secara faktual. Nantinya setiap daerah masing-masing yang ikut juga wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat," kata Wakil Ketua PB PJSI sekaligus Panitia Pelaksana Kejurnas Kata Virtual 2020, Perry Pantouw, dalam keterangannya Selasa (3/11).

Turnamen bertajuk Virtual Kejurnas Judo Kata Tahun 2020 itu bakal mempertandingkan dua kategori Kata, yaitu Nageno Kata dan Ju No Kata. Adapun pesertanya terdiri dari delapan pengurus provinsi (pengprov) serta empat pengprov peserta ekshibisi. Ke-8 pengprov PJSI itu adalah Jawa Tengah, Papua, Jawa Timur, Sulsel, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarata. Sementara empat peserta ekshibisi terdiri dari Kalsel, Bali, Sumut, dan Banten.

Para peserta akan bertanding di daerah masing-masing. Gerakan mereka, termasuk yang berpasangan, disaksikan langsung oleh para juri baik yang berlisensi internasional maupun nasional.

Semua pertandingan akan disaksikan langsung oleh seluruh peserta lainnya melalui aplikasi Zoom yang juga akan disiarkan dalam kanal Youtube Indonesia Judo Federation mulai pukul 09.00 WIB. Nantinya, juara turnamen akan dikirim ke pertandingan internasional. Namun, levelnya diharuskan sudah mencapai tingkat ban hitam dan Dan 1.

Sejumlah induk organisasi lain sebelumnya telah menggelar kejurnas secara virtual seperti Kejurnas Virtual Kempo Piala Menkominfo 2020 pada Agustus lalu, serta Kejurnas Wushu Virtual pada Oktober. [H-15]

Calon Ketua Umum PBSI Dipersoalkan



ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

Agung Firman Sampurna

[JAKARTA] Munculnya nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Agung Firman Sampurna, dalam bursa bakal calon ketua umum Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) mendapat sorotan tajam dan dipersoalkan. Ia dinilai tidak memiliki kapasitas untuk memimpin cabor yang paling membanggakan Indonesia tersebut.

Karena itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Agung Firman Sampurna untuk fokus mengawasi keuangan negara dan tidak merangkap jabatan. "Sebaiknya Agung Firman fokus mengawasi penggunaan anggaran negara karena masih banyak pekerjaan yang belum dituntaskan selama menjabat Ketua BPK. Tak perlulah saya menjelaskannya secara rinci," kata Boyamin ketika dihubungi media Selasa (3/11).

Menurut dia, majunya Firman Agung Sampurna bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Bab III. Pasal 6 ayat 2 poin (i) menyebutkan, anggota BPK, pemeriksa dan pelaksana BPK tidak diperkenankan menjadi pengurus yayasan dan/atau badan-badan usaha yang kegiatannya dibiayai oleh anggaran negara. "Saya tak perlu lagi melihat kode etik. Ini masalah etika," kata Boyamin.

Ia mengakui, memang tidak ada larangan Agung Firman untuk mencalonkan sebagai ketua umum PP PBSI pada Musyawarah Nasional (Munas) PBSI yang digelar di Serpong, Banten, 5-6 November 2020. Namun, tegasnya, Agung Firman tidak boleh rangkap jabatan alias menjabat Ketua BPK RI sekaligus Ketua Umum PP PBSI. "Tidak ada masalah kalau Agung Firman mau menjabat Ketua Umum PP PBSI itu haknya. Namun, konsekuensinya harus melepaskan jabatan Ketua BPK. Artinya pilih salah satu BPK atau PP PBSI. Kalau sampai nekat merangkap jabatan, saya siap melaporkannya ke Majelis Kehormatan dan Dewan Etik BPK. Dan, saya akan membuktikan itu," tegasnya.

Konflik Kepentingan

Secara terpisah, peneliti Indonesian Coruption Watch (ICE), Wana Alamsyah mengatakan ICW belum melakukan pemantauan terhadap pencalonan Agung Firman Sampurna. "Secara prinsip, jika kewenangan yang dimiliki oleh Agung Firman patut diduga bertentangan dengan kode etik, sepatutnya Tim Penjaringan mempertimbangkan untuk meloloskan Agung Firman ke tahap selanjutnya. Sebab, ketika dia menjabat akan ada potensi konflik kepentingan yang muncul terkait kerja di BPK," katanya.

Pada Munas PBSI yang agenda utamanya memilih Ketua Umum PP PBSI periode 2020-2024 ada dua namanya yang bersaing yakni Agung Firman dan Ketua Pengprov PBSI Banten, Ari Wibowo. Namun upaya Ari maju sebagai bakal calon ketua umum digandal dengan adanya Musyawarah Provinsi (Musprov) PBSI Banten pada Minggu (1/11) lalu. "Saya tidak mengakui Musprov PBSI Banten itu karena sudah mengirimkan surat ke Pengkab, Pengkot, KONI Provinsi Banten dan PP PBSI. Sekarang, saya serahkan sepenuhnya kepada PP PBSI," kata Ari Wibowo.

Sekjen PP PBSI, Achmad Budiarto juga mengakui PP PBSI tidak mengeluarkan mandat untuk menghadiri Musprov PBSI Banten. "Tidak ada mandat pengurus yang dikeluarkan untuk menghadiri Musprov PBSI Banten karena masih ada persoalan di bidang organisasi," kata dia. [H-15]



AFP/ CESAR MANSO

Bek Barcelona, Gerard Pique (kanan), meluapkan kekecewaannya setelah ditahan imbang 1-1 oleh Alaves pada laga La Liga Spanyol di Stadion Mendizorroza, Vitoria, Minggu (1/11) dini hari WIB lalu. Kamis (5/11) dini hari WIB nanti, Barcelona menjamu Dynamo Kiev pada laga ketiga Grup G Liga Champions di Camp Nou.

Liga Champions

Jalan Mulus Barcelona

[BARCELONA] Jalan Barcelona ke babak 16 Liga Champions musim ini akan semakin mulus bila kembali memetik kemenangan atas Dynamo Kiev pada laga ketiga Grup G di Camp Nou pada Kamis (5/11) dini hari WIB nanti. Tiga poin dari laga itu akan semakin mengokohkan posisi mereka di puncak grup dengan sembilan angka setelah selalu memetik kemenangan pada dua laga pertama.

Pasukan Ronald Koeman makin optimistis, selain karena bermain di kandang sendiri, juga karena catatan statistik perjumpaan kedua tim masih didominasi oleh Barcelona. Pada dua pertemuan terakhir pada 2019 di ajang Liga Champions, Barcelona selalu menang atas klub asal Ukraina itu baik pada laga kandang maupun tandang. Atau bila dilihat rekor seluruh pertemuan kedua tim, mereka sudah 10 kali bertemu. Barcelona enam kali menang, tiga kali kalah, dan sekali imbang.

Meski demikian, Dynamo Kiev bisa saja menyengat *Azulgrana* karena Lionel Messi dan kawan-kawan sedang dalam krisis. Meski di ajang Liga Champions mereka masih cukup oke dan selalu menang, tetapi di La Liga mereka kelimpungan. Anak asuh Ronald Koeman itu belum pernah menang pada empat laga terakhir dan hanya menuai dua dari 12 poin yang seharusnya. Kehilangan 10 poin membuat mereka tercecer jauh di klasemen sementara.

Beda dengan Dyano Kiev yang pada lima laga terakhir di semua kompetisi baru sekali kalah, sekali imbang, dan tiga kali menang. Hanya memang, mereka juga datang ke Camp Nou dengan modal tanpa kemenangan pada dua laga terakhir.

Meski demikian, Koeman masih sangat percaya diri pada laga ini. Bahkan, dia merencanakan untuk memberi waktu istirahat kepada pemain terbaiknya, Lionel Messi. "Bila *Blaugrana* memimpin pertandingan dengan nyaman hingga menjelang laga berakhir, Koeman akan memutuskan untuk memberi sedikit waktu istirahat untuk pertama kalinya pada musim ini kepada Messi," demikian tulis *Marca.com*.

Messi tidak pernah istirahat sejak memutuskan bertahan di Barcelona dan kembali berlatih di bawah asuhan Ronald Koeman. Ia selalu bermain 90 menit baik di La Liga maupun Liga Champions. Bila dijumlahkan, pemain 33 tahun itu sudah memperoleh waktu bermain 720 menit pada dua bulan pertama musim ini. Namun, jumlah itu tidak terhitung dengan waktu bermainnya bersama Timnas Argentina pada awal Oktober.

Sejak pulih dari cedera otot pada Oktober 2019, Messi hanya absen pada dua laga resmi Barcelona masing-masing di Copa del Rey dan di Liga Champions. Selebihnya, pemain nomor 10 itu selalu bermain penuh. Karena itu, Koeman berpikir untuk memberi waktu istirahat kepada Messi guna menjaga kebugarannya. Apalagi, Messi akan kembali bergabung dengan Timnas Argentina pada akhir November dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin melawan Paraguay dan Peru.

Istirahat

Bila Messi diberi waktu istirahat, maka Koeman akan mengandalkan para pemain muda di lini depan yang dipimpin Antoine Griezmann. Dia akan didampingi oleh Ansu Fati, Pedri, Francisco Trincao atau Ousmane Dembele di lini depan. Para pemain muda ini harus bisa menunjukkan kapasitasnya mengatasi kebuntuan di lini depan Barcelona. Sebab salah satu krisis yang dialami Barcelona adalah ketidakmampuan mereka mencetak gol karena penyelesaian akhir yang kurang klinis.

Pada laga akhir pekan lalu melawan Alaves, misalnya, mereka memiliki 25 tendangan ke gawang, tetapi hanya satu yang menjadi gol. Sebanyak 16 tendangan lainnya keluar dari sasaran. Begitu juga saat *El Clasico* satu minggu sebelumnya.

Barcelona melepas 10 tendangan tetapi sebagian besar melebar dan meninggi di atas mistar gawang. Saat kalah dari Getafe, enam dari tujuh tendangan Barcelona ke gawang lawan juga tidak menemui sasaran. Begitu juga saat melawan Sevilla.

Kurang klinisnya lini depan Barcelona berdampak pada semua pemain Barcelona, tidak hanya Lionel Messi atau para penyerang lainnya. Namun, di antara mereka yang paling banyak dikritik adalah Antoine Griezmann. Maka tugas berat Koeman adalah bagaimana membuat para penyerang ini lebih klinis dalam penyelesaian akhir, termasuk saat melawan Dynamo Kiev. [Marca.com/ESPN/Uefa.com/A-21]

11 Pemain Inti Ajax Terserang Covid-19

[AMSTERDAM] Ajax kehilangan 11 pemain inti menjelang laga melawan Midtjylland pada pertandingan ketiga Grup D Liga Champions Rabu (4/11) dini hari WIB tadi di Herning, Denmark, setelah mereka dinyatakan positif terpapar Covid-19. Demikian dilaporkan *RTL* pada Senin (2/11) waktu setempat.

Ajax dijadwalkan ke Denmark pada Senin (2/11) untuk menantang tuan rumah Midtylland. Hanya 17 orang pemain yang bisa dibawa. Klub raksasa Belanda itu tidak mengumumkan ke-11 pemain mereka yang dinyatakan positif perpapar virus *corona*. Namun, kapten Dusan Tadic, penjaga gawang Andre Onana, dan gelandang Davy Klaasen, serta Ryan Gravenberc dipastikan akan turun sejak menit pertama pada laga ketiga Grup D itu.

Meski kekurangan pemain, Ajax diwajibkan tetap menjalani laga ini. Sebab menurut aturan UEFA, sebuah klub wajib memainkan pertandingan bila masih ada 13 atau lebih pemain yang siap tanding. Karena itu, meski kondisi compang camping, Ajax tetap terbang ke Herning, Denmark. Padahal, mereka butuh kekuatan penuh untuk mencuri tiga poin pada laga ini.

Ajax baru mengantongi satu poin di Grup D hasil dari dua laga. Mereka tertinggal lima poin dari Liverpool di puncak grup dan tiga angka dari Atalanda di posisi kedua. Sementara Midtjyllan menjadi juru kunci Grup D setelah selalu kalah pada dua laga terakhir. Hanya dua tim teratas yang akan lolos ke fase *knock out*.

Empat Orang Positif

Sementara itu, otoritas sepakbola Inggris membenarkan bahwa ada empat orang dinyatakan positif terpapar virus *corona*. Hanya saja, nama-nama mereka tidak diumumkan ke publik. Pemerintah Inggris juga tetap mengizikan sepakbola dan cabang-cabang olahraga elite lain tetap bergulir selama empat pekan ke depan di tengah kebijakan pemerintah untuk melakukan *lockdown ulang*.

Sebanyak 1.466 orang pemain dan staf klub melakukan tes virus *corona* antara Senin (26/10) hingga Minggu (1/11) lalu. Hasilnya diumumkan pada Senin (2/11) malam waktu setempat. Disebutkan, ada empat orang dinaytakan positif, tetapi nama-nama mereka dirahasiakan. Mereka diwajibkan menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. [ESPN/Sky Sports/A-21]

Dele Alli Diharapkan Kembali ke Permainan Terbaik

[LONDON] Pemain Tottenham Hotspur, Eric Dier mengatakan, nasib temannya Dele Alli di Tottenham Hotspur berada di tangan dia sendiri. Meski demikian, sebagai teman, Dier akan terus membantu dan mendukungnya guna merebut kembali tempat di tim utama pasukan Jose Mourinho.

Dele Alli kehilangan tempat di tim utama sejak awal musim ini. Bahkan sejak kedatangan mantan pelatih Chelsea dan Manchester United itu, Dele Alli tidak lagi menjadi pemain penting seperti ketika Mauricio Pochettino memimpin di Tottenham Hotspur Stadium. Situasi ini membuatnya sempat disebut-sebut hendak pindah ke klub lain pada jendela transfer musim panas 2020 lalu.

Pada musim ini, Dele Alli baru bermain sejak awal pada tiga laga musim ini, termasuk saat kalah 0-1 dari Antwerpen pada ajang Liga Europa pertengahan pekan lalu. Penampilannya yang jelek, meski tidak disebut secara langsung oleh Mourinho, menjadi salah satu penyebab kekalahan itu. Hal itu sangat jelas dari pernyataan Mourinho setelah pertandingan. "Itu makanya saya tidak memainkan mereka," kata Mourinho saat itu.



AFP/PAUL ELLIS

Dele Alli

Adapun Dier terus mendukung Dele Alli untuk mengembalikan permainan terbaiknya. Sebab, pemuda 24 tahun itu masih menjadi salah satu gelandang muda terbaik di Eropa. "Dele memiliki kapasitas. Kami semua tahu kualitasnya dan apa yang dia berikan sebagaimana sudah ditunjukkannya pada masa lalu. Namun, semuanya tergantung dia sendiri. Dia harus berusaha dan bekerja keras serta memiliki komitmen tinggi. Saya yakin dia akan melakukannya. Semuanya tergantung dia sendiri. Secara pribadi, kami semua ingin tampil. Hanya saja tim ini sangat besar dan memiliki jumlah pemain yang tidak sedikit. Kami harus bersaing dan memperlihatkan permainan terbaik bila ingin dimainkan," kata Dier.

Leicester Menang

Sementara dari pertandingan Liga Utama Inggris di Elland Road, tuan rumah Leeds United menyerah 1-4 atas Leicester City. Dua dari empat gol kemenangan tim tamu diborong Youri Tielemans pada menit ke-21 dan 90+1. Dua gol lainnya masing-masing disumbangkan Harvey Barnes ketika laga baru berjalan 2 menit dan Jamie Vardy pada menit ke-76. Tuan rumah sempat memperkecil ketinggalan pada menit ke-48, lewat Stuart Dallas.

Tiga poin dari laga ini mengangkat Leicester City naik ke peringkat dua klasemen sementara dengan 15 poin, satu angka di belakang Liverpool. Mereka menggusur Tottenhmham Hotspur ke posisi ketiga, setelah selama sehari sebelumnya menguasai peringkat kedua. "Saya kira anak-anak asuh saya bermain brilian sekali. Secara taktis kami sangat disiplin dan kemudian melancarkan serangan ketika menguasai bola," kata pelatih Leicester City Brendan Rodgers. [Sky Sports/ESPN/A-21]

Jalur Puncak Dua Dilanjutkan, Masalah Dana Jadi Kendala

[BOGOR] Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0621 membuka lahan Jalur Poros Tengah Timur atau Puncak Dua sepanjang 1,1 kilometer (km) dari seluruh panjang jalan 56,25 km. Jalur Puncak Dua yang mangkrak sejak 2015 ini akan melintasi Kabupaten Bogor menyambung hingga Kabupaten Cianjur.

Sepanjang 48,5 km berada di Kabupaten Bogor melintas di lima kecamatan, seperti Babakan Madang, Citeureup , Sukamakmur, Tanjungsari, dan Cariu. Sementara, 8 km berada di Kabupaten Cianjur melintasi Kota Bunga, Cipanas, Cianjur.

Kepala Bidang Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Lestiana Irmawati menuturkan, berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati dan TNI akan dibuka kembali Jalur Puncak II sepanjang 1,1 km dengan masa pengerjaan 50 hari.

"Dengan membuka lahan baru itu, total pengerjaan yang telah dibuka sudah sekitar 13 km dari rencana 48 km," kata Irma.

Dikatakan, setelah dibuka diharapkan jalur yang menyambungkan wilayah Sukamakmur, Tanjungsari, dan Cariu bisa terakses kembali. Setelah dibuka, untuk pengerjaan pengerasan dan pengaspalan pun Pemkab Bogor masih membutuhkan dukungan dana dari pemerintah pusat.

"Anggaran untuk pembukaan lahan itu Rp 5 miliar, jalan yang dibuka 1,1 km dengan lebar 30 meter. Hanya untuk akses daerah sekitar yang sempat terputus agar bisa digunakan kembali," ujar Irma.

Dia menjelaskan, lebar jalan 30 meter yang akan dibuka. Badan jalan menghabiskan lebar 18 meter, 10 meter untuk *green belt* dan 2 meter drainase.

"Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh pemerintah pusat ya. Karena jika menggunakan APBD, tidak akan cukup kita sudah estimasi dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di sini sekitar Rp 1,3 triliun," kata dia.

Dandim 0621/Kabupaten Bogor, Letkol Inf Sukur Hermanto menargetkan pembukaan jalan ini rampung dalam 50 hari ke depan. Cukup singkat, pasalnya TNI lebih banyak menggunakan alat berat, dibanding tenaga prajurit.

"Tenaga manusia hanya untuk operator alat berat, pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kurang lebih personel yang dikerahkan 50 orang," kata Letkol Sukur.

Dia berharap, selama pengerjaan cuaca selalu mendukung. Setiap sore hari hujan terus mengguyur Bogor belakangan ini. "Kalau hujan kami berhenti dulu, karena berbahaya kalau diteruskan. Itu saja kendalanya soal cuaca," kata dia.



ISTIMEWA

Jalur Poros Tengah Timur atau Puncak Dua sepanjang 56,25 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan kawasan Kota Bunga Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Bantuan Pusat

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengungkapkan, untuk melanjutkan pembangunan, Jalur Puncak Dua perlu dikaji ulang. Pasalnya, kondisi lahan yang ada telah mengalami banyak perubahan pasca pembangunan terhenti pada 2015 lalu.

"Karena sudah lama ya. Jalan yang sudah dibangun juga banyak yang rusak lagi. Karena kondisi alam, belum lagi ada longsoran-longsoran yang terjadi," katanya.

Namun, dia berharap pemerintah pusat maupun provinsi kembali menganggarkan pembangunan Jalur Puncak Dua. Untuk membangun fisik, pemda terbentur anggaran.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappedalitbang Bogor Ajat R Jatnika menjelaskan, pemerintah pusat saat ini lebih memprioritaskan membenahi Jalan Raya Puncak daripada membangun Puncak Dua.

Adapun pembangunan jalan yang kerap disebut Poros Tengah Timur itu sempat dianggarkan Rp 800 miliar. Pembangunan pun sempat dilakukan sepanjang 12 kilometer dari total keseluruhan yang direncanakan 56,25 kilometer.

"Tapi di tengah jalan, skala prioritas terhenti. Ini yang sedang kami cari jalan keluarnya. Prioritas pusat masih ke Jalan Raya Puncak mungkin sampai 2020. Setelah itu pada 2021 kita belum tau prioritas selanjutnya apa," kata Ajat.

Alternatif pembiayaan pembangunan antara lain dengan bekerja sama dengan badan usaha dan sedang disuarakan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, kerja sama dengan swasta tentu harus saling menguntungkan dan ini yang sedang diperhitungkan Pemkab Bogor.

"Karena sangat besar, kami cari model pembiayaan dengan kerja sama badan usaha, tapi harus saling menguntungkan," katanya.

Masalahnya, kata Ajat, kerja sama yang saling menguntungkan ini belum mencapai titik temu. Opsi menjadikan Jalur Puncak Dua sebagai tol kemudian mengemuka. Namun, Pemkab Bogor berharap adanya jalan arteri di bawah jalur itu jika memang pada akhirnya opsi tol yang diambil.

Ajat menuturkan, Jalur Puncak Dua merupakan jalan strategis Provinsi Jawa Barat. Dari situ, muncul kesepakatan Pemkab Bogor mengurusi lahan dan pembangunan infrastruktur menjadi urusan pemerintah pusat lewat Pemprov Jabar. [VEN/H-12]

31.273 UMKM Tangerang Daftar Program BPUM *Online*

[TANGERANG] Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang mendata 31.273 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah mendaftar secara *online* melalui aplikasi Sabakota untuk ikut dalam Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kementerian Koperasi dan UKM.

"Hingga siang ini tercatat ada 31.273 pelaku yang mendaftar secara *online*. Datanya masih akan bertambah setiap hari karena waktu pendaftaran masih dibuka," kata Kepala Bidang UKM Kota Tangerang Katrina Iswandari di Tangerang, Selasa (3/11).

Perlu diketahui jika pendataan pelaku UMKM program BPUM dilakukan secara *online* melalui tautan *sabakota.tangerangkota.go.id* atau fitur Sabakota di aplikasi Tangerang LIVE. Hal ini dilakukan setelah ada peristiwa kerumunan orang saat pendaftaran dilakukan secara langsung di kantor dinas.

Katrin mengatakan meski dilakukan secara *online* namun antusias masyarakat yang mendaftar tetap banyak. Hal tersebut terlihat dari jumlah yang tercatat setiap harinya sejak pertama kali dibuka.

Harapannya program BPUM ini dapat membantu pelaku UMKM untuk tetap bisa mengembangkan usaha di masa pandemi. "Kami imbau kepada pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan program yang ada ini," katanya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menjelaskan Pemkot telah melakukan penjadwalan bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan program insentif UMKM dari Pemerintah Pusat berdasarkan domisili tempat tinggal.

"Sekali lagi, pendataan hanya bagi masyarakat yang mempunyai usaha dan termasuk ke dalam kategori usaha mikro yang sebelumnya belum terdata," kata Wali Kota Arief dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, sekitar 146.390 orang warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menerima BPUM yang disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

"Sampai akhir pekan lalu data total penerima di kita sudah mencapai 146.390 orang," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno di Cikarang.

Realisasi

Nyumarno menjelaskan 91.446 orang dari total 146.390 penerima bantuan tersebut merupakan realisasi usulan desa melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi.

"Ada juga 43.153 orang dari pintu PNM, 5.200 orang dari usulan BRI, Pegadaian 6.483 orang, Koperasi 101 penerima, PIP lima orang, dan BWM dua orang," katanya.

Dia mengatakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi awalnya menerima 136.209 data penerima BPUM yang diusulkan masyarakat melalui desa dan kelurahan.

Usulan penerima itu selanjutnya diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM sebagai data calon penerima manfaat bantuan.

"Tetapi tidak semua lolos di kementerian. Berdasarkan informasi hasil penyaringan data di kementerian, 91.446 penerima yang akan direalisasikan dari total 136.209 usulan pemerintah daerah," ujarnya.

Nyumarno memperkirakan jumlah penerima BPUM yang diusulkan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi akan terus bertambah seiring kebijakan perpanjangan usulan tambahan penerima dari kementerian terkait hingga November 2020.

"Dan ini pun sudah ditindaklanjuti Pemkab Bekasi melalui Surat Sekda Kabupaten Bekasi ke seluruh camat agar para kepala desa dan lurah mengusulkan usulan tambahan calon penerima BPUM," katanya.

Menurut dia pemerintah hingga saat ini terus berupaya menggenjot daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 bisa terus tumbuh positif.

Program BPUM ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam membantu permodalan pelaku usaha. Dia berharap bantuan bisa digunakan dengan bijak khususnya dalam pengembangan usaha. [Ant/CF/H-12]



ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA

Pengrajin menyelesaikan perabot berbahan rotan di Pasar Minggu, Jakarta, belum lama ini.

Instrumen Penting Pilkada Depok Tiba di Gudang KPU



SP/BHAKTI HARIANI

Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna saat meninjau kedatangan logistik Pilkada Depok 2020 di Gudang KPU Kota Depok, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11).

[DEPOK] Logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 2020 mulai berdatangan, Selasa (3/11). Logistik, salah satu instrumen penting dalam pilkada, yang tiba pertama di Depok, adalah kotak suara.

Kotak suara sebanyak 4.049 buah tersebut tiba sekitar pukul 11.20 WIB di Gudang KPU Kota Depok di Kubik Logistik, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis.

Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna mengatakan, saat ini selain melakukan rekrutmen anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), KPU juga tengah fokus kepada tahapan logistik. Tahapan ini juga merupakan tahapan krusial yang memerlukan perhatian secara khusus.

Dikatakan Nana, logistik pemilihan merupakan salah satu instrumen penting tahapan dalam penyelenggaraan pilkada yang tidak boleh diremehkan. Seperti penyelenggaraan saat ini, lanjut Nana, pilkada sejatinya adalah kontestasi demokrasi, mencari dan memilih pemimpin dengan mekanisme pemberian hak suara oleh para pemilih.

"Mekanisme memilih ini terekam dan teradministrasikan melalui logistik. Jadi, logistik pilkada memiliki peran yang penting dalam suksesi kontestasi disamping instrumen tahapan yang lain," tutur Nana.

Diungkapkan Nana, sejak awal KPU Kota Depok telah mempersiapkan dan merencanakan pengelolaan logistik pilkada ini dengan standar operasional prosedur .

"Kami mengedepankan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas, sehingga dalam pelaksanaan pilkada tidak dijumpai hambatan dan kendala mengenai logistik pemilihan, sampai dengan semua tahapan pilkada selesai," kata Nana.

Selain kotak suara, dalam waktu dekat, KPU juga akan menerima logistik berupa bilik, segel, hologram, sampul dan lain sebagainya. "Kami terus tetap mengupayakan pengelolaan logistik ini dapat terlaksana dengan baik, transparan, dan akuntabel," ujar Nana.

Tertinggi

Sementara itu, KPU Tangerang Selatan akhirnya mengumumkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dari ketiga calon wali kota Tangsel pada Pilkada 2020. Laporan diberikan pada Sabtu (31/10).

Paslon nomor urut 1, Muhammad-Rahayu Saraswati melaporkan sumbangan dana kampanye sebanyak Rp 1,3 miliar. Jumlah dana tersebut berasal dari sumbangan pribadi calon mencapai Rp 350 juta dan perseorangan mencapai Rp 1 miliar.

Paslon nomor urut 2 Siti Nur Azizah-Ruhamaben melaporkan sunbangan dana kampanye sebesar Rp1,3 miliar. Seluruh sumbangannya bersumber dari dana pribadi calon.

Adapun paslon petahana, nomor urut 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan melaporkan sumbangan dana kampanyenya yang mencapai Rp 1 miliar. Sumbangan dana kampanye bersumber dari perseorangan.

Ketua KPU Tangsel, Bambang Dwitoro menyatakan, ada tiga jenis pemberi sumbangan dana kampanye, yakni sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok atau perusahaan, dan sumbangan pribadi.

Tiap kegiatan atau aktivitas yang menggunakan uang, ujarnya, harus dicatat dan dilaporkan kepada KPU Tangsel. Semua harus detail disampaikan dalam bentuk laporan penerimaan sumbangan dana kampanye.

"Nanti tahap ketiga ada yang namanya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang juga harus disampaikan kepada KPU. Itu untuk bukti bahwa uang sumbangan tersebut benar digunakan dalam kegiatan kampanye," tandasnya. [RIA/CF/W-11]

Tanggulangi Covid, DKI Rekrut 1.545 Orang

Perda Protokol Kesehatan Bekasi Segera Dituntaskan

[JAKARTA] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuka rekrutmen relawan untuk penanggulangan Covid-19. Relawan tersebut nantinya ditugaskan sebagai pelacak kontak (*contact tracer*) dan petugas data (*data manager*).



BERITASATU PHOTO/MOHAMMAD DEFRIZAL

Relawan membagikan masker saat kampanye di kawasan Stadion Utama GBK (Gelora Bung Karno) Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, relawan yang dibutuhkan sebanyak 1.545 orang yang akan menjalankan tugas sampai akhir Desember 2020.

"Untuk pendaftaran relawan tersebut dapat dilakukan dengan mengisi formulir, mengunggah ijazah terakhir, dan surat keterangan sehat paling lambat 4 November pukul 23.59 WIB," kata Dwi, Selasa (3/11).

Adapun pendaftaran relawan pelacak kontak dapat diakses melalui tautan http://bit.ly/PendaftaranTenagaTracerCovid19DKI. Sedangkan untuk relawan petugas data melalui http://bit.ly/PendaftaranDataManajerCovid19DKI.

Hasil seleksi akan diumumkan melalui kanal resmi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada 6 November 2020. Relawan akan ditempatkan di masing masing Puskesmas selama delapan jam kerja per hari.

Persyaratan untuk pelacak data minimal lulusan D III bidang kesehatan hingga dapat mengoperasikan aplikasi di ponsel. Untuk petugas data tingkat kota ataupun kabupaten minimal S2 bidang kesehatan dan diutamakan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) epidemiolog kesehatan.

"Relawan pelacak kontak dan petugas data yang terpilih akan menjalankan tugas sampai akhir bulan Desember, dengan mendapatkan insentif sebesar Rp 360 ribu per hari," katanya.

Pada September lalu, Pemprov DKI Jakarta juga merekrut 1.173 relawan medis untuk menangani pandemi Covid-19. Para relawan ini mendapatkan gaji per bulan sesuai dengan bidang profesinya. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengungkapkan para relawan ini digaji menggunakan APBD DKI Jakarta. Ketentuan mengenai gaji ini menurutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 392 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

"Sesuai KMK 392/2020, semua tenaga profesional akan dibayar menggunakan APBD DKI Jakarta, dengan rincian dokter spesialis 15 juta perbulan, dokter umum Rp 10 juta per bulan, perawat Rp 7,5 juta per bulan, tenaga penunjang Rp 5 juta per bulan, dan penunjang lainnya Rp 4,2 juta per bulan," kata Widyastuti.

Adapun perincian tenaga kesehatan yang menjadi relawan di antaranya dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis anak, dokter umum, perawat dan bidan. Kemudian, tenaga penunjang kesehatan di bidang radiografer, pranata laboratorium, penyuluh kesehatan, dan surveilans. Para relawan medis itu bertugas di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Jakarta.

Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini melakukan tes PCR sebanyak 6.398 orang untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 617 positif dan 5.781 negatif.

"Untuk *rate* tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 122.409. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 51.067," kata Dwi.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 418 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 8.644 orang yang masih dirawat atau isolasi. Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 107.846 kasus.

"Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 96.902 dengan tingkat kesembuhan 89,9%, dan total 2.300 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2,1 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4 persen," katanya.

Sanksi

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menuntaskan peraturan daerah (Perda) mengenai penerapan sanksi protokol kesehatan pada November ini.

"Dalam waktu dekat ini bakal segera diterbitkan di Kabupaten Bekasi. Peraturan daerah tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi," kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi Suryo Pranoto di Cikarang, Selasa.

Suryo mengatakan sudah melakukan pembahasan awal mengenai rencana peraturan daerah tersebut dan pihaknya segera membentuk panitia khusus untuk menindaklanjutinya.

"Kita dari Bapemperda sudah rapat. Raperda inilah yang akan kita bahas. Sambil kita tunggu naskah akademiknya baru kita sampaikan ke Badan Musyawarah," katanya.

Menurut dia Perda penerapan sanksi protokol kesehatan perlu segera diterbitkan di Kabupaten Bekasi terlebih gubernur dan bupati sudah mengeluarkan peraturan dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub) dan peraturan bupati (Perbup).

"Satpol PP sedikit kesulitan kalau ada pelanggar. Misalnya tidak pakai masker, tidak bisa mengatur jarak, mereka tidak bisa dengan mudah menerapkan sanksinya. Jadi di Perda ini akan dibuat sanksinya. Jadi kalau ada perdanya akan lebih kuat," imbuh dia.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sejak beberapa bulan lalu sudah menerapkan kebijakan PSBB hingga Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Razia penggunaan masker juga sudah dilakukan selama penerapan kebijakan. "Akan lebih kuat jika payung hukumnya Peraturan Daerah langsung," ungkapnya.

Selama pelaksanaan kebijakan PSBB dan PSBM bahkan ditemukan ratusan warga yang terbukti melanggar protokol kesehatan namun masyarakat yang kedapatan melanggar hanya dikenakan sanksi sosial atau denda maksimal Rp 250 ribu. [Ant/H-14]

Keterisian Hotel untuk Pasien Tanpa Gejala Hanya 21%

Depok Kembali Lobi Wisma Makara

[JAKARTA] Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa keterisian kamar hotel untuk kebutuhan isolasi pasien positif Covid-19 dengan kategori orang tanpa gejala (OTG) hanya 21 persen.

Persentase keterisian tersebut berada di tiga hotel yang tersedia menjadi tempat isolasi pasien OTG, yakni Ibis Style di Mangga Dua, (Jakarta Utara), U Stay Hotel di Mangga Besar (Jakarta Barat) dan Ibis Senen di Jakarta Pusat. "Tempat-tempat isolasi hotel itu tingkat keterisiannya hanya 21 persen sekarang. Kita bersyukur bahwa angka kasus positifnya menurun," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/11).

Dia menyebutkan bahwa tingkat keterisian tempat tidur bagi pasien OTG di hotel pernah mencapai 60 persen, tapi kini hanya 21 persen. "Pernah mencapai lebih dari 60 persen, saat ini hanya 21 persen," katanya.

Di samping itu, kata Anies, mengenai kapasitas keterisian ruang rawat inap isolasi pasien Covid-19 di Jakarta sebesar 55 persen, sedangkan untuk ICU sebanyak 58 persen. "Tentu kami *enggak* berharap ini melonjak tapi kami pastikan bahwa kapasitasnya ada," tutur Anies.

Dia mengharapkan kasus Covid-19 di Jakarta ini tak mengendorkan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Jadi kita waspada dan kepada seluruh masyarakat tetap menggunakan masker di manapun kapanpun dan tetap jaga jarak dan cuci tangan teratur," katanya.

Berhenti

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menghentikan penggunaan The Green Hotel Bekasi sebagai tempat isolasi mandiri terpusat bagi pasien tanpa gejala. Hal ini lantaran kasus Covid-19 di Kota Bekasi selama Oktober ini sudah melandai. Jumlah kasus penularan Covid-19 di Kota Bekasi terus mengalami penurunan cukup signifikan tiap hari.

"Tidak diperpanjangnya The Green Hotel dikarenakan selama satu bulan belakangan ini, rata-rata okupansi di bawah 20 persen dari kapasitas hotel," ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Selasa.

Meski begitu, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan dibuka lagi hotel sebagai tempat untuk isolasi mandiri terpusat apabila terjadi kenaikan kembali kasus Covid-19.

Kini, Pemkot Bekasi hanya memaksimalkan Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi Selatan, yang digunakan sebagai fasilitas isolasi mandiri terpusat bagi pasien Covid-19 serta RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

"Kita terus berkomitmen untuk melakukan penanganan kasus Covid-19 secara maksimal. Baik dari fasilitas, tenaga medis atau kebutuhan lainnya selama pandemi belum berakhir," imbuhnya.

Satgas Penanggulangan Covid-19 Depok kembali melobi Wisma Makara milik Universitas Indonesia untuk dijadikan tempat isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan Covid-19 di Depok.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan pihaknya kembali melakukan pendekatan dengan Wisma Makara. Sebelumnya, Wisma Makara telah menarik diri sebagai tempat isolasi mandiri dan belakangan menyatakan kesediaannya. "Iya, jadi ini masih dalam proses pendekatan dan diintensifkan kembali karena terkait nomenklatur itu yang sempat jadi masalah," ujar Dadang di Depok, Selasa (3/11).

Dijelaskan, sebelumnya ada kendala nomenklatur pada nama Wisma Makara UI yang masih menggunakan kata wisma. Sedangkan dari Satgas Pusat mengharuskan hotel bintang dua atau tiga. Meski fasilitas Makara memenuhi dan setara hotel bintang dua dan tiga namun penamaan kata wisma dan hotel inilah yang menjadi kendala.

"Sebenarnya hanya terkait administrasinya saja sih. Semoga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membolehkan terkait perbedaan nomenklatur ini," harap Dadang.

Dadang menuturkan, untuk Wisma Atlet milik Kostrad di Kecamatan Cilodong hingga kini belum ada kabar menjanjikan dan masih sebatas pembicaraan. Untuk hotel swasta yang berlokasi di Jalan Raya Margonda yang sempat muncul ke permukaan akan digadang menjadi lokasi isolasi mandiri juga telah dilakukan survey. [RIA/YUS/160]



SP/MIKAIL NIMAN

The Green Hotel Bekasi sudah dihentikan sebagai tempat isolasi mandiri terpusat bagi pasien tanpa gejala di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kota Depok Jadi Zona Oranye

Wilayah Zona Kuning Bertambah

[DEPOK] Kota Depok kembali ke zona oranye untuk penyebaran Covid-19. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana.

"Sudah diumumkan pusat. Skor kita di Depok 1,9 dan ada di zona oranye. Tapi kita tetap harus waspada dan tak boleh lengah serta harus tetap disiplin menerapkan 3M," kata Dadang di Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11).

Sedangkan untuk kewaspdaan setelah liburan panjang, Dadang mengatakan tetap dipantau pemantauan apakah terjadi lonjakan kasus positif atau tidak baru dapat terlihat satu minggu ke depan dari sekarang. "Kami berharap tidak ada lonjakan, ya. Semoga saat liburan kemarin, warga Depok tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan," tutur Dadang.

Hingga saat ini, lanjut Dadang, kapasitas peningkatan swab test di Kota Depok masih normal karena pelaksanaan swab test di kota ini sudah sesuai dengan standar tes Covid-19 oleh WHO. "Saat ini kondisinya semua kondusif. Puskesmas bergerak seperti biasa. Jadwal swab test tetap berlangsung seperti biasa sesuai jadwal di masing-masing pelayanan kesehatan," pungkas Dadang.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, Pemerintah Kota Depok telah melakukan swab test setiap minggunya dengan perbandingan 1:1.000. "*Swab test* Depok sudah lebih dari standar WHO, jadi, akumulasinya kalau ditanya apakah sudah lewat dari 1% dari populasi penduduknya, sudah," papar Ridwan Kamil.

Kang Emil, sapaan akrabnya menuturkan bahwa Kota Depok dapat meningkatkan jumlah warganya melakukan *swab test* minimal 2.400 per minggunya. "Jadi, untuk Depok itu minimal 2.400 per minggunya, itu yang sedang kami kejar tapi harusnya bisa ya karena kalau dilihat dari kapasitasnya sangat mendukung," tutur Kang Emil.



ANTARAFOTO/ ASPRILLA DWI ADHA/AWW.

Seorang badut menggunakan alat pelindung wajah ("face shield") saat menghibur di acara ulang tahun di Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita mengatakan, dalam satu hari Pemkot Depok bisa melakukan swab test PCR sebanyak 360 spesimen per hari. Jika dikalikan satu minggu makan tercapai angka 2.520 per minggu. Jumlah ini sudah berada di atas angka standar WHO. Jumlah penduduk Kota Depok saat ini adalah 2,4 juta.

Sementara itu, Satgas Kota Depok juga merilis data perhitungan terbaru zona risiko di wilayah kecamatan di Kota Depok. Kecamatan zona kuning atau zona risiko rendah kini bertambah satu yakni Kecamatan Cimanggis. Totalnya kini ada dua kecamatan zona kuning di Depok yakni Cimanggis dan sebelumnya adalah Cinere.

Dadang Wihana mengatakan dari total 11 kecamatan di Depok, dua kecamatan kini berada di zona kuning yang merupakan zona risiko rendah. Sedangkan sembilan kecamatan lainnya berada di zona oranye atau zona risiko sedang yakni Kecamatan Pancoran Mas, Sukmajaya, Beji, Cipayung, Cilodong, Tapos, Limo, Sawangan, Bojongsari.

Sedangkan untuk zonasi risiko wilayah kelurahan, lanjut Dadang, dari total 63 kelurahan se-Kota Depok terdapat lima kelurahan zona kuning yaitu Pangkalanjati, Pondok Cina, Pasir Gunung Selatan, Mekarsari dan Cilodong. 50 kelurahan berada pada zona risiko sedang atau oranye dan delapan kelurahan berada pada zona risiko tinggi atau merah.

"Untuk kelurahan zona merah berjumlah delapan kelurahan yakni Kedaung, Cinangka, Duren Mekar, Pengasinan, Tanah Baru, Beji, Kemirimuka dan Sukamaju Baru," ujar Dadang di Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11).

Dadang menuturkan, untuk kecamatan dan kelurahan zona kuning dan oranye, Satgas Penanganan Covid-19 akan terus melakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan sehingga zona risiko wilayah bisa terus ditingkatkan. "Sedangkan untuk wilayah yang termasuk zona merah, kami minta agar ekstra waspada dan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan melalui optimalisasi RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS)," kata Dadang. [RIA/H-12]

Terbaik Tangani Covid-19, Kota Bekasi Terus Sosialisasikan Penerapan 3M



SP/MIKAEL NIMAN

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menempatkan Kota Bekasi peringkat pertama penanganan Covid-19 terbaik di Jawa Barat.

[JAKARTA] Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menempatkan Kota Bekasi pada peringkat pertama dalam penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Barat.

Penanganan Covid-19 melalui *testing, tracing, treatment*, pencegahan, tata kelola, dan kapasitas rumah sakit yang dilakukan selama ini membuahkan hasil.

Selain Kota Bekasi, peringkat kedua dan berikutnya ditempati Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kota Cirebon.

"Penanganan Covid-19 memang terus kita lakukan, seperti *tracing* ke anggota keluarga pasien atau lingkungan sekitar pasien. Hal itu agar mendapatkan hasil tercepat, sehingga tidak adanya klaster baru," ujar Ketua Satgas Covid-19 Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Selasa (3/11).

Ke depan, Pemerintah Kota Bekasi, bersama Polrestro Bekasi Kota dan Kodim 0507/Kota Bekasi yang terus menerus menyosialisasi 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), sehingga masyarakat terus mematuhi kewajiban protokol kesehatan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bertekad mempertahankan predikat Kabupaten Sehat yang diraih 2019 berkat pelaksanaan program-program untuk mewujudkan daerah yang bersih, aman, nyaman, dan sehat menuju Indonesia Sehat.

"Tentu saja ini menjadi komitmen kami untuk mewujudkan kabupaten sehat. Ini penting, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang kesehatan merupakan hal yang utama," kata Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Pemkab Bekasi pada 2019 menerima penghargaan Swasti Saba Padapa dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri bersama 177 pemerintah kabupaten dan kota lain serta enam pemerintah provinsi.

Eka mengatakan, Pemkab Bekasi ingin mempertahankan prestasi tersebut dalam ajang penghargaan dua tahunan Swasti Saba berikutnya.

"Tidak hanya sekadar penghargaan, tetapi bagaimana kita benar-benar mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat," katanya.

Dalam upaya mewujudkan daerah yang sehat, menurut dia, Pemkab Bekasi antara lain mengalokasikan dana untuk pembangunan toilet sehat di sekolah-sekolah dasar dan sekolah-sekolah menengah pertama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2020.

Berdasarkan data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah sedang membangun toilet di 488 sekolah dengan alokasi dana Rp 98 miliar. Proyek pembangunan toilet sekolah itu ditargetkan selesai pertengahan Desember 2020.

"Jadi ini sebagai salah satu bentuk komitmen mendukung program KKS atau kabupaten kota sehat. Total ada 488 sekolah yang WC atau toiletnya dibangun," kata Kepala Bidang Bangunan Negara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro.

Ia mengatakan, pemerintah kabupaten akan membangun dua ruang toilet, dua urinoar, tempat wudu, serta tujuh wastafel di setiap sekolah.

"Lima wastafel di antaranya mengusung konsep *new normal* dengan menggunakan teknik keran injak. Wastafel ini bukan cuma dipasang di toilet, tetapi juga di sekitar area sekolah. Jadi sebelum masuk sekolah, para siswa cuci tangan dulu," katanya.

Selain itu, ia mengatakan, pemerintah daerah menyediakan dua sistem penyimpanan air yang terdiri atas *ground water tank* berkapasitas 1.000 liter dan *water torn* dengan kapasitas 1.050 liter.

"Sementara untuk kelancaran distribusinya kita akan gunakan dua unit pompa air," katanya. [160]

Polisi Tembak Begal Sepeda

4 Pelaku di Bawah Umur

[JAKARTA] Polda Metro Jaya dan Polres jajaran, mengungkap enam kasus begal sepeda serta menangkap 10 pelaku, di Jakarta dan sekitarnya. Dua begal ditembak kakinya karena melawan petugas.



ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana (kedua kanan) didampingi Kabid Humas Kombes Pol Yusri Yunus (ketiga kanan) berdialog dengan para tersangka begal pesepeda di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (3/11). Polda Metro Jaya berhasil mengungkap enam kasus begal pesepeda periode September hingga November 2020 dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, tren penggunaan sepeda sebagai sarana berolahraga sangat meningkat. Seiring hal itu, peristiwa begal sepeda pun marak. Berdasarkan data, September sampai November 2020, tercatat ada 12 laporan polisi terkait begal sepeda.

Merespons maraknya kasus begal sepeda yang sangat meresahkan masyarakat itu, Nana menyampaikan, Polda Metro Jaya dan Polres jajaran membentuk tim khusus untuk melakukan tindakan preemtif, preventif, dan represif. Terkait tindakan represif, jajaran reserse kriminal telah melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap 12 laporan yang masuk.

"Selama 2 bulan ini, dari 12 laporan, kami ungkap enam TKP dengan tersangka berjumlah 10 orang. Beberapa TKP lain kami sedang melakukan pengejaran, kami sudah melakukan *profiling*, dan dalam waktu dekat insyaallah ada beberapa lagi akan kami ungkap. Kami secara kontinu akan mengungkap, di samping itu kami akan melakukan upaya preemtif dan preventif untuk meminimalkan, mengurangi pesepeda menjadi korban begal itu," ujar Nana, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (3/11).

Dikatakan Nana, perihal tindakan preemtif polisi telah memberikan imbauan baik secara langsung kepada masyarakat melalui anggota lalu lintas hingga Bhabinkamtibmas. Termasuk, memasang spanduk-spanduk khususnya di jalan protokol seperti di Jalan Jenderal Sudirman, MH Thamrin, dan Kuningan yang selama ini rawan kasus begal sepeda.

"Kemudian untuk preventif, kami punya tim khusus fungsi Sabhara, kemudian Brimob kami kerahkan juga untuk preventif ini. Kemudian, anggota lalu lintas di samping mengatur lalu lintas kami kerahkan untuk melakukan patroli-patroli khususnya di lokasi yang rawan tadi," katanya.

Sepuluh tersangka yang ditangkap berinisial MA (16) pelaku begal sepeda di Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian SH (26) dan AR (41) -ditembak kakinya- pelaku di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat; BG (21) -ditembak kakinya-, beraksi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat; RN (22), MMAH (17), dan NY (15), beraksi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; ID (28) beraksi di Penjaringan, Jakarta Utara; dan MAS (20) serta SL (17), beraksi di Ciputat, Tangerang Selatan.

Motif tersangka melakukan pembegalan karena kebutuhan ekonomi. Sebab, rata-rata para pelaku adalah pengangguran. "Jadi untuk para pelaku, mereka dari 10 orang memang rata-rata pengangguran, ada juga yang masih di bawah umur 17 tahun. Sampai saat ini, mereka sifatnya perorangan, tidak ada kelompok-kelompok geng motor. Namun, kami akan dalami terkait masalah ini," jelasnya.

Nana mengungkapkan, modus para pelaku awalnya mengamati dan menentukan korbannya. Korban yang menjadi sasaran biasanya sendirian atau lepas dari kelompoknya.

"Mereka kuntit, biasanya ada yang menggunakan satu sepeda motor berboncengan, ada juga yang dua motor, jadi mereka berempat. Kalau dua motor, yang satu melewati dulu kemudian pura-pura berhenti. Selanjutnya yang belakang memepet, langsung mengambil atau merampas *handphone* yang ada atau tas. Mereka (korban) kadang-kadang menaruh di belakang atau di stang. Ini yang kemudian menyebabkan pesepeda terjatuh dan luka-luka," katanya.

Perihal waktu, Nana menuturkan, berdasarkan 12 laporan yang masuk, para pelaku biasanya bermain pada pagi hari pukul 06.00 hingga pukul 10.00 WIB.

"Ini tentunya menjadi perhatian kita semua. *Insyaallah* ke depan kami akan terus memperbanyak anggota kami di lapangan, khususnya di beberapa lokasi rawan," ucapnya.

Nana menegaskan, kepolisian serius menangani kasus begal sepeda dan akan mengungkap kasus-kasus lainnya. "Untuk penerapan pasal, para pelaku ini ada 10 orang, semuanya kita kenakan Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan), ancaman hukuman 9 tahun penjara," tandasnya.

Anggota Marinir

Polda Metro Jaya juga telah mengidentifikasi pelaku begal sepeda yang menyasar korban perwira Marinir Kolonel Pangestu Widiatmoko, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kini polisi sedang mengejar pelaku yang berjumlah empat orang itu.

"Kami serius mengungkap kasus ini. Kami sudah memprofiling dan sudah kami identifikasi, insyaallah dalam waktu dekat pelaku dengan korban anggota TNI ini akan kita tangkap," ujar Nana.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, penyidik sudah mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan rekaman CCTV sebelum, saat, dan sesudah kejadian.

"Kita identifikasi ada dua kendaran yang memang satu tugasnya memepet di depan, kemudian satunya lagi berupaya merebut *handphone* korban karena korban pada saat itu menaruh *handphone* di stangnya, sehingga korban jatuh," ungkapnya.

Yusri menyampaikan, ada empat pelaku yang sedang dikejar penyidik. "Kita sudah identifikasi pelakunya ada empat, sudah kita ketahui, kita masih melakukan pengejaran, mudah-mudhan segera tertangkap," katanya.

Diketahui, seorang perwira Marinir Kolonel Pangestu Widiatmoko, menjadi korban ketika bersepeda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sekitar pukul 06.45 WIB, Senin (26/10) lalu.

Berdasarkan informasi, korban dipepet bandit yang mengendarai dua sepeda motor. Kemudian, pelaku mencoba mengambil tas dan *handphone* yang dibawa korban. Mengetahui hendak dicuri korban berupaya mempertahankan tasnya, tetapi akhirnya terjatuh dan mengalami luka robek di pelipis kiri serta memar di bagian belakang. Pelaku kemudian langsung melarikan diri ke arah Jalan MH Thamrin. [BAM/W-11]

Kapolda: Begal Sepeda Fenomena Baru

[JAKARTA] Polda Metro Jaya mencatat, ada 12 laporan polisi terkait begal sepeda dalam kurun September hingga November 2020. Enam kasus terungkap, 10 tersangka telah ditangkap. Begal sepeda merupakan fenomena baru.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, kasus yang terjadi sebenarnya lebih banyak, tetapi tidak terdata karena korbannya enggan melapor.

Menurut keterangan para pelaku, mereka tidak hanya sekali menjalankan aksi begal sepeda, tetapi beberapa kali. Sementara, yang melapor baru 12 kasus.

"Saya yakin masih ada masyarakat yang menjadi korban belum melaporkan ke Kepolisian. Saya imbau, kepada masyarakat yang jadi korban untuk melaporkan. Karena dari data yang ada, hasil pemeriksaan mereka ini bukan hanya satu kali melakukan pembegalan, tetapi mereka beberapa kali. Saya harapkan kepada masyarakat supaya melaporkan ke kami, kepolisian mulai tingkat Polsek sampai Polda," ujar Nana, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (3/11).

Nana menuturkan, tindak kejahatan begal sepeda merupakan fenomena baru. Sebelumnya, kasus ini jarang sekali terjadi dan biasanya pelaku menyasar pengendara sepeda motor.

"Saat ini berkembang kasus pembegalan sepeda. Memang ini fenomena baru. Kalau dulu sasarannya pengendara motor. Sekarang sedang marak masyarakat berolahraga sepeda, nah ini sekarang sasarannya para pesepeda," tandasnya.

Nana menambahkan, masyarakat diimbau tidak bersepeda sendirian, tetapi berkelompok. Namun, tetap mengutamakan protokol kesehatan *physical distancing* pada masa pendemi Covid-19.

"Kemudian, hindari bersepeda malam hari. Suasana gelap juga akan memancing pelaku untuk melakukan aksi pembegalan itu," ungkapnya.

Nana melanjutkan, diharapkan masyarakat tidak membawa barang berharga saat berolahraga menggunakan sepeda. "*Handphone* ini memang dianggap barang berharga, sebaiknya tidak perlu membawa. Kalaupun harus membawa ditaruh tempat aman, jangan kelihatan oleh orang yang akan melakukan pembegalan," katanya.

Menurut Nana, kriminalitas terjadi karena bertemunya niat dan kesempatan. Karena itu pesepeda diharapkan meniadakan kesempatan agar tidak menjadi sasaran pelaku begal.

"Ada teori kriminalitas, terjadinya kriminalitas itu karena bertemunya N plus K. Bertemunya niat dan kesempatan. Sebenarnya kalau hanya niat saja, tetapi kesempatannya tidak mereka (pelaku) temukan, itu tidak akan terjadi. Sekarang kalau niat pasti ada dari pelaku, kesempatan adanya di sasaran atau korban. Kalau korbannya bersepeda bawa *handphone* ditaruh di belakang, ditaruh tas pinggang, *handphone* ditaruh di stang, tentunya memancing pelaku untuk melakukan pembegalan itu. Kami sangat berharap supaya beberapa kejadian ini menjadi pengalaman, jangan sampai menjadi korban. Karena kalau hanya niat saja, tetapi tanpa kesempatan ini tidak akan terjadi," jelasnya. [BAM/W-11]

Sengaja Buang Sampah di Kalimalang, Didenda Rp 2 Juta



ISTIMEWA

Kedua pembuang sampah di Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi divonis denda Rp 2 juta.

Akibat membuang sampah sembarangan, Abun Gunawan (AG) dan Rahmat Apandi (AP), kehilangan Rp 2 juta. *Ya*, keduanya dengan sengaja membuang sampah di Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Ulah mereka pun tertangkap kamera dan viral di media sosial. Mereka pun ditangkap dan diadili. Pengadilan Negeri (PN) Cikarang mengadili dan menjatuhkan vonis denda sebesar Rp 2 juta keduanya. Mereka divonis dalam perkara tindak pidana ringan terkait ulahnya membuang sampang sembarangan.

"Kedua terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti membuang sampah sembarangan. Mereka harus membayar denda yang telah diputuskan hakim pengadilan sebesar Rp 2 juta," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, Selasa (3/11).

Rahmat Atong mengatakan, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012, Pasal 20 huruf (b) Juncto Pasal 46 tentang Ketertiban Umum.

"Sidang dipimpin hakim tunggal dan uang denda terdakwa akan dititipkan kepada penyidik untuk disetorkan kepada kas negara. Penyidik tersebut berasal dari PPNS Kabupaten Bekasi," bebernya.

Berdasarkan video yang viral di media sosial, kedua pelaku terbukti membuang sampah sembarangan di bantaran Jalan Inspeksi Kalimalang, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, pada Minggu (18/10) petang.

Kedua pelaku telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan adanya kejadian ini, Rahmat berharap menjadi pelajaran bagi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk tidak membuang sampah sembarangan.

"Menghilangkan perilaku buruk tersebut dibutuhkan peran, kerja sama serta kesadaran semua pihak sehingga tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan," pungkasnya. [160]


BERITA SATU
MEDIA HOLDINGS
FIRST MEDIA
FIRST FESTIVAL
LIVE
Lalahuta X RENDYPANDUGO
HOST
MELANIE PUTRIA
SABTU • 7 NOVEMBER 2020 • JAM 19.00 WIB
GRATIS
NIKMATI FIRST FESTIVAL LIVE EXCLUSIVE OFFER
BERHADIAH MACBOOK AIR 2020!
LIVE DI
FIRSTMEDIA.COM/FIRST-FESTIVAL
FIRST MEDIA WORLD
FIRST LIFESTYLE CH 3#
BERITA SATU TV
GOPLAY
SUPPORTED BY
OFFICIAL MEDIA PARTNER
QRIS DONASI BENIH BAIK
PAYMENT ACCEPTED
Scan QR Code Donasi Yang Muncul Saat Live. Dana Yang Terkumpul Akan Dilipatgandakan Oleh First Media Dan Disumbangkan Melalui BenihBaik.com
WWW.FIRSTMEDIA.COM/FIRST-FESTIVAL